



# KEJAHATAN KEUANGAN DAN KONVERSI LAHAN: MENGUNGKAP RISIKO BAGI LEMBAGA KEUANGAN

DIPERSEMBAHKAN OLEH THEMIS DAN WWF-UK





# UCAPAN TERIMA KASIH

© Pok Rie Via Canva.com

Laporan ini merupakan Panduan Klasifikasi Kejahatan Keuangan dalam Bidang Keuangan Kejahatan Lingkungan yang sedang dikembangkan oleh WWF dan Themis, sebagai bagian dari **Climate Solutions Partnership**<sup>1</sup>, suatu kolaborasi antara HSBC, World Resources Institute, dan WWF.

Dengan ucapan terima kasih kepada:

Olivia Dakeyne

Aine McParland

Nadia O'Shaughnessy

Jean-Luc Bourrin

John Dodsworth

Eliza Thompson

Carel van Randwyck

Lizzie Stewart

Henry J Wyard

Dickon Johnstone

Ghia Sleiman

Aria Poshteh

Paulina Villalpando

Veronica Robledo Vallejo

Valeria Llano-Arias

Sam Pollard

Ben Coleman

Rob Parry-Jones

Colman O' Criodain

Paul de Ornellas

Jake White

Edmund Pragnell

Matt Gledhill

Peserta dalam diskusi kelompok  
terfokus kami

Responden survei sikap kami

<sup>1</sup> [Climate Solutions Partnership | HSBC Holdings plc](#)

# DAFTAR ISI

© Marcin Juha Via Canva.com

<b>0</b>	<b>RANGKUMAN EKSEKUTIF</b>	
	Rangkuman Eksekutif .....	<b>7</b>
<b>1</b>	<b>BAB 1: PENDAHULUAN</b>	
	Pendahuluan .....	<b>12</b>
<b>2</b>	<b>BAB 2: PERMASALAHAN: KONVERSI LAHAN</b>	
	2.1 Definisi .....	<b>14</b>
	2.2 Konversi lahan: lebih dari sekadar deforestasi .....	<b>17</b>
	2.3 Pendorong konversi lahan .....	<b>19</b>
	2.4 Dampak konversi lahan .....	<b>21</b>
<b>3</b>	<b>BAB 3: EKSPOSUR LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP KONVERSI LAHAN</b>	
	3.1 Apa saja risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan? .....	<b>25</b>
	3.2 Bagaimana risiko-risiko ini terjadi? .....	<b>27</b>
	• 3.2.1 Risiko aktivitas bisnis .....	<b>28</b>
	• 3.2.2 Risiko komoditas .....	<b>32</b>
	• 3.2.3 Risiko rantai pasok .....	<b>43</b>

# 4

## **BAB 4: KONVERGENSI DENGAN KEJAHATAN ASAL (PREDICATE CRIME) - RISIKO BAGI LEMBAGA KEUANGAN**

4.1 Definisi: Predicate crime .....	<b>45</b>
4.2 Predicate crime dan konversi lahan .....	<b>47</b>
4.3 Pendorong dan penentu .....	<b>48</b>
• 4.3.1 Pertambangan ilegal .....	<b>48</b>
• 4.3.2 Penebangan pohon secara ilegal .....	<b>51</b>
• 4.3.3 Perdagangan narkoba .....	<b>53</b>
• 4.3.4 Aktivitas kejahatan serius terorganisasi .....	<b>56</b>
• 4.3.5 Pendanaan teroris dan konflik .....	<b>61</b>
• 4.3.6 Korupsi dan suap .....	<b>62</b>
• 4.3.7 Penghindaran pembayaran pajak .....	<b>63</b>
• 4.3.8 Penipuan .....	<b>66</b>
• 4.3.9 Pencucian uang berbasis perdagangan .....	<b>66</b>
4.4 Kejahatan yang berkorelasi (correlating crime)	
• 4.4.1 Perdagangan ilegal satwa liar dilindungi .....	<b>66</b>
• 4.4.2 Perdagangan manusia, kerja paksa, perbudakan, dan pekerja anak .....	<b>67</b>
4.5 Pentingnya seleksi dan pemantauan .....	<b>67</b>

# 5

## **BAB 5: STUDI KASUS**

5.1 Penggelapan ternak di Amerika Selatan dan Tengah	<b>70</b>
5.2 Pencucian emas yang ditambang secara ilegal di Kolombia .....	<b>73</b>
5.3 Penyuaapan, korupsi, penghindaran pajak, dan pelanggaran hak asasi manusia di sektor kelapa sawit dan penebangan kayu di Papua Nugini .....	<b>74</b>



## BAB 6: PANDANGAN DARI LEMBAGA KEUANGAN: HASIL SURVEI YANG MENILAI KESADARAN DAN SIKAP INDUSTRI TERHADAP KONVERSI LAHAN DAN PREDICATE CRIME YANG TERKAIT

6.1 Kesadaran, penentuan prioritas, dan sikap	
• 6.1.1 Sebuah masalah bersama .....	<b>78</b>
• 6.1.2 Perundang-undangan dan regulasi merupakan insentif utama .....	<b>78</b>
• 6.1.3 Sumber daya yang memadai .....	<b>80</b>
• 6.1.4 Risiko dan peluang .....	<b>80</b>
• 6.1.5 Kebijakan dan Pengawasan .....	<b>81</b>
• 6.1.6 Variasi regional dalam kesadaran .....	<b>82</b>
6.2 Tindakan seleksi dan pemantauan .....	<b>84</b>
• 6.2.1 Persepsi terhadap predicate crime .....	<b>84</b>
• 6.2.2 Menangani kejahatan keuangan terkait konversi lahan .....	<b>85</b>
6.3 Permasalahan data: Eksternal dan Internal .....	<b>88</b>
• 6.3.1 Sistem seleksi otomatis perusahaan .....	<b>88</b>
• 6.3.2 Berbagi data peer-to-peer .....	<b>88</b>
• 6.3.3 Data pribadi dan undang-undang perlindungan data .....	<b>89</b>
• 6.3.4 Sekat-sekat data .....	<b>89</b>
• 6.3.5 Tanggung jawab departemen atas risiko konversi lahan .....	<b>89</b>
• 6.3.6 Area risiko utama .....	<b>90</b>
• 6.3.7 Kompleksitas rantai pasokan dan jalur perdagangan .....	<b>97</b>
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>98</b>

**A1**

**LAMPIRAN 1: PANDANGAN DARI REGULATOR: PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN REGULASI GLOBAL YANG BERDAMPAK PADA LEMBAGA KEUANGAN ..... 99**

**A2**

**LAMPIRAN 2: SARAN DAN BIMBINGAN DARI BADAN INTERNASIONAL ..... 116**





# Rangkuman Eksekutif

---

Menurut [Global Canopy](#), pendanaan sebesar USD 6,1 triliun diberikan kepada 350 perusahaan yang memiliki risiko terbesar terhadap deforestasi hutan tropis oleh sekitar 150 lembaga keuangan pada tahun 2023. Mengingat hal ini, WWF dan Themis telah bermitra untuk menciptakan serangkaian sumber daya praktis bagi lembaga keuangan untuk mengelola eksposur mereka terhadap deforestasi, termasuk laporan pendahuluan yang akan menjadi bagian dari Panduan Klasifikasi Kejahatan Keuangan dalam bidang Lingkungan yang lebih luas.

Deforestasi memiliki serangkaian dampak buruk terhadap lingkungan dan sosial serta menimbulkan ancaman serius terhadap upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Hal ini mungkin merupakan bentuk konversi lahan yang paling banyak dibicarakan – sebuah istilah yang mencakup perubahan penggunaan lahan di berbagai ekosistem dan bioma, bukan hanya kawasan hutan, dan oleh karena itu harus dianggap sebagai bagian dari cakupan yang lebih luas di luar deforestasi saja. Memang benar, meskipun fokus dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengarah kepada langkah-langkah pencegahan untuk mengekang deforestasi di Amazon, misalnya, bioma penting, seperti Cerrado di Brasil dan [Gran Chaco](#) (mencakup Argentina, Brasil, Bolivia, dan Paraguay), yang terdiri dari padang savana, lahan basah, dan hutan kering, telah mengalami kerusakan dan degradasi yang parah akibat konversi lahan, dan kurang mendapat perhatian.







Lembaga keuangan dapat terkena dampak aktivitas konversi lahan melalui investasi, penyediaan modal, dan pembiayaan perdagangan komoditas keras dan lunak, terutama sapi, kedelai, minyak sawit, kayu, kakao, kopi, karet, mineral, minyak, dan gas. Terlebih lagi, dengan semakin banyaknya perundang-undangan dan regulasi di Inggris, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan yurisdiksi lainnya di seluruh dunia yang diarahkan untuk mengatasi deforestasi dari sudut pandang pendanaan, lembaga-lembaga keuangan menghadapi risiko regulasi yang lebih besar daripada sebelumnya.

Mengingat keprihatinan besar terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), banyak perusahaan telah melakukan penilaian risiko dan berupaya membatasi paparan mereka terhadap aktivitas terkait konversi lahan. Namun, selain itu, konversi lahan sering kali menyatu dengan serangkaian kejahatan keuangan – terlepas dari apakah tindakan tersebut legal atau tidak – termasuk penyuapan dan korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, dan penipuan, serta predicate crime lainnya yang termasuk dalam pencucian uang, termasuk perdagangan manusia, narkoba, satwa liar, dan sumber daya alam lainnya. Dengan melakukan hal ini, ini akan berdampak pada jaringan kejahatan global yang berbahaya, yang sering kali bersifat terorganisasi, mengganggu stabilitas supremasi hukum, dan merampas pendapatan pajak pemerintah di seluruh dunia – serta menimbulkan risiko kejahatan keuangan yang signifikan bagi perusahaan.



Kejahatan finansial dan predicate crime ini dapat secara aktif mendorong dan berkaitan dengan konversi lahan.

Misalnya:



Peternakan, perkebunan, dan pertambangan yang didirikan di atas lahan yang telah dibuka untuk mencuci hasil ilegal dari aktivitas kriminal terorganisasi yang serius dan perdagangan gelap narkoba. Lahan juga dapat dibuka untuk dijadikan lahan budidaya narkoba, serta infrastruktur yang diperlukan untuk mengangkut narkoba melalui wilayah yang belum dikembangkan.



Pemalsuan dokumen, termasuk kesalahan pembuatan faktur, izin perdagangan, peretasan database perdagangan, atau bill of lading palsu, yang digunakan untuk menyembunyikan atau menggambarkan aktivitas secara keliru.



Perusahaan-perusahaan kayu bertindak sebagai operasi terdepan dalam penyelundupan barang-barang lain, seperti produk-produk perdagangan ilegal satwa liar dilindungi, yang ditemukan diangkut dalam lubang-lubang kayu pada proses pengiriman kayu.



Korupsi dan penyuapan digunakan untuk mendapatkan izin pembukaan lahan yang tidak seharusnya dikeluarkan.



Aliran keuangan dari negara-negara bebas pajak yang sangat rahasia mendanai aktivitas konversi lahan.



Pekerja paksa dan pekerja anak dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas pembukaan lahan yang berbahaya.



Perusahaan-perusahaan samaran (front company) biasanya menghindari pajak atas kegiatan pembukaan lahan.





© Andre Dib / WWF-Brazil

Konvergensi dengan beragam kejahatan keuangan ini menunjukkan bahwa perusahaan harus melihat lebih dari sekadar definisi konversi lahan yang legal dan ilegal— yang dalam kasus apa pun, sulit untuk mendefinisikan batasnya karena banyak aktivitas yang terjadi di wilayah abu-abu yang juga berkaitan dengan ancaman konvergensi dengan kejahatan berat lainnya sangatlah besar. Memang benar, mengingat adanya tumpang tindih yang luas ini, adanya konversi lahan mungkin dianggap oleh perusahaan sebagai tanda bahaya dan indikator utama terjadinya kejahatan keuangan dan predicate crime lainnya.

Sebagai bagian dari proyek ini, WWF dan Themis menyurvei 644 profesional jasa keuangan dari 17 negara untuk mengukur pemahaman dan sikap mereka terhadap isu konversi lahan dan kejahatan keuangan terkait. Survei ini dilengkapi dengan penelitian berbasis literatur, wawancara dengan para ahli, dan diskusi kelompok terfokus dengan para praktisi untuk lebih memahami eksposur lembaga keuangan terhadap kejahatan keuangan terkait konversi lahan.

Data dari survei ini menyoroti kesenjangan dalam pengetahuan kelembagaan di seluruh industri, serta kerentanan utama dalam sistem keuangan global ketika menangani hasil kejahatan keuangan terkait konversi lahan. Khususnya, **hampir separuh lembaga keuangan yang dijadikan sampel dilaporkan beroperasi di sektor atau wilayah berisiko tinggi, namun lebih dari seperempatnya mengatakan bahwa mereka tidak melakukan uji tuntas terkait secara spesifik.**

Selain itu, relatif sedikit responden yang menyatakan bahwa mereka memantau atau menyaring perusahaan secara berkala atau berkelanjutan, bukan hanya pada tahap awal suatu hubungan. Hal ini menunjukkan adanya kerentanan di seluruh sektor, terutama eksposur risiko terhadap pihak-pihak yang baru memulai aktivitas terlarang setelah mereka bergabung dengan bank. Hal ini bahkan lebih memprihatinkan mengingat **antara seperlima dan sepertiga responden survei juga menyatakan bahwa perusahaan mereka telah memberi kesaksian tentang upaya pihak ketiga untuk menyembunyikan kejahatan keuangan atau praktik bisnis tidak etis terkait dengan konversi lahan.**



Kesenjangan pengetahuan dan prosedur yang diidentifikasi dalam survei ini – ketika digabungkan dengan data mengenai jumlah pendanaan global yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada perusahaan-perusahaan yang berisiko deforestasi– menimbulkan kekhawatiran dan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membantu perusahaan-perusahaan mengatasi konversi lahan dari perspektif kejahatan keuangan, serta ESG.

Memang benar, peserta penelitian kami menyatakan bahwa pelatihan dan sumber daya khusus konversi lahan yang ditujukan kepada lembaga keuangan diperlukan untuk membantu perusahaan mengatasi hambatan yang ada, termasuk kurangnya prioritas internal, kemauan lembaga, dan pendanaan. Selain itu – dan hal yang menggembirakan – hampir **separuh responden mengindikasikan kesediaannya untuk mengakhiri hubungan bisnis karena kuatnya kekhawatiran seputar kejahatan keuangan terkait konversi lahan**. Hal ini menunjukkan bahwa menggambarkan dan menekankan risiko eksposur kejahatan keuangan melalui kegiatan konversi lahan dapat menjadi pendorong utama dalam mengurangi pembiayaan kegiatan berbahaya ini, membantu perusahaan untuk membagi risiko dan sumber daya yang terkait.

Untuk menghadapi kebutuhan ini, laporan ini berfungsi sebagai pengantar Panduan Klasifikasi Kejahatan Keuangan dalam Bidang Lingkungan yang lebih luas, yang tahap pertama akan kami luncurkan pada akhir tahun ini. Dampak kejahatan lingkungan jelas, baik dari sudut pandang ekonomi maupun lingkungan. Menurut analisis oleh RHIPTO, INTERPOL, dan Global Initiative Against Transnational Organized Crime pada tahun 2018, kejahatan lingkungan diperkirakan menghasilkan antara USD110 dan 281 miliar setiap tahunnya. Sejauh tahun 2016, INTERPOL dan Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai bahwa dampak biaya meningkat sebesar 5% hingga 7% per tahun – dua hingga tiga kali lipat laju perekonomian global – menjadikan kejahatan lingkungan sebagai aktivitas kriminal terbesar keempat di dunia. di belakang perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan pemalsuan.

Versi awal dari panduan ini ini akan membekali perusahaan dengan sarana untuk mendeteksi dan memantau dengan lebih baik aktivitas terlarang terkait konversi lahan, dan akan mencakup tipologi, indikator tanda bahaya, tata kelola, dan penilaian risiko. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi sumber daya digital yang sangat praktis yang dapat dimasukkan oleh perusahaan ke dalam pengendalian yang ada, membantu mereka memitigasi eksposur risiko terhadap aliran keuangan gelap yang terkait dengan konversi lahan, dan oleh karena itu pada akhirnya mengurangi pembiayaan dan dampak dari aktivitas yang sangat merugikan ini. Di seluruh dunia. Hal ini pada akhirnya akan menjadi bagian dari Panduan Klasifikasi Kejahatan Keuangan Lingkungan yang lebih luas, yang akan memperluas fokus untuk mencakup kejahatan lingkungan lainnya selain konversi lahan.



# 1

## PENDAHULUAN

Konversi lahan – ketika deforestasi mungkin merupakan bentuk yang paling banyak dipahami – menimbulkan ancaman serius terhadap ekosistem global dan kemampuan dunia untuk melawan perubahan iklim. Platform Kebijakan Sains Antarpemerintah tentang Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem (IPBES) memperkirakan bahwa degradasi permukaan bumi akibat aktivitas manusia saat ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan setidaknya 3,2 miliar orang, mendorong planet ini menuju kepunahan spesies massal keenam, dan menyebabkan kerugian lebih dari 10% produk domestik bruto global tahunan akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.

Konversi lahan memiliki dampak buruk pada skala lokal dan global namun juga sering kali berkaitan dengan serangkaian kejahatan keuangan, terlepas dari apakah tindakan tersebut legal, termasuk penyuapan dan korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, dan penipuan, serta predicate crime lainnya seperti pencucian uang, termasuk perdagangan manusia, narkoba, satwa liar, dan sumber daya alam lainnya. Dengan demikian, hal ini berkontribusi pada jaringan kejahatan global yang berbahaya – yang sering kali bersifat terorganisasi – yang mengganggu stabilitas supremasi hukum dan merampas pendapatan pajak pemerintah di seluruh dunia. Bahkan, sejak tahun 2016, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan INTERPOL mencatat bahwa 84% negara melihat adanya konvergensi antara kejahatan lingkungan (yang mencakup konversi lahan ilegal) dan kejahatan serius lainnya. Hal ini menimbulkan ancaman besar tidak hanya terhadap ekosistem lokal tetapi juga terhadap sistem keuangan global, yang dieksploitasi oleh para penjahat untuk mencuci hasil kejahatan tersebut.

Sektor swasta memiliki peran penting bersama dengan penegak hukum dan Unit Intelijen Keuangan (FIU) dalam membantu menyelidiki aliran keuangan gelap di balik konversi lahan – belum lagi kewajiban peraturan. Lembaga keuangan adalah penjaga sejumlah besar data unik, termasuk intelijen transaksional dan profil klien yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dengan lebih baik dalam mengatasi kejahatan keuangan terkait dengan konversi lahan. Jika perusahaan dapat memahami lebih banyak tentang konvergensi ini dan didorong untuk menandai transaksi mencurigakan terkait, maka lembaga penegak hukum terkait dapat memperoleh keuntungan atas para penjahat yang mengeksploitasi sistem keuangan, dan perusahaan dapat melindungi diri dari berbagai risiko fisik, hukum, dan reputasi yang terkait dengan konversi lahan.





Sejak Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi pertamanya yang mengakui kejahatan lingkungan hidup sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi transnasional lainnya pada tahun 2017, badan-badan internasional semakin menaruh perhatian pada masalah ini. Kejahatan lingkungan terdaftar sebagai salah satu bidang fokus utama Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), serta EUROPOL dan INTERPOL – keduanya telah memimpin banyak operasi yang sukses dalam menanggulangi kejahatan lingkungan sejak sekitar tahun 2015. Sejumlah undang-undang baru-baru ini dan yang akan datang, termasuk Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) dan amandemen RUU Jasa Keuangan dan Pasar Inggris, menunjukkan bahwa konversi lahan menjadi agenda pemerintah, dan bahwa sektor keuangan semakin mendapat sorotan ketika menyangkut masalah penting ini.

Laporan ini merupakan tahap pertama dalam proyek yang dilakukan secara kolaboratif oleh WWF-UK dan Themis yang akan menghasilkan panduan digital, yang bertujuan untuk membantu lembaga keuangan mengidentifikasi dan memitigasi paparan mereka terhadap risiko kejahatan keuangan terkait konversi lahan yang nantinya juga mencakup risiko kejahatan lingkungan lainnya yang lebih luas, dan mendukung mereka dalam mengatasi aliran keuangan gelap yang terkait. Panduan ini akan melanjutkan keberhasilan dari Panduan Mencegah Perdagangan Ilegal Satwa Liar dilindungi yang dikembangkan oleh Jaringan Kejahatan Serius dan Terorganisasi Pemerintah Inggris bekerja sama dengan Themis, WWF, dan TRAFFIC dan – mengingat masukan positif yang diterima dari lembaga-lembaga keuangan global – disusun dengan cara yang sama.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberi konteks dan pengenalan pada tahap pertama panduan ini serta tema dan area fokus yang akan dibahas; laporan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi sumber daya yang lengkap, karena sebagian besar tema laporan akan dibahas secara lebih terperinci dalam panduan ini. Hal ini mengacu pada penelitian berbasis literatur, wawancara dengan spesialis dan pakar di bidangnya, serta konsultasi dan diskusi kelompok terfokus dengan lembaga keuangan dan profesional kejahatan lingkungan dan keuangan. Laporan ini juga memanfaatkan analisis data dari survei ekstensif yang diluncurkan khusus untuk proyek ini dan ditanggapi oleh 644 profesional yang bekerja di lembaga keuangan di 17 negara. Survei ini mencari wawasan mengenai tren terkini, tanda bahaya, dan tipologi kejahatan keuangan yang terkait dengan konversi lahan, serta sikap profesional keuangan terhadap isu tersebut.

Panduan yang dikembangkan melalui penelitian ini akan tersedia bagi semua orang, sebagai halaman web yang dapat diakses secara bebas.



# 2

## PERMASALAHAN: KONVERSI LAHAN

### 2.1 Definisi

**Konversi lahan** mengacu pada perubahan ekosistem alami secara substansial dan berkelanjutan (termasuk melalui penerapan praktik pengelolaan lahan yang berbeda) menjadi penggunaan lahan lain atau perubahan besar dalam komposisi, struktur, atau fungsi spesies. Definisi tersebut mencakup semua jenis ekosistem, misalnya: hutan, padang rumput, lahan rawa, lahan gambut, rawa bakau, dan sabana.

**Deforestasi** merupakan jenis konversi lahan yang spesifik dan salah satu yang mungkin sampai saat ini paling menarik perhatian global: konversi hutan alam menjadi lahan pertanian atau penggunaan lahan non-hutan lainnya atau menjadi perkebunan; atau degradasi hutan alam yang parah dan berkelanjutan (misalnya, melalui penebangan pohon untuk diambil kayunya).\*

**Degradasi** mengacu pada perubahan dalam ekosistem alami yang secara signifikan dan negatif memengaruhi komposisi spesies, struktur dan/atau fungsi, sehingga mengurangi kapasitasnya untuk mendukung keanekaragaman hayati, memasok produk, dan/atau memberikan jasa lainnya. Degradasi menjadi konversi jika:

- berskala besar dan progresif atau bertahan lama;
- mengubah komposisi, struktur, dan fungsi ekosistem sehingga regenerasi ke kondisi sebelumnya tidak mungkin terjadi; atau
- menyebabkan perubahan penggunaan lahan (Contoh: untuk pertanian atau penggunaan lain yang bukan merupakan hutan alam atau ekosistem alami lainnya).



© Curioso.Photography / Shutterstock

\*Meskipun definisi deforestasi sudah dikenal secara luas, tidak semua negara dan institusi menganutnya. Misalnya, menurut definisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, deforestasi adalah konversi tutupan hutan menjadi tutupan non-hutan, sehingga penanaman pohon tidak dianggap sebagai penyebab deforestasi.



Konversi lahan dapat terjadi secara legal atau ilegal (walaupun sebagian besar terjadi di wilayah abu-abu di antara keduanya):



**Legal** – Kegiatan pembukaan lahan yang telah disetujui secara resmi dan sah (sesuai dengan proses dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) oleh instansi terkait, yang tidak melanggar batas kawasan lindung dan dilakukan berdasarkan surat izin atau lisensi yang diberikan. Kegiatan konversi lahan yang sah atau legal masih dapat menyatu dengan tindak pidana asal lainnya; misalnya, penghindaran pajak atas keuntungan perusahaan yang melakukan penebangan hutan atau penyuaian pejabat untuk menggunakan kekerasan atau kekuasaan terhadap protes masyarakat lokal. Meskipun jenis konversi lahan tertentu legal di banyak negara, namun dalam sebagian besar kasus, konversi lahan tersebut tidak sejalan dengan komitmen sukarela seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE). Berdasarkan inisiatif atau kebijakan terkait tersebut, misalnya, bank dapat berjanji untuk tidak memberikan pinjaman kepada perusahaan yang tidak tersertifikasi dalam skema ini atau tidak menandatangani komitmen tersebut. Berkat kemajuan seperti rekaman drone dan TRASE Finance, kapasitas pemantauan publik terhadap komitmen ini meningkat pesat.



**Ilegal** – Kegiatan pembukaan lahan yang bertentangan dengan undang-undang, skema, atau regulasi yang berlaku (Contoh: di dalam atau di lahan yang dilindungi) atau oleh entitas yang tidak memiliki hak hukum (Contoh: ketika entitas beroperasi tanpa izin atau lisensi, atau mengubah atau memperoleh lahan melalui cara yang curang atau korup, atau ketika konversi lahan 'berlebihan' terjadi di luar batas atau parameter atau kawasan atau aktivitas yang disetujui). Berdasarkan klasifikasi ini, hingga 70% deforestasi di Amazon diperkirakan terjadi secara ilegal.



# FOKUS : WILAYAH HUKUM ABU-ABU

Akan sangat sulit untuk membedakan antara alih fungsi (konversi) lahan yang legal dan ilegal karena:

- **Variasi yurisdiksi dalam undang-undang dan regulasi** yang mengatur konversi lahan, yang berarti bahwa apa yang dianggap melanggar hukum di satu negara atau wilayah, mungkin tidak berlaku di negara atau wilayah lain.
- **Ambiguitas dan wilayah abu-abu dalam undang-undang dan regulasi nasional** mengenai bagaimana ilegalitas didefinisikan atau ditafsirkan (misalnya, jika suatu izin memberi hak untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan tetapi diperoleh melalui cara-cara yang korup, apakah hal tersebut secara otomatis juga mengakibatkan ilegalitas pada kegiatan konversi lahan atau apakah korupsi hanyalah tindakan ilegal yang tersendiri).
- **Kurangnya konsensus mengenai definisi-definisi utama yang mendasarinya:** misalnya, saat ini terdapat lebih dari 800 definisi istilah “hutan” yang digunakan di seluruh dunia: tanpa kesepakatan global tentang apa yang dimaksud dengan hutan, mustahil untuk menetapkan satu definisi tunggal yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “deforestasi” (misalnya, berapa skala atau proporsi pohon yang harus ditebang), sehingga memberi ruang yang luas bagi para pelaku untuk mengakali peraturan seputar deforestasi dan konversi lahan.
- **Kurangnya kejelasan mengenai kepemilikan lahan** di banyak wilayah konversi yang berisiko tinggi, khususnya terkait dengan hak atas tanah adat. Wilayah Adat yang diakui secara hukum diketahui melindungi hutan dan menjadi penahan laju deforestasi – dan aktivitas konversi yang terjadi di wilayah tersebut diakui dan dianggap melanggar hukum. Apakah suatu negara secara resmi mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal dalam konstitusi mereka atau tidak dan/atau secara sukarela menandatangani konvensi (seperti Konvensi Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat yang ditandatangani oleh bangsa-bangsa Amazon), sistem administratif yang lemah dan/atau relatif kurangnya kekuatan perlindungan hukum karena kelompok masyarakat ini sering kali membuat sistem kepemilikan lahan menjadi kacau dan tidak aman, yang berarti bahwa aktivitas konversi yang melanggar batas wilayah tersebut mungkin tidak secara jelas dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Di Peru, misalnya, pengakuan hukum atas hak wilayah bagi komunitas Unipacuyacu dapat memakan waktu hingga 30 tahun, yang menyebabkan meningkatnya konflik, pelanggaran, perselisihan, dan konversi lahan yang terkait dengan perampasan tanah.
- **Transparansi data yang relevan.** Misalnya, Undang-undang Kehutanan Brasil, yang disahkan pada tahun 1965, menetapkan jumlah deforestasi dan konversi lahan yang dapat terjadi pada lahan milik pribadi di pedesaan (20-80% harus dipertahankan dalam kondisi vegetasi asli, bergantung pada negara bagian tempat tinggal pemilik lahan). Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa pemilik lahan harus mendapat izin deforestasi dari badan lingkungan hidup negara bagian tersebut; setiap deforestasi yang terjadi tanpa izin adalah tindakan ilegal. Namun, kurangnya informasi perizinan yang tersedia untuk umum dan dapat dibandingkan di beberapa negara bagian di Brasil membuat sulit untuk menentukan legalitas deforestasi regional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 94% dari wilayah deforestasi yang diteliti di bioma Amazon dan Cerrado tidak memiliki data izin deforestasi yang tersedia untuk umum atau tidak akurat (Contoh: Sudah habis masa berlakunya), dan oleh karena itu harus dianggap ilegal.



**Tindakan untuk lembaga keuangan:** *Lihatlah lebih jauh dari sekadar definisi legalitas dan ilegalitas, mengingat risiko reputasi dari konversi yang lebih luas dan kemungkinan konvergensi dengan aktivitas terlarang lainnya.*



## 2.2 Konversi Lahan: Lebih dari Sekadar Deforestasi

Pada tahun 2022, deforestasi global mencapai 6,6 juta hektar – 96% di antaranya terjadi di wilayah tropis. Hal ini merupakan keprihatinan yang mendesak mengingat dampak sosial dan lingkungan akibat konversi lahan secara global, dan dampak khusus deforestasi terhadap perubahan iklim.

Perlu dicatat bahwa hingga saat ini penekanan lebih banyak ditujukan pada deforestasi, namun bentuk-bentuk konversi lahan lainnya juga menyebabkan banyak kerusakan pada semua jenis ekosistem di seluruh dunia, tidak hanya kawasan hutan. Hanya 20% dari vegetasi asli di Cerrado Brasil – sabana tropis dan subtropis yang mencakup lebih dari 20% negara, yang merupakan salah satu bioma paling penting dan memiliki keanekaragaman hayati di dunia – tetap utuh, misalnya, sebagian besar disebabkan oleh produksi kedelai yang agresif.

Kesenjangan dalam perundang-undangan dan regulasi sampai saat ini kurang memberi perlindungan terhadap ekosistem penting lainnya selain hutan, seperti padang rumput dan lahan basah. Hal ini membahayakan bioma penting Amerika Selatan yang termasuk dalam kategori lain, seperti Cerrado Brasil dan Gran Chaco (ekosistem hutan terbesar kedua di benua ini setelah Amazon, dan lansekap beragam yang terdiri dari sabana, lahan basah, dan hutan kering yang mencakup wilayah seluas Argentina, Brasil, Bolivia, dan Paraguay).





## FOKUS: MENINGKATNYA KONVERSI LAHAN DI CERRADO BRASIL: TANTANGAN UTAMA

Dalam enam bulan pertama tahun 2023 saja, Cerrado mengalami peningkatan pembukaan dan konversi lahan untuk keperluan pertanian sebesar 21%.

Beberapa pihak mengaitkan tantangan dalam melindungi Cerrado terhadap tekanan politik dari pelobi agribisnis yang kuat di Brasil dan kurangnya pengakuan terhadap Masyarakat Adat dan komunitas lokal serta hak atas tanah mereka di bioma tersebut (kelompok-kelompok ini telah secara resmi diakui sebagai “penjaga hutan dunia” yang terbaik). Kurang dari 3% bioma Cerrado dilindungi secara hukum dibandingkan dengan 46% wilayah Amazon, dan hanya 5-7% yang diakui sebagai wilayah Adat (dibandingkan dengan sekitar 25% wilayah Amazon). Hal ini dapat diperparah dengan kurangnya pengetahuan masyarakat dan internasional mengenai Cerrado – dan karena itu tekanan untuk melindunginya – dibandingkan dengan Amazon.

Variasi regional dalam regulasi penggunaan lahan juga memainkan peranannya. Undang-undang mengharuskan 80% lahan pribadi di Amazon dilestarikan, namun di Cerrado, dengan izin lingkungan yang benar, pemilik lahan pribadi secara hukum diizinkan untuk menebangi hingga 80% vegetasi asli di lahannya. Menariknya, meskipun ada izin yang signifikan untuk pembukaan lahan vegetasi secara legal, laporan dari Life Center Institute masih menemukan bahwa 88% deforestasi di Cerrado pada tahun 2019 adalah ilegal.

Instrumen hukum di Cerrado juga relatif kurang dibandingkan dengan Amazon, yang telah memiliki Rencana Aksi untuk Pencegahan dan Pengendalian Deforestasi (PPCDAm) sejak tahun 2004 (walaupun rencana ini ditangguhkan pada masa pemerintahan Bolsonaro). Ada usulan Rencana Aksi untuk Pencegahan Deforestasi dan Pengendalian Deforestasi dan Pembakaran di Cerrados – PPCerrado – yang sedang diterapkan untuk Cerrado, namun, pada saat penulisan artikel ini, hal ini sudah terlambat dan informasi pastinya belum diungkap. Namun demikian, para ahli percaya bahwa kecil kemungkinannya akan ada banyak perubahan terhadap izin legal deforestasi yang sudah ada, yaitu hingga 80%.



**Tindakan untuk lembaga keuangan:** Tindakan untuk lembaga keuangan: Memperluas definisi dan indikator kebijakan untuk mencakup bioma yang lebih luas, tidak hanya hutan.



## 2.3 Pendorong Konversi Lahan

Konversi lahan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk:



### Tren Konsumsi

- Meningkatnya permintaan global terhadap produk hewani: meningkatnya pendapatan menggeser permintaan terhadap bahan makanan seperti daging, dan makanan untuk sapi dan unggas (Contoh: Kedelai) yang diperlukan untuk mendukung permintaan daging dan produk turunannya atau produk sampingannya (Contoh: suplemen kolagen), yang mengarah pada perluasan sistem peternakan sapi dan batas-batas pertanian yang tidak efisien. Peningkatan serupa terjadi pada permintaan makanan nabati (Contoh: kedelai) seiring dengan semakin sadarnya konsumen terhadap kesehatan dan lingkungan.
- Meningkatnya permintaan global terhadap makanan nonmusiman dan nonlokal (Contoh: Alpukat).



### Dinamika Pasar

- Turunnya harga global untuk komoditas lunak (Contoh: Kopi), memberi tekanan pada petani untuk memproduksi dalam jumlah yang lebih besar guna mempertahankan pendapatan mereka.
- Meningkatnya permintaan kayu untuk menghasilkan produk seperti biomassa dan kertas (diperkirakan bahwa konsumsi kayu global akan tumbuh sebesar 54% antara tahun 2010 dan 2050).
- Meningkatnya harga emas dan meningkatnya permintaan global akan mineral transisi (diperkirakan meningkat hampir 500% pada tahun 2040), mendorong aktivitas penambangan legal dan ilegal.



### Kemajuan Teknologi dan Perkotaan

- Peningkatan teknologi peralatan dan mesin pertanian, peningkatan kemudahan dan efisiensi pembukaan lahan. Selain itu, meningkatnya skala pembakaran oleh manusia untuk membuka lahan, mengubah frekuensi dan waktu terjadinya kebakaran secara musiman, serta menggunakan pembakaran tersebut ke ekosistem yang tidak mengalami kebakaran secara alami.
- Meningkatnya urbanisasi dan pembangunan infrastruktur yang merambah kawasan hutan.



## Kejahatan dan Ilegalitas

- Perampasan tanah oleh individu, perusahaan, dan pemerintah, dengan vegetasi alami kemudian ditebangi untuk dijadikan tempat tinggal atau produksi komoditas pertanian.
- Meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi kelompok kejahatan terorganisasi yang beroperasi di kawasan hutan.
- Tindakan keras terhadap perdagangan gelap narkoba di wilayah tertentu mendorong pelaku kejahatan untuk melakukan diversifikasi ke komoditas yang kurang 'berisiko', seperti kayu dan emas.



## Lanskap Legislatif

- Hukuman yang lebih rendah untuk kejahatan lingkungan dibandingkan dengan pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya di banyak wilayah, mendorong para penjahat untuk memilih melakukan kejahatan kehutanan sebagai pilihan 'berisiko rendah dan imbalan tinggi'.
- Kesenjangan dalam kerangka hukum dan implementasi undang-undang yang melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal (khususnya hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya).



## Konflik dan Ketidakstabilan Politik/Kuangan

- Konflik sering kali dibiayai oleh ekstraksi sumber daya termasuk minyak, mineral, satwa liar, kayu, dan artefak budaya (yang semuanya mungkin memerlukan pembukaan lahan).
- Pada saat terjadi kekerasan dan pergolakan, upaya konservasi dan perlindungan terhadap kejahatan lingkungan hidup dapat terhambat karena masalah keamanan.
- Pada saat terjadi ketidakpastian keuangan (baik terkait dengan konflik atau tidak), masyarakat sipil dan kelompok yang terpinggirkan dapat beralih ke sumber daya alam untuk menghidupi diri mereka (Contoh: membakar kayu untuk memanaskan rumah mereka ketika infrastruktur terganggu).



## 2.4 Dampak konversi lahan

Layanan ekosistem mengacu pada aliran manfaat langsung dan tidak langsung terhadap kesejahteraan manusia dan kualitas hidup yang berasal dari modal alam (atau ekosistem). Istilah ini mencakup sumber daya praktis, seperti makanan, air, obat-obatan, penangkapan karbon (carbon capture), dan regulasi iklim, serta aspek budaya seperti mengurangi kecemasan dan stres. Misalnya, 70% masyarakat miskin di dunia bergantung langsung pada spesies liar, diperkirakan 4 miliar orang bergantung pada obat-obatan alami untuk perawatan kesehatan mereka, dan 70% obat yang digunakan dalam pengobatan kanker berasal dari bahan alami atau produk sintetis yang terinspirasi oleh alam.

Konversi lahan berdampak signifikan terhadap penyediaan layanan ekosistem dalam berbagai cara, merampas banyak manfaat kesehatan, ekonomi, dan sosial yang diberikan oleh bioma alami kepada masyarakat.

Konversi lahan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk:



© rognar Via Canva.com

### Penyediaan Layanan Ekosistem

- Dampak negatif terhadap hilangnya keanekaragaman hayati dan kepunahan satwa liar karena habitat alami hancur, terutama karena ekosistem hutan menampung 80% keanekaragaman hayati terestrial (69% satwa liar dunia telah hilang sejak tahun 1970 – sebagian besar berasal dari hotspot konversi lahan).
- Kerusakan kondisi tanah yang sudah tidak dapat diperbaiki di beberapa area pembukaan lahan karena spesies yang menyerang berkoloni dan menghambat pertumbuhan tanaman endemik – dengan demikian, produksi pertanian mungkin terhambat dan kemudian ditinggalkan. Angka yang sering dikutip menunjukkan bahwa 80% lahan pertanian dan 10-20% lahan penggembalaan mengalami erosi yang parah.



© RoschetzkyStockPhoto Via Canva.com

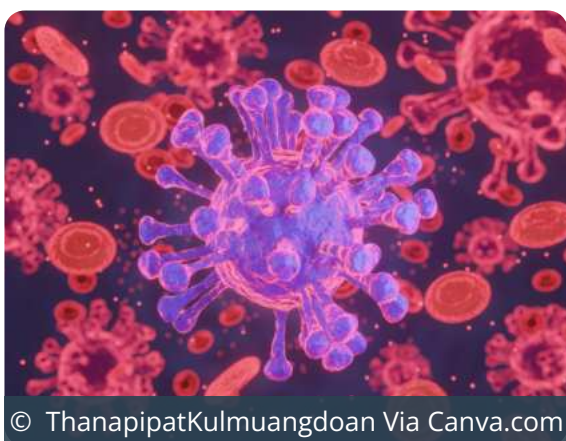
### Iklim

- Upaya untuk melawan perubahan iklim sangat terhambat, karena diperkirakan bahwa perubahan penggunaan lahan bertanggung jawab atas 12-20% emisi karbon global. Memang benar, wilayah Amazon kini mengeluarkan lebih banyak karbon daripada yang diserapnya, sebagian besar disebabkan oleh pembakaran yang sering digunakan untuk membuka lahan untuk pertanian. Sebagaimana disoroti dalam laporan terbaru Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) PBB, salah satu opsi mitigasi terpenting untuk melawan perubahan iklim adalah dengan mengurangi konversi ekosistem alami yang ada.
- Peningkatan kejadian global dan dampak peristiwa cuaca ekstrem dan bencana alam, menyebabkan lebih banyak orang dan komunitas yang mengungsi serta ketidakstabilan ekonomi dan operasional/gangguan rantai pasokan. IPBES memperkirakan bahwa degradasi lahan dan perubahan iklim akan memaksa 50 hingga 700 juta orang bermigrasi pada tahun 2050.



## Kejahatan dan Ilegalitas

- Mendukung aktivitas kriminal terorganisasi transnasional yang serius, memperburuk skema korupsi serta pencucian uang nasional dan regional.
- Meningkatkan tingkat kejahatan lokal, dengan sumber daya yang lebih sedikit meningkatkan tingkat kemiskinan lokal dan memaksa masyarakat melakukan kejahatan untuk mempertahankan diri.



## Kesehatan Manusia

- Meningkatkan risiko berjangkitnya penyakit zoonosis, karena pembukaan lahan mendorong satwa liar keluar dari habitat aslinya, meningkatkan interaksi antara manusia, satwa liar, dan hewan peliharaan sehingga terjadi penggabungan dan munculnya patogen baru.



## Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

- Menyebabkan peningkatan pekerja anak, yang sering kali dimanfaatkan di sektor penghasil komoditas yang mendorong konversi lahan seperti pertambangan (di tempat anak-anak dapat dikirim memasuki tempat yang lebih kecil dibandingkan orang dewasa) dan di perkebunan kakao (Contoh: Di kawasan kakao terpencil di Ghana, di tempat anak-anak bahkan anak berusia lima tahun ditemukan bekerja di pertanian dan menggunakan parang untuk memanen biji kopi yang digunakan dalam rantai pasokan merek-merek rumah tangga global).
- Menyebabkan banyak pelanggaran hak asasi manusia melalui perampasan tanah secara ilegal dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat dan komunitas lokal di kawasan hutan.
- Merupakan penyebab utama pembunuhan terhadap pembela hak asasi manusia lingkungan hidup di seluruh dunia (pada tahun 2023, jumlah ini setara dengan satu pembunuhan setiap hari), yang sering menjadi sasaran aktor korup dan kelompok kriminal karena membela harta benda, tanah, dan sumber daya mereka dan orang lain.





© Chris F. Via Canva.com

## Gangguan Sosial dan Budaya terhadap Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

- Mempengaruhi kejadian penyalahgunaan alkohol, yang terbukti meningkat di banyak wilayah yang terkena dampak deforestasi, seperti wilayah Sava di Madagaskar dan di kalangan masyarakat adat di Paraguay dan Kolombia.
- Mengancam identitas budaya dan keberadaan Masyarakat Adat dan komunitas lokal, khususnya kelompok yang menganggap pemanfaatan sumber daya alam dan lahan secara berkelanjutan merupakan syarat keberadaan budaya, sosial, agama, leluhur, dan ekonomi mereka.



© Juan Jose Via Canva.com

## Cedera dan Kematian

- Meningkatkan jumlah kematian dan cedera akibat kecelakaan (Contoh: Akibat kecelakaan mesin pertanian dan pertambangan (seperti tanah longsor) yang terkait dengan produksi komoditas yang mendorong pembukaan lahan dan dari infrastruktur yang terkait dengan perampasan tanah (seperti pagar listrik yang didirikan oleh pemilik tanah baru yang diketahui telah membunuh dan melumpuhkan penduduk setempat ketika mereka mencoba mengakses lahan yang dulunya milik negara yang menjadi sandaran penghidupan dan identitas budaya mereka)).



© Byron Sullivan Via Canva.com

## Efek berdasarkan Gender

Konversi lahan sering kali menimbulkan dampak negatif yang tidak proporsional terhadap perempuan melalui:

- Kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan oleh petani dan pekerja agribisnis laki-laki lainnya baik terhadap buruh perempuan maupun perempuan dan anak perempuan setempat yang harus menggunakan jalan yang melewati perkebunan, misalnya untuk mengambil air atau pergi ke sekolah.
- Peningkatan kejadian eksploitasi seksual (mis., seperti yang terjadi di industri penebangan liar dan arang di Afrika dan sektor pertambangan ilegal di Peru, di mana perdagangan seks terjadi di kamp pertambangan, yang berdampak pada anak perempuan usia 12 tahun).
- Degradasi lingkungan yang diakibatkan, meningkatkan persaingan atas sumber daya yang langka dan memperburuk kekerasan berbasis gender sebagai cara untuk memperkuat kendali atas sumber daya tersebut.
- Perubahan iklim, yang disebabkan oleh konversi lahan dan semakin memperdalam ketidaksetaraan gender (misalnya, peningkatan tingkat kekerasan oleh pasangan intim dan pernikahan anak terjadi setelah bencana lingkungan hidup).

# STUDI KASUS: PRODUKSI KAYU, ARANG, DAN SIKLON DI MOZAMBIK

Penebangan kawasan hutan, yang berfungsi sebagai zona penyangga terhadap peristiwa cuaca ekstrem, secara langsung menyebabkan dan memperburuk kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam pada masyarakat (misalnya, deforestasi dapat secara langsung menyebabkan tanah longsor setelah hujan lebat), mendorong perpindahan, dan mengganggu stabilitas rantai pasokan lokal dan global.

Pada tahun 2019, Topan Idai melanda, Mozambik, menewaskan lebih dari 600 orang. Kerusakan yang terjadi di kawasan ini – yang disebabkan oleh banjir dan tanah longsor – diperburuk oleh deforestasi: fluktuasi tekanan udara antara daratan dan lautan dapat meningkatkan kecepatan angin tanpa hambatan yang ditimbulkan oleh pepohonan dan, sementara hutan yang sehat menghambat laju air, memungkinkan sebagian besar air terserap ke dalam tanah, ekosistem yang rusak justru meningkatkan risiko banjir.

Sejak tahun 1980, 10-15% hutan di negara ini telah dirusak oleh praktik pertanian, penebangan liar, dan produksi arang – dengan wilayah yang lebih luas dari negara Jerman. Topan ini telah menambah siklus deforestasi di wilayah ini: dengan begitu banyak tanaman yang hancur, para petani beralih ke produksi arang – yang mengharuskan deforestasi – untuk mempertahankan hidup mereka. Hancurnya infrastruktur dan rantai pasokan bahkan menaikkan harga arang, sehingga menciptakan insentif lebih besar bagi petani untuk melakukan deforestasi lebih lanjut, yang pada gilirannya membuat mereka semakin rentan terhadap bencana alam pada masa depan.



© Ghia / Themis



# 3

## EKSPOSUR LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP KONVERSI LAHAN

Menurut [Global Canopy](#), 150 lembaga keuangan yang termasuk dalam [Forest 500](#) – sebuah proyek yang setiap tahun menilai komitmen hak asasi manusia dan deforestasi dari 500 lembaga yang paling terpapar risiko deforestasi tropis – memberi pendanaan sebesar USD6,1 triliun kepada 350 perusahaan yang memiliki eksposur risiko terbesar terhadap deforestasi tropis. Meskipun risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan, sebagaimana diuraikan di bawah ini, merupakan ancaman yang signifikan, ada juga peluang penting bagi perusahaan untuk memanfaatkan perubahan dalam rantai pasokan perusahaan tersebut, sehubungan dengan risiko konversi lahan.

### 3.1 Apa risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan?

Konversi lahan menimbulkan banyak risiko rantai pasok bagi perusahaan, yaitu:

#### Risiko Fisik



Sebagian besar bisnis dan jasa komersial yang dibiayai oleh bank bergantung pada modal/sumber daya alam – jasa ekosistem – baik secara langsung atau melalui rantai pasokan mereka. Konsumsi sumber daya lokal secara agresif mengurangi ketersediaannya dalam jangka panjang, menghambat pembangunan berkelanjutan dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Memang benar, [Forum Ekonomi Dunia](#) memperkirakan bahwa setidaknya 50% PDB global bergantung pada alam dan memperingatkan bahwa perdagangan global akan menjadi tidak stabil secara signifikan akibat dampak perubahan iklim. Tiga sektor terbesar yang sangat bergantung pada alam (konstruksi, pertanian, serta makanan dan minuman) menghasilkan hampir USD8 triliun nilai tambah bruto (GVA) per tahun – jumlah yang hampir dua kali lipat besarnya perekonomian Jerman. Karenanya, hilangnya sumber daya alam dapat menurunkan produktivitas dan ketahanan dunia usaha yang bergantung pada ekosistem ini, sehingga berdampak pada lembaga keuangan yang mendukung ekosistem tersebut – misalnya, menyebabkan bank mengalami kredit macet dan aset yang terbengkalai, serta kerugian di seluruh rantai pasokan global mulai dari petani hingga konsumen.

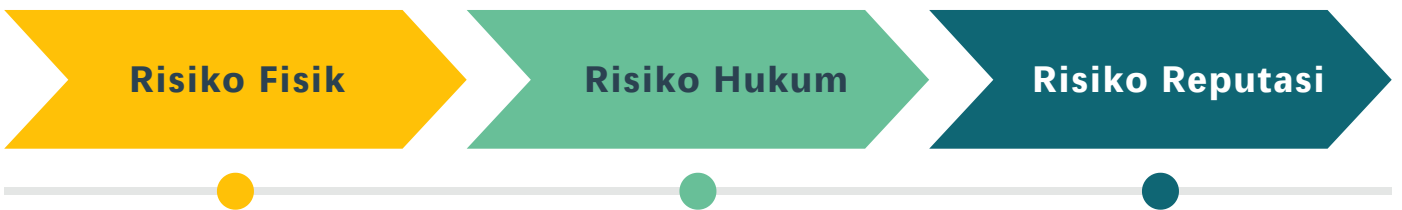
#### Risiko Hukum



Meningkatnya tekanan peraturan dan perundang-undangan terhadap perusahaan dan lembaga keuangan untuk mencegah deforestasi menghadirkan risiko ketidakpatuhan, terutama jika perusahaan tidak siap menghadapi perubahan tersebut, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan sanksi finansial atau hukuman pidana di pasar tempat mereka beroperasi.



Dampak besar terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dari konversi lahan menimbulkan risiko bagi perusahaan dari pemberitaan yang merugikan dan mengakibatkan potensi penurunan permintaan pelanggan dan kerugian nilai saham jika terungkap bahwa mereka secara langsung atau tidak langsung mendanai konversi lahan - diperburuk jika mereka terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks ini. Ketika negara berkembang menjadi semakin sadar akan isu lingkungan hidup dan para nasabah memilih secara langsung, bank nasional yang lebih kecil di yurisdiksi ini menghadapi risiko kehilangan nasabah yang sama besarnya dengan bank internasional yang lebih besar, jika mereka dipandang sebagai kontributor bersih terhadap perubahan iklim dan degradasi lingkungan di negaranya sendiri atau berkontribusi terhadap hal tersebut secara regional.



Selain itu, meskipun, sebagaimana telah disebutkan, 84% negara mencatat adanya konvergensi antara kejahatan lingkungan hidup (yang mencakup deforestasi ilegal) dan kejahatan berat lainnya, risiko predicate crime dan pencucian uang yang ditimbulkan oleh konversi lahan legal juga cukup besar (seperti diuraikan dalam Bab 4).

### 3.2 Bagaimana risiko-risiko ini terjadi?

Risiko terhadap lembaga keuangan akibat eksposur konversi lahan sebagian besar dapat terjadi:





## 3.2.1 Risiko aktivitas bisnis

Lembaga keuangan dapat terkena risiko terkait konversi lahan secara langsung atau tidak langsung:



**Terpapar langsung** - Melalui pembiayaan (Contoh: Utang atau ekuitas) – atau penyediaan jasa keuangan kepada – perusahaan yang sangat terekspos terhadap risiko konversi lahan.



**Terpapar tidak langsung** - Melalui rantai investasi seperti investasi ekuitas pada bank yang memberi pinjaman – atau investasi pada dana dengan kepemilikan saham terekspos – kepada entitas yang memiliki risiko konversi lahan.

Beberapa jasa keuangan yang paling terekspos meliputi:

**Pembiayaan perdagangan** – Meskipun sebagian perdagangan komoditas dibiayai sendiri, sebagian besar melibatkan pembiayaan perdagangan dari lembaga keuangan, sehingga bank terkena risiko konversi lahan yang terkait dengan komoditas yang diperdagangkan tersebut. Pembiayaan perdagangan melibatkan bank yang bertindak sebagai perantara pihak ketiga untuk mengambil risiko terkait pembayaran dan penyediaan barang antara dua pihak lainnya; misalnya, dengan memberi piutang atau pembayaran kepada eksportir atau memberi kredit kepada importir untuk memenuhi pesanan perdagangan. Hal ini biasanya digunakan untuk melakukan pergerakan komoditas yang mendorong konversi lahan, seperti daging sapi dan kedelai, sehingga membuat perusahaan terkena risiko dan aktivitas ini. Risiko utama bagi bank yang membiayai pengangkutan komoditas yang berisiko terhadap hutan adalah ketergantungan yang terus-menerus pada dokumentasi kertas, seperti surat pengapalan (bill of lading) – dokumen hukum penting yang dikeluarkan oleh pengangkut kepada pengirim yang memerinci jumlah, jenis, dan tujuan barang dalam perjalanan – yang terkadang ditulis tangan dan rentan terhadap pengubahan yang dapat mengaburkan risiko konversi lahan dari komoditas tersebut (misalnya, perubahan daerah asal).

**Pinjaman bank komersial** – Risiko perbankan komersial muncul terutama melalui pemberian pinjaman tetap dan modal kerja atau rangkaian kredit kepada perusahaan yang terkena risiko konversi lahan.

**Perbankan investasi** – Risiko perbankan investasi berasal dari nasabah perbankan yang dapat secara langsung atau tidak langsung terkena konversi lahan. Data menunjukkan bahwa sebesar USD128 miliar diberikan untuk kredit dan penjaminan proyek komoditas terkait deforestasi antara tahun 2016 dan 2020. Bank investasi dapat terkena risiko reputasi karena tidak melakukan uji tuntas yang memadai terhadap aktivitas dan potensi dampak hak asasi manusia terhadap klien mereka sepanjang hal ini mungkin terkait dengan konversi lahan (misalnya, pengembangan operasi penambangan yang terbatas atau di dalam hutan, pemerolehan izin usaha pertambangan, atau pengembangan pertanian baru seperti perkebunan di lahan yang dibuka dengan merusak hutan).

**Perbankan koresponden** – Dalam perbankan koresponden, lembaga keuangan internasional yang lebih besar (bank koresponden) memberi layanan kepada lembaga yang lebih kecil, sering kali lebih lokal (bank responden) yang tidak dapat memberi layanan atau akses ke mata uang tertentu atas nama kliennya. Dengan cara ini, bank koresponden bertindak sebagai perantara atau agen - misalnya dengan memfasilitasi transfer uang, melakukan transaksi bisnis, menerima setoran, atau mengumpulkan dokumen atas nama bank responden. Melalui aktivitas ini, perusahaan besar terekspose kepada aktivitas bisnis dan risiko dari bank kecil tempat mereka menyediakan layanan perbankan koresponden. Hal ini mungkin terjadi di yurisdiksi yang berisiko tinggi untuk melakukan konversi lahan, di wilayah dengan peraturan yang lebih sedikit, dan/atau memiliki kontrol, pemeriksaan, atau sumber daya yang lebih sedikit untuk melakukan uji tuntas sendiri. Kurangnya pengawasan ini dapat menyebabkan dana mengalir melalui jaringan bank yang lebih besar, sehingga berpotensi membiayai proyek atau perusahaan yang terlibat dalam konversi lahan. Hubungan perbankan koresponden yang relatif tidak jelas – bank yang lebih besar tidak selalu dapat melihat ‘klien akhir’ itu sendiri – dan rendahnya kemampuan penelusuran dana berarti bahwa sektor ini rentan terhadap eksploitasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tidak sah, termasuk mereka yang terkait dengan konversi lahan.



## FOKUS:

# PERBANKAN KORESPONDEN: PANDANGAN DARI PESERTA DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS

Peserta diskusi kelompok terarah yang menjadi konsultan proyek ini membahas kesulitan dalam memanfaatkan bank responden; terutama dengan meyakinkan bank responden yang sudah mengetahui faktor-faktor risiko lain untuk menerapkan standar tambahan terkait konversi lahan. Para peserta mencatat bahwa hal ini mungkin pertama-tama memerlukan seperangkat standar yang konsisten dan disetujui terkait dengan konversi lahan di dalam perusahaan mereka sendiri (dalam peran mereka sebagai bank koresponden) - sesuatu yang, pada gilirannya, memerlukan tekanan yang lebih jelas dan terbuka dari FIU.



*Poin tindakan untuk lembaga keuangan: Mengingat rekomendasi Wolfsberg Group untuk melengkapi Kuesioner Uji Tuntas Perbankan Koresponden (CBDDQ) dengan pertanyaan terkait area tambahan yang terkena risiko, integrasikan penyelidikan seputar standar dan pengendalian konversi lahan sebagai bagian dari proses kuesioner perbankan koresponden.*



# FOKUS: PERBANKAN KORESPONDEN: PANDANGAN SATGAS TINDAKAN KEUANGAN (FATF)

Dalam laporan 'Pencucian Uang dari Kejahatan Lingkungan', FATF menyatakan bahwa:

Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam dapat menghadapi tantangan saat mengakses pasar keuangan global.

Akibatnya, mereka bergantung pada hubungan perbankan koresponden.

Usaha kecil dan menengah (UKM) semakin tidak sesuai dengan selera risiko bank, sehingga mereka harus menggunakan bank koresponden untuk mengakses sistem keuangan global.

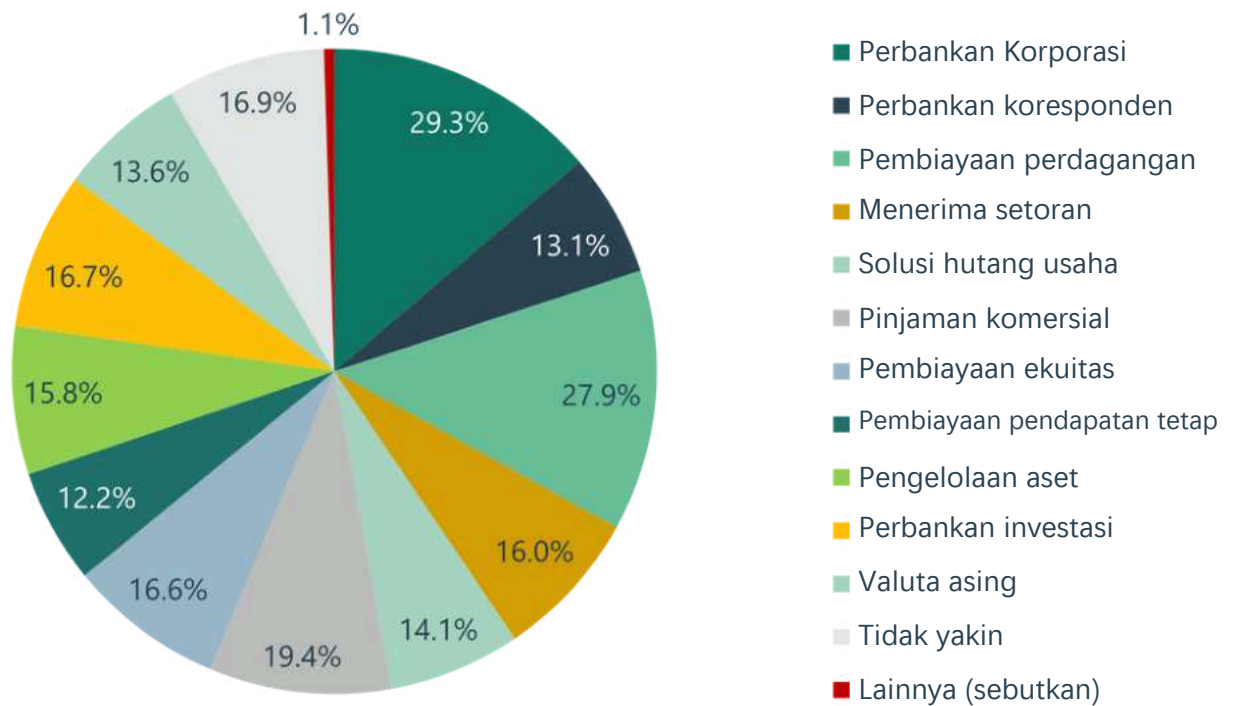
Namun, banyak pelaku besar dalam kegiatan usaha konversi lahan seperti kehutanan dan pertambangan memiliki hubungan langsung dengan bank nasional dan internasional sehingga tidak memerlukan hubungan perbankan koresponden.

Oleh karena itu, perbankan koresponden menjadi aktivitas yang berisiko lebih tinggi sehubungan dengan konversi lahan ilegal (atau konversi lahan legal yang menyatu dengan aktivitas ilegal atau kejahatan keuangan lainnya), karena perbankan koresponden terutama dimanfaatkan oleh UKM, yang dianggap terlalu berisiko oleh bank besar yang mempunyai kontrol anti-kejahatan keuangan dan selera risiko yang lebih maju.

Pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari konversi lahan ilegal atau aktivitas terkait dapat menggunakan layanan perbankan koresponden untuk melakukan aktivitas 'nest', yang menciptakan lapisan tambahan di antara pihak yang memulai (Contoh: mereka yang melakukan konversi lahan ilegal atau aktivitas terkait) dan mengaburkan penerima manfaatnya, sehingga mengurangi risiko teridentifikasinya transaksi yang terkait dengan kejahatan ini.

**GAMBAR 1: Grafik yang menunjukkan penilaian responden survei terhadap aktivitas bisnis lembaga keuangan mereka yang paling rentan terhadap konversi lahan\***

Bidang mana dalam organisasi Anda yang menurut Anda paling rentan terhadap potensi aktivitas kejahatan finansial terkait dengan deforestasi dan jenis konversi lahan lainnya? Pilih semua yang sesuai:



\*Berdasarkan data yang dikumpulkan sebagai bagian dari survei sikap yang dirancang khusus untuk proyek ini, yang ditanggapi oleh 644 profesional di sektor keuangan dari negara-negara berikut: Argentina, Belgia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Kolombia, Britania Raya, Prancis, AS, Hong Kong SAR, Indonesia, Malaysia, Belanda, Nigeria, Singapura, Uni Emirat Arab, dan Vietnam.

© Aine / Themis

### 3.2.2 Risiko komoditas

Jasa dan produk keuangan terutama terkait dengan konversi lahan melalui pembiayaan komoditas produksi. Oleh karena itu, fokus khusus harus diterapkan pada produk-produk berisiko tinggi yang terkait. Secara global, lebih dari 90% hilangnya hutan diperkirakan disebabkan oleh konversi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian, menurut [citra satelit](#) dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO).

Komoditas utama yang mendorong konversi lahan di seluruh dunia adalah hewan ternak, kedelai, kelapa sawit, kayu, kopi, kakao, karet, mineral, minyak, dan gas. Tingkat risiko setiap komoditas bergantung pada daerah asalnya. Misalnya, [penelitian](#) menunjukkan bahwa di Asia Tenggara, karet, kertas dan bubur kayu, serta minyak sawit merupakan komoditas yang paling mendorong konversi lahan; di Amerika Selatan, kedelai dan sapi; dan di Afrika, kakao, kopi, dan kayu.

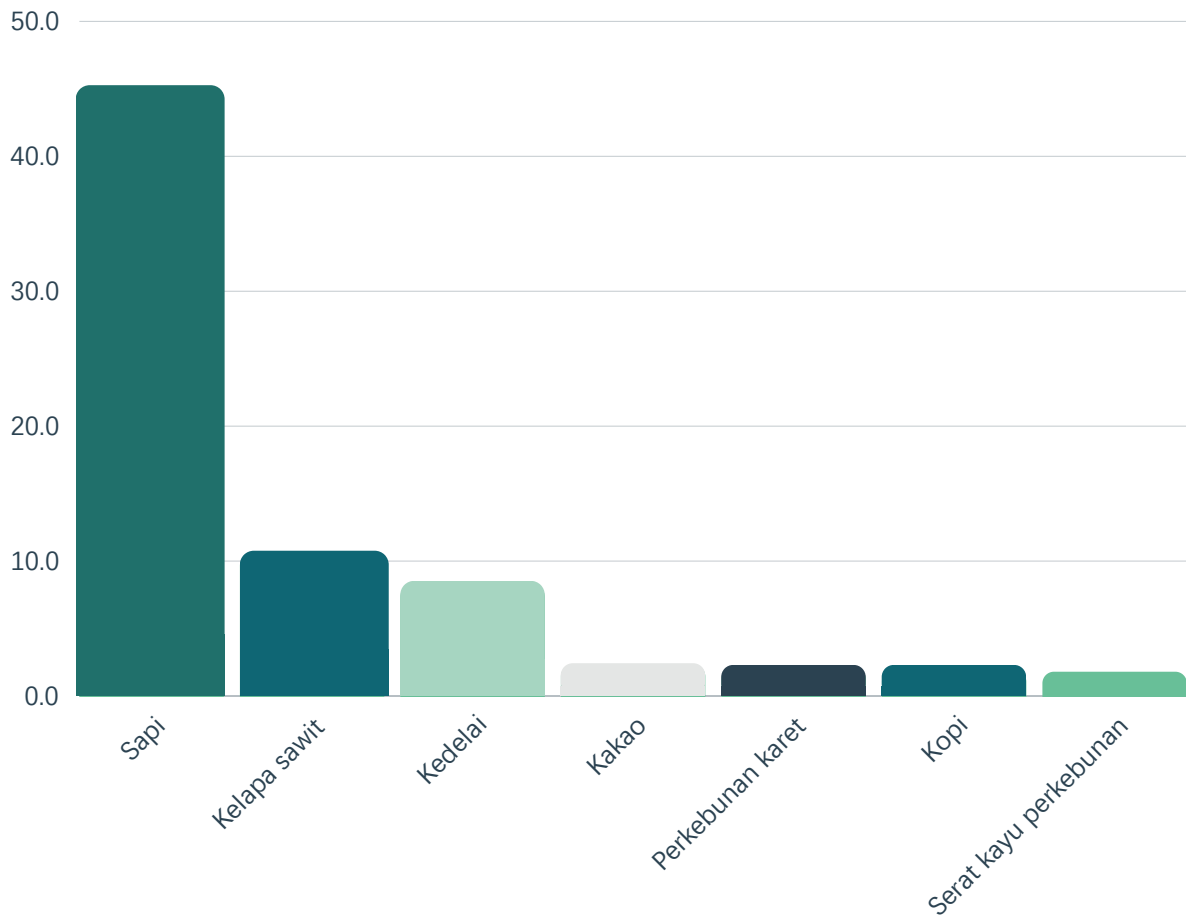
Pembiayaan ratusan miliar dolar untuk produksi dalam rantai komoditas berikut mencakup pinjaman langsung, pembiayaan perdagangan, utang pasar primer, dan penerbitan ekuitas.



## Komoditas Lunak

**GAMBAR 2: Risiko komoditas Lunak**

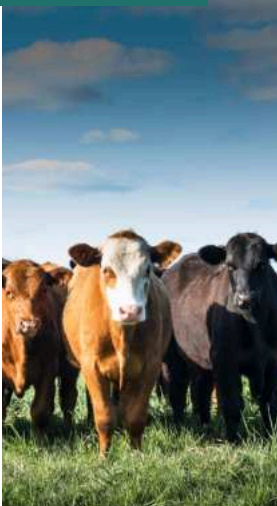
Komoditas lunak berisiko tinggi: kontribusi terhadap hilangnya hutan global dari tahun 2001-2015 dalam jutaan hektar



Grafik berdasarkan data dari *Global Forest Review* yang dikeluarkan oleh *World Resources Institute*

© Aine / Themis

### Ternak



Penggembalaan sapi merupakan penyebab utama konversi lahan, termasuk deforestasi, khususnya di Brasil (yang menyebabkan hilangnya 72% hutan di negara tersebut). Bahkan, antara tahun 2001 dan 2015, alih fungsi hutan menjadi padang rumput ternak di seluruh dunia lima kali lebih tinggi daripada komoditas lainnya. Brasil menyumbang 48% dari jumlah tersebut, diikuti oleh Paraguay (9%), dan Kolombia (5%). Secara global, sekitar 40% deforestasi disebabkan oleh penggembalaan hewan ternak (dan angka ini tidak memperhitungkan tambahan lahan yang dikonversi menjadi perkebunan kedelai yang didorong oleh permintaan pakan ternak berbahan dasar kedelai).

#### Produk berisiko tinggi:

- Daging Sapi
  - segar;
  - beku;
  - diproses, termasuk dalam makanan siap saji;
- Kulit mentah dan proses;
- Produk kulit jadi - untuk digunakan pada mobil, furnitur, atau barang mode.

© mKensa Via Canva.com

## Minyak kelapa sawit



© yusnuzam Via Canva.com

Kelapa sawit merupakan tanaman yang populer karena umur ekonomisnya yang mencapai 25-30 tahun, kebutuhan tenaga kerja yang relatif rendah, dan kemampuan menghasilkan pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan dengan tanaman pangan subsisten. Pembukaan lahan untuk membuka lahan perkebunan, termasuk penanaman tanaman pangan dan pendirian pabrik pengolahan di lokasi (tandan buah sawit harus diproses dalam waktu 24 jam setelah panen untuk menjaga kualitas minyak) - dan hal ini paling banyak terjadi di Tenggara Asia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa setengah dari perkebunan kelapa sawit baru di Indonesia dan Malaysia menggantikan hutan dan bahwa deforestasi ini sebagian besar didorong oleh pasar – karena puncak kehilangan hutan tahunan untuk tujuan ini sama dengan puncak harga minyak kelapa sawit (diimbangi dengan ketinggian satu tahun)

### Produk berisiko tinggi:

- Minyak kelapa sawit – untuk digunakan dalam:
    - makanan olahan, produk roti dan penganan;
    - biofuel;
  - Minyak inti sawit – untuk digunakan dalam industri oleokimia untuk pembuatan:
    - sabun;
    - deterjen;
    - kosmetik;
    - keperluan industri;
- Bungkil inti sawit – untuk digunakan dalam
- pakan ternak;
  - produksi listrik.

## Kopi



© amenic181 Via Canva.com

Hilangnya hutan dan konversi lahan akibat produksi kopi terutama terjadi di Indonesia, Brasil, Madagaskar, Peru, Kolombia, dan Vietnam. Tanaman kopi menjadi kurang produktif seiring bertambahnya usia, menghasilkan lebih sedikit buah (yang benihnya disebut 'biji'), yang kemudian mendorong petani untuk mengonversi lebih banyak lahan untuk menanam pohon baru.

### Produk berisiko tinggi:

- Kopi.

## Kakao



© narong27 Via Canva.com

Meskipun kakao diproduksi di 62 negara di dunia, mayoritas (65%) berasal dari Afrika, diikuti oleh Indonesia (17%). Penelitian menunjukkan bahwa penanaman kakao merupakan penyebab utama hilangnya lebih dari 37% hutan di kawasan lindung di Pantai Gading dan hingga 40% di Ghana. Deforestasi yang disebabkan oleh kakao di Afrika Barat semakin parah karena aktivitas pertanian yang terkait dengannya merusak tanah, sehingga para petani mungkin memperluas lahan mereka ke wilayah baru, mengubah lahan baru dengan harapan mendapatkan produktivitas dan hasil panen yang lebih besar.

### Produk berisiko tinggi:

- Cairan/liquor atau pasta kakao – untuk digunakan dalam cokelat;
- Mentega kakao atau bubuk kakao – untuk digunakan dalam cokelat dan makanan yang dipanggang atau penganan;
- Bubur kakao - untuk digunakan dalam minuman ringan, alkohol, dan pektin;
- Kulit buah kakao dan kulit biji kakao (lebih jarang) - digunakan untuk membuat tepung kakao yang digunakan untuk pakan ternak.



## Kedelai



Hampir seluruh (sekitar 97%) lahan yang dikonversi untuk produksi kedelai berada di Amerika Selatan (terutama di Brasil, Argentina, Bolivia, dan Paraguay). Saat ini, produksi global meningkat 13 kali lipat dibandingkan awal tahun 1960an dan meningkat dua kali lipat sejak tahun 2000, saat ini mencapai sekitar 350 juta ton per tahun. Sekitar 77% dari produksi ini digunakan sebagai pakan ternak, unggas, babi, dan budidaya perikanan. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketika produksi kedelai meluas ke bekas padang rumput, hal ini mendorong padang rumput tersebut semakin jauh ke dalam lahan hutan, sehingga memperluas batas wilayah. Hal ini berarti bahwa beberapa kawasan hutan yang telah digantikan oleh padang rumput penggembalaan sapi mungkin tidak disebabkan oleh peningkatan permintaan langsung akan daging sapi atau produk susu, melainkan disebabkan oleh perpindahan yang disebabkan oleh produksi tanaman kedelai (walaupun, dalam hubungan timbal balik, perluasan kedelai juga disebabkan oleh permintaan pakan ternak).

### Produk berisiko tinggi:

- Bungkil kedelai untuk pakan ternak - dan juga produk dari ternak yang mungkin diberi pakan bungkil kedelai, termasuk unggas, telur, susu, daging sapi, dan babi;
- Minyak kedelai - sebagai minyak nabati dan bahan makanan olahan, kosmetik, produk industri, dan biodiesel;
- Kedelai untuk konsumsi langsung - kecap, tempe, tahu, tepung kedelai, susu kedelai, protein nabati bertekstur, dan edamame;
- Lesitin kedelai - digunakan antara lain sebagai zat pengemulsi pada produk makanan panggang dan krim kopi, juga pada kosmetik, tekstil, cat, pelapis, dan lilin.

© naito8 Via Canva.com

## Karet



Karet alam (bukan yang diproduksi secara sintetis dari produk sampingan minyak bumi) berasal dari pohon karet, yang kini sebagian besar ditanam di Asia Tenggara, yang menyumbang lebih dari 90% produksi global (walaupun tanaman asli Brasil dan Guyana, pohon karet Amerika Selatan sering kali menderita penyakit hawar daun akibat jamur). Sisanya berasal dari Amerika Selatan dan Tengah serta Afrika Tengah.

### Produk berisiko tinggi:

- Bola karet, peralatan medis, sarung tangan lateks, balon, sepatu bot, ban (yang cenderung merupakan campuran karet sintetis dan alam);
- Sebagai komponen dalam aplikasi industri dan teknik.

© nattanan\_zia Via Canva.com

## Kayu

Sektor perkayuan mencakup pohon-pohon yang ditebang untuk menghasilkan, antara lain, kayu gergajian, kayu lapis, papan partikel, furnitur, kayu bakar, bubur kayu, dan kertas. Hutan yang ada dapat ditebangi untuk dijadikan perkebunan monokultur, atau pohon dapat ditebang dan dijual untuk diambil kayunya dan produk terkaitnya (seperti pelet kayu, yang berasal dari hutan di Afrika Barat dan digunakan untuk memanaskan boiler rendah karbon di rumah-rumah di seluruh Eropa). Secara global, selama beberapa dekade terakhir telah terjadi pergeseran sektor ini dari penebangan kayu dari hutan alam menuju pembukaan lahan untuk tujuan budidaya perkebunan monokultur. Meskipun konsumsi kertas di Amerika Utara dan Eropa telah menurun sejak awal tahun 1990an, seiring dengan meningkatnya komunikasi digital, permintaan di pasar Asia terus meningkat.

### Produk berisiko tinggi:

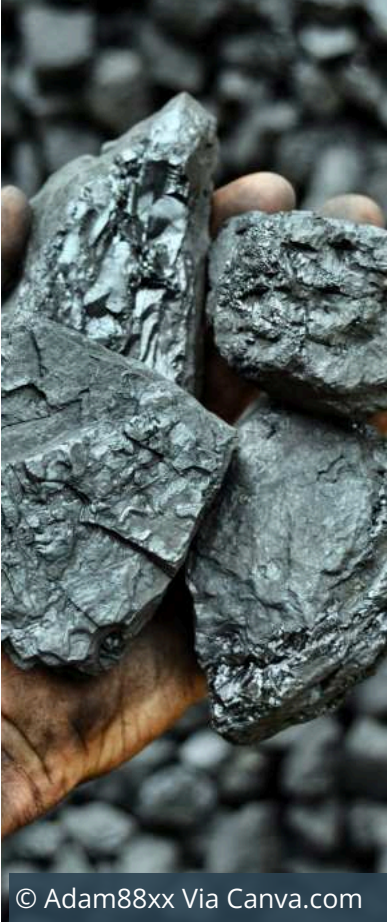
- Bahan bangunan;
  - Untuk lantai, seperti kayu solid, balok laminasi atau parket - kusen jendela, pintu dan kusen pintu, skirting, decking, bangunan taman, tiang telepon, pagar, pembuatan perahu, bantalan rel kereta api, dan gagang perkakas;
  - Untuk furnitur - kayu lunak (misalnya pinus), furnitur paket datar kayu lapis atau laminasi, dan kayu keras mewah;
- Sebagai komponen dalam proses industri - sering kali sebagai pelet kayu, misalnya untuk pembangkit listrik;
- Dalam pengolahan makanan - misalnya untuk produk yang diasap;
- Kertas - digunakan untuk majalah, buku, alat tulis, kertas kantor, kardus, kemasan, tisu, label, tisu basah;
- Sebagai bahan bakar.





## Komoditas Keras

### Mineral



© Adam88xx Via Canva.com

Di beberapa wilayah, seperti Suriname dan Guyana, komoditas keras seperti mineral telah melampaui komoditas lunak seperti sapi dan pertanian sebagai penyebab utama deforestasi (bahkan, pertambangan saat ini dianggap sebagai penyebab deforestasi terbesar keempat di dunia). Hal ini merupakan tren yang dipercepat: lebih dari 35% deforestasi hutan tropis akibat pertambangan selama dua dekade terakhir terjadi dalam lima tahun terakhir.

Aktivitas penambangan merupakan penyebab utama hilangnya hutan, karena pembukaan lahan tidak hanya untuk lubang galian tetapi juga untuk infrastruktur terkait, termasuk jalan akses dan pemukiman pekerja. Hal ini semakin berdampak dan melanggar batas kawasan lindung; di Brasil, misalnya, ada 219 kawasan lindung yang tumpang tindih dengan klaim pertambangan. Negara-negara lain, termasuk Indonesia, Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Australia, Ghana, dan Myanmar, juga menunjukkan tren penurunan dan pengurangan kawasan hutan lindung untuk memungkinkan aktivitas pertambangan.

Mineral yang terkait dengan konversi lahan terutama adalah emas, batu bara, bauksit, bijih besi, dan tembaga. Mineral yang dibutuhkan untuk teknologi 'hijau' atau 'energi bersih' seperti mobil listrik juga berkontribusi terhadap pembukaan lahan. Meskipun terjadi peningkatan permintaan terhadap mineral energi ramah lingkungan, namun 71% deforestasi global akibat pertambangan langsung masih disebabkan oleh dua komoditas mineral saja: batu bara dan emas.

### Produk berisiko tinggi:

- Emas - ditemukan dalam perhiasan, prosesor, dan konektor pada barang elektronik seperti komputer, tablet, televisi, printer, konsol game, modem, dan ponsel pintar;
- Batu bara;
- Bauksit - digunakan dalam produksi aluminium dan pembuatan produk industri lainnya seperti bahan abrasif, semen, dan bahan kimia;
- Bijih besi - sebagian besar digunakan untuk memproduksi baja yang ditemukan di oven, mesin cuci, lemari es, mesin pencuci piring, pesawat terbang, kereta api, kapal laut, truk dan mobil, dan sebagai komponen dalam produksi pakan ternak dan pupuk;
- Tembaga - digunakan pada generator listrik, kabel listrik di rumah, peralatan dan mobil, pada atap, pipa ledeng, dan mesin industri;
- Cobalt – digunakan pada baterai litium, kantung udara untuk mobil, dan magnet;
- Nikel – digunakan untuk memproduksi baja tahan karat, serta nikel sulfat – bahan utama dalam pembuatan baterai untuk kendaraan listrik;
- Unsur tanah jarang - digunakan dalam turbin angin, televisi, magnet, dan sinar-X.



# MINERAL ENERGI BERSIH: MENDORONG EKONOMI HIJAU DAN DEFORESTASI?



**Tembaga** adalah mineral utama yang digunakan dalam sistem energi terbarukan di seluruh dunia untuk menghasilkan listrik dari sumber energi 'bersih' seperti energi matahari, air, termal, dan angin, serta membantu dunia beralih dari bahan bakar fosil. Dalam pertambangan berskala besar, tembaga seringkali ditambang bersamaan dengan emas, sehingga sulit untuk menghubungkan deforestasi dengan komoditas apa pun. Namun, dengan indikasi bahwa penambangan tembaga saat ini tidak cukup untuk memenuhi persyaratan transisi ke sumber energi rendah karbon, meningkatnya permintaan dan harga juga memberi insentif kepada penambang ilegal. Memang benar, penambangan tembaga ilegal telah meningkat di Amazon karena para penambang emas ilegal mendiversifikasi sumber pendapatan mereka dan di seluruh wilayah Copperbelt di Zambia, tempat keterlibatan kelompok kejahatan terorganisasi merupakan hal yang biasa.

**Kobalt**, komponen penting dalam baterai, berkontribusi dalam mengawali pembukaan lahan di Afrika Sub-Sahara. Meskipun sulit untuk menghitung berapa banyak deforestasi di Lembah Kongo yang secara langsung disebabkan oleh penambangan kobalt, karena kekayaan sumber daya di wilayah tersebut telah menyebabkan hilangnya hutan karena banyaknya kegiatan ekstraksi yang tumpang tindih, diperkirakan jutaan pohon telah ditebang selama bertahun-tahun tujuan ini. Republik Demokratik Kongo memiliki setengah cadangan kobalt dunia (empat juta ton, pada tahun 2022), dan saat ini menyumbang sekitar 70% produksi global. Tingginya insiden pekerja paksa dan pekerja anak di negara ini terkait dengan penambangan mineral penting ini telah menyebabkan para komentator menciptakan istilah 'blood cobalt' (kobalt darah).

**Unsur tanah jarang** – 17 unsur logam langka yang digunakan sebagai magnet pada turbin angin dan kendaraan listrik – memerlukan pembukaan lahan untuk penambangan di Tiongkok, Thailand, Myanmar, Brasil, AS, Rusia, Madagaskar, India, Australia, Vietnam, dan Burundi, dan telah dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia di banyak yurisdiksi ini. Misalnya, investigasi selama enam bulan yang dilakukan oleh Global Witness terhadap citra satelit dan wawancara dengan komunitas lokal mengungkapkan bahwa jumlah tambang tanah jarang di negara bagian Kachin, Myanmar, telah meningkat dari hanya segelintir pada tahun 2016 menjadi lebih dari 2.700 yang mencakup hampir 300 lokasi terpisah pada bulan Maret 2022, dengan luas perbukitan berhutan yang terkena dampak setara dengan luas Singapura. Ekspansi dramatis ini, yang juga mendanai kelompok-kelompok yang terkait dengan junta militer, dilaporkan didorong oleh pengalihan industri pertambangan tanah jarang ke Myanmar oleh Tiongkok.

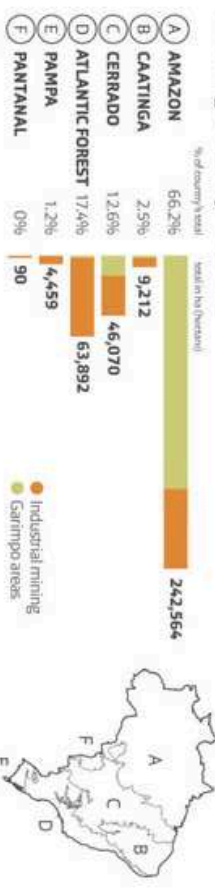
**Nikel**, yang digunakan dalam baterai litium-ion pada kendaraan listrik, juga menyebabkan deforestasi di seluruh Indonesia sehingga membuka jalan bagi penambangan terbuka laterit kualitas rendah (yang merupakan sumber ekstraksi nikel). Meskipun nikel laterit cenderung ditemukan dekat dengan permukaan bumi, nikel ini umumnya tersebar di wilayah yang luas, sehingga pertambangan biasanya memerlukan pembukaan lahan yang luas. Menurut investigasi Pulitzer Center pada tahun 2022, Sulawesi, sebuah pulau di Indonesia, telah kehilangan lebih dari setengah juta hektar hutan sejak tahun 2011; menurut GlobalData, pada tahun 2022, 127 dari 186 tambang nikel dunia berlokasi di negara tersebut.



GAMBAR 3: PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI BRASIL TERKAIT DENGAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN AREA, BIOMA, DAN MINERAL

# Mining in Brazil 1985-2021

## Mining area by biome



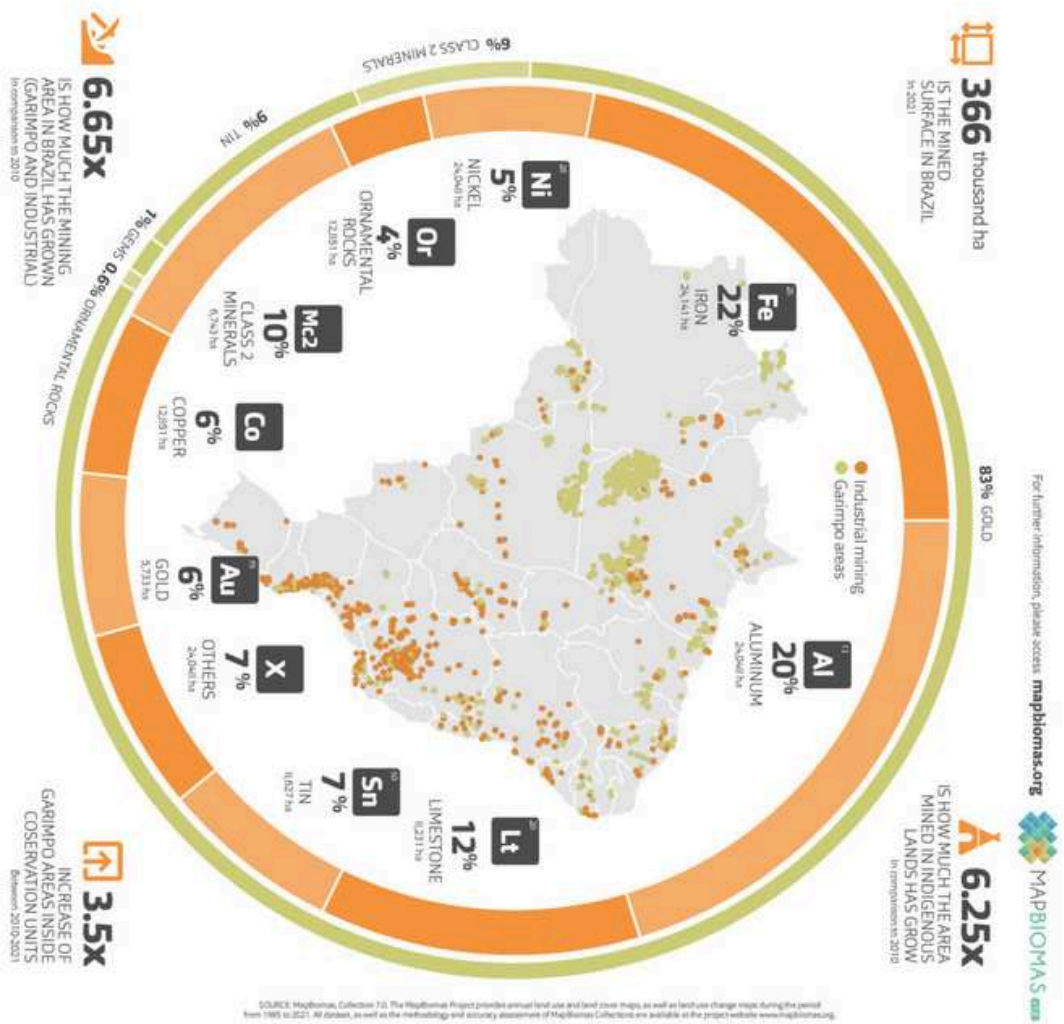
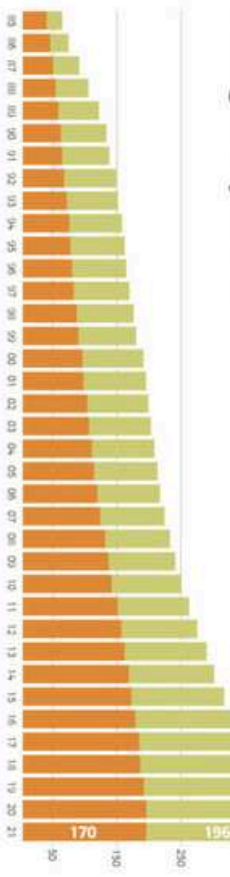
## Ranking by states



## Ranking by municipalities



## Mining history in Brazil thousand ha



Sumber: [MapBiomas](http://MapBiomas.org)

## Minyak dan Gas



© Kanoke\_46 Via Canva.com

Amazon bagian barat (Kolombia, Ekuador, Peru, dan Brasil) menjadi sasaran peningkatan aktivitas eksplorasi minyak dan gas alam (memang, lebih dari 70% Amazon Peru, yang mencakup berbagai wilayah Adat dan kawasan konservasi, kini berada di bawah konsesi tersebut). Analisis juga mengungkapkan bahwa lebih dari sepertiga Lembah Kongo di Afrika tumpang tindih dengan wilayah eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang sudah ada atau yang direncanakan. Lembah Kongo adalah rumah bagi hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia, yang terdiri dari hutan lahan gambut rawa yang membentang di enam negara (Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, dan Gabon) dan berperan sebagai penyerap karbon yang sangat penting yang menyimpan sekitar 29 miliar ton karbon – setara dengan emisi bahan bakar fosil global selama tiga tahun. Lahan gambut ini terancam pembukaan lahan untuk kepentingan eksplorasi minyak, dan Republik Demokratik Kongo melelang hak eksplorasi minyak di kawasan hutan dan kawasan lindung yang luas, seperti Taman Nasional Virunga di bagian timur negara tersebut, yang merupakan rumah bagi spesies yang terancam punah seperti gorila dataran rendah.

### Produk berisiko tinggi:

- Gas alam;
- Minyak;
  - Minyak bumi;
  - Barang-barang yang terbuat dari produk sampingan minyak bumi, termasuk farmasetika, komponen kendaraan (misalnya ban karet sintetis, minyak rem, dan gemuk bantalan), barang elektronik, produk plastik, dan cat.



© sykono Via Canva.com



© tab1962 Via Canva.com



## STUDI KASUS:

# MENARIK PELAJARAN DARI PROSES KIMBERLEY UNTUK MENGATASI RISIKO KOMODITAS BANK

Ketika merancang dan melaksanakan inisiatif untuk membantu lembaga keuangan mengatasi konversi lahan secara global dengan lebih baik, ada baiknya kita melihat model-model sebelumnya yang digunakan di seluruh sektor untuk memerangi kejahatan lingkungan lainnya yang memiliki komponen predicate crime. Pembiayaan dan perdagangan berlian konflik adalah salah satu contohnya, dan merupakan sebuah lensa untuk mempelajari pencapaian dan tantangannya.

Dengan latar belakang serangkaian perang saudara dan konflik kekerasan lainnya di negara-negara seperti Sierra Leone dan Zimbabwe pada awal tahun 2000an, perhatian internasional tertuju pada apa yang disebut "berlian berdarah" – berlian yang diperoleh secara ilegal atau terlarang melalui praktik kerja paksa dan kekerasan. Sebagai tanggapannya, para pemimpin kebijakan dan industri berlian bersatu pada tahun 2003 untuk membentuk rezim perdagangan multilateral yang disebut Kimberley Process. Proses tersebut, yang dipuji sebagai langkah besar untuk mengakhiri konflik yang dipicu oleh berlian, saat ini melibatkan 59 peserta yang mewakili 85 negara (UE dihitung sebagai satu peserta). Inti dari rezim ini adalah Skema Sertifikasi Proses Kimberley (KPCS), yang digunakan oleh negara-negara anggota menerapkan perlindungan terhadap pengiriman berlian mentah untuk menyertifikasinya sebagai "bebas konflik".

Kimberley Process menunjukkan nilai kolaborasi multilateral, dengan inisiatif yang mempertemukan pemerintah, masyarakat sipil, dan mitra industri. Keterlibatan aktif diperlukan, dengan anggota yang berpartisipasi dan pemangku kepentingan lainnya bertemu dua kali setahun untuk membahas kemajuan dan permasalahan yang sedang berlangsung terkait dengan perdagangan ilegal berlian. Kepatuhan dan implementasi juga dipantau untuk memastikan komitmen, termasuk melalui pertukaran data secara berkala, analisis statistik, dan laporan tahunan.

Bank memainkan peran penting dalam skema ini, memastikan kepatuhan sertifikasi berlian sebelum mereka secara langsung mendanai atau memberikan layanan keuangan lainnya kepada klien perdagangan berlian. Ketika nasabah bank mengimpor berlian mentah, bank tersebut dapat meminta salinan sertifikat Kimberley Process untuk memverifikasi bahwa berlian tersebut telah diteliti dan disetujui oleh otoritas impor dan ekspor terkait untuk memastikan asal usulnya yang bebas konflik.

Kimberley Process telah secara signifikan mengurangi penggunaan berlian konflik di pasar terbuka dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi berdasarkan perdagangan berlian yang legal. Ian Smillie, salah satu arsitek awal proses ini dan ahli dalam konflik berlian, memperkirakan bahwa hanya 5 hingga 10% berlian dunia yang diperdagangkan secara ilegal saat ini dibandingkan dengan 25% sebelum tahun 2003.

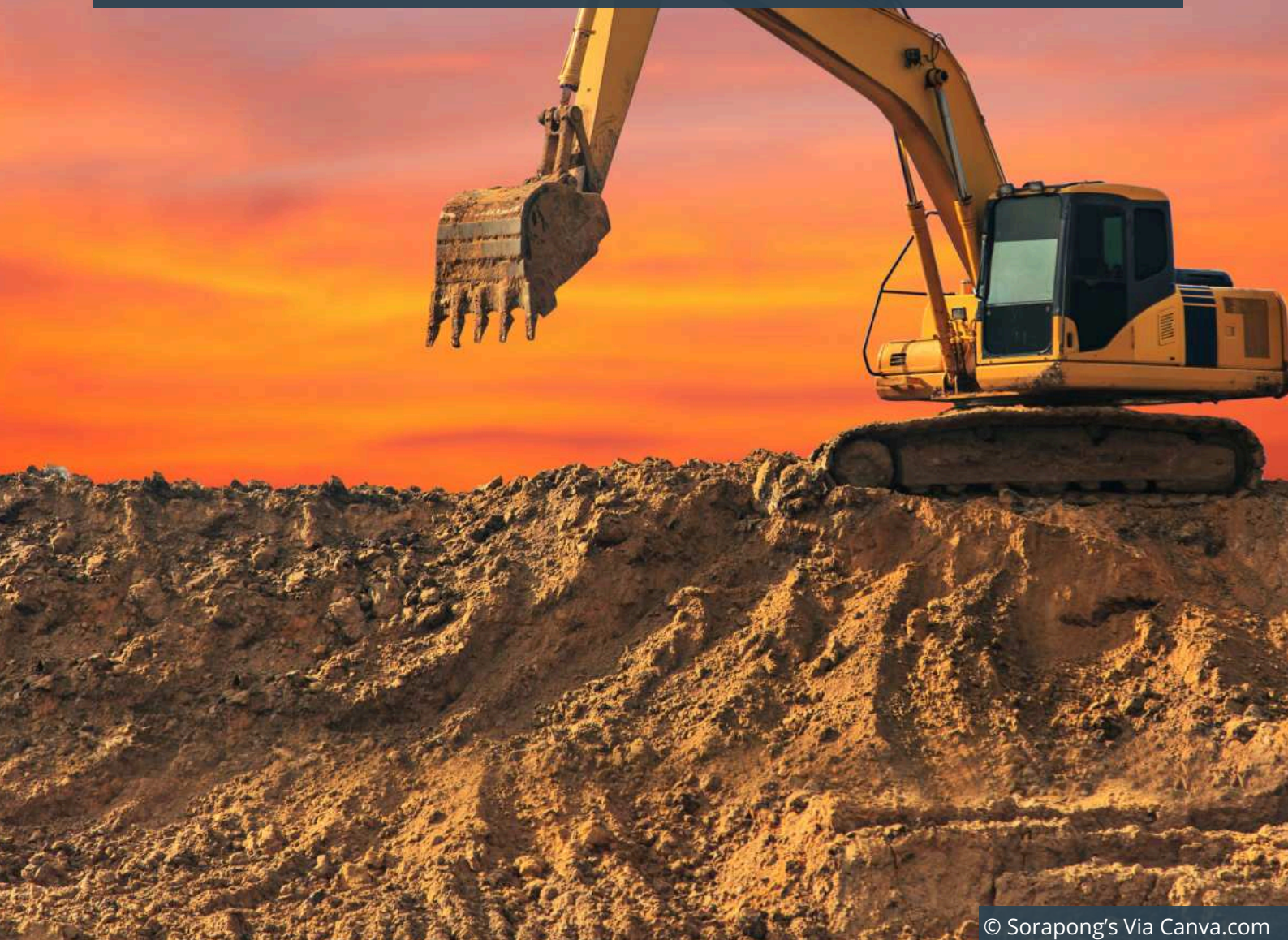
Namun penting untuk dicatat bahwa meskipun Kimberley Process berhasil, beberapa ahli percaya bahwa proses ini belum cukup berhasil dalam memberantas perdagangan berlian ilegal dan kejahatan keuangan terkait. Smillie, misalnya, berpendapat bahwa pembatasan tersebut didasarkan pada definisi konflik yang terlalu sempit dalam skema tersebut. Pakar lain telah menyatakan keprihatinan mereka atas kurangnya kepatuhan dari pemerintah yang berpartisipasi dan celah dalam proses yang terus memungkinkan berlian konflik berpindah ke tangan konsumen, termasuk meluasnya perdagangan gelap di wilayah sumbernya. Permasalahan ini menyoroti pentingnya definisi dan kerangka tata kelola yang kuat ketika merancang dan melaksanakan inisiatif multilateral.



# STUDI KASUS: EKSPOSUR KONVERSI LAHAN MELALUI PENYEDIAAN MESIN

Sebuah laporan investigasi oleh Greenpeace mengarah kepada tuduhan bahwa produsen mesin Korea Selatan HD Hyundai Construction Equipment (HD HCE) berkontribusi terhadap deforestasi di Amazon dengan menyediakan ekskavator kepada penambang emas ilegal yang beroperasi di wilayah Adat, di wilayah Brasil yang terdegradasi 202% lebih banyak antara tahun 2019 dan 2021 dibandingkan dekade sebelumnya.

Di tanah Adat Yanomami, Mundurucu, dan Kayapó, 75 ekskavator Hyundai teridentifikasi selama survei udara yang dilakukan antara tahun 2021 dan 2023. Aktivitas penambangan gelap telah menyebabkan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut; misalnya, sungai yang terkontaminasi telah menimbulkan risiko kesehatan bagi orang dewasa dan anak-anak Yanomami.



© Sorapong's Via Canva.com



### 3.2.3 Risiko rantai pasok

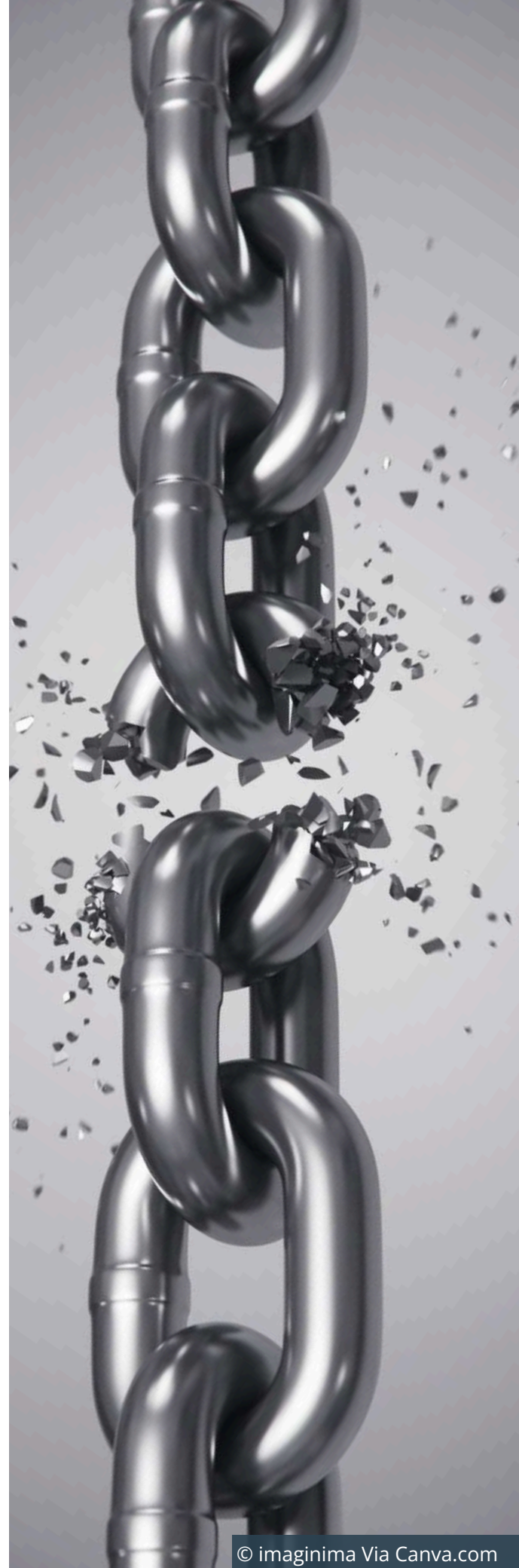
Eksposur lembaga keuangan terhadap komoditas berisiko tinggi dapat terjadi melalui titik kontak berikut dalam rantai nilai.

**Biaya modal:** Bahkan sebelum komoditas tersebut diproduksi (Contoh: ditanam, dipelihara, diekstraksi), perusahaan mungkin terkena risiko konversi lahan melalui pembiayaan aktivitas untuk membeli dan membuka lahan (seperti mesin dan peralatan) atau menciptakan infrastruktur yang diperlukan untuk mengaksesnya (misalnya jalan, landasan udara, pelabuhan, dan akomodasi sementara bagi mereka yang bekerja di lokasi). Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan pinjaman modal tetap atau kerja atau rangkaian kredit, investasi atau penggalangan dana untuk entitas yang melakukan aktivitas ini, atau pembiayaan perdagangan untuk ekspor dan impor mesin dan bahan konstruksi.

**Produksi:** Produksi komoditas mentah yang mendorong konversi lahan terjadi di lapangan, seperti penanaman atau pemanenan tanaman, ekstraksi logam dan mineral, atau peternakan sapi. Lembaga keuangan dapat berhadapan dengan risiko jika mereka berinvestasi atau memberi rangkaian kredit, pinjaman, atau asuransi kepada entitas yang melakukan aktivitas tersebut.

**Pemrosesan:** Berinvestasi pada, atau memberikan pinjaman atau asuransi modal tetap atau kerja kepada entitas yang bergerak dalam produksi pangan, baik pada tahap primer (Contoh: Penggilingan), sekunder (Contoh: Makanan yang dipanggang), atau tersier (Contoh: Makanan siap saji yang memiliki derivatif komoditas yang melekat), dapat menyebabkan perusahaan terkena konversi lahan, jika aktivitas pengolahan atau produknya melibatkan komoditas berisiko tinggi.

**Transportasi:** Lembaga keuangan dapat terkena konversi lahan jika mereka menyediakan pembiayaan perdagangan untuk pengangkutan komoditas berisiko tinggi, termasuk produk mentah (Contoh: kedelai), produk setengah jadi (Contoh: Minyak kedelai olahan), dan barang konsumsi (Contoh: Makanan siap saji yang mengandung kedelai, atau daging babi yang dihasilkan dari babi yang diberi pakan bungkil kedelai). Lembaga keuangan ini juga dapat terekspos melalui asuransi kapal yang membawa barang-barang ini, atau investasi langsung pada - atau penyediaan pembiayaan kepada - perusahaan transportasi atau logistik.





**Perdagangan:** Lembaga keuangan menghadapi risiko langsung dan tidak langsung terhadap konversi lahan melalui pasar komoditas internasional – baik mereka aktif sebagai pedagang di pasar fisik atau pasar derivatif, atau memberikan pembiayaan komoditas kepada pedagang eksternal.

**Ritel dan distributor:** Para pengecer yang menjual produk yang pada akhirnya berasal dari kegiatan konversi lahan semakin mendapat sorotan media, dan lembaga keuangan yang memberi pinjaman atau berinvestasi pada perusahaan tersebut berisiko terkena hal yang sama. Misalnya, Laporan Hutan tahunan CDP menyebut sektor ritel serta makanan dan minuman sebagai salah satu industri dengan kinerja terburuk untuk penerapan komitmen deforestasi dan mengakui “ketergantungan tersembunyi” pada hutan yang tertanam dalam rantai pasokan. Laporan tersebut, misalnya, menunjukkan bahwa perkebunan biji-bijian di Brasil, tempat pohon-pohon di hutan hujan Amazon ditebang, telah ditelusuri ke pakan ternak yang digunakan untuk memproduksi daging dan produk susu yang dijual di supermarket di Britania Raya.



© Chris J. Ratcliffe / WWF-UK



© Chris J. Ratcliffe / WWF-UK



# 4

## BAB 4: KONVERGENSI DENGAN KEJAHATAN ASAL (PREDICATE CRIME) - RISIKO BAGI LEMBAGA KEUANGAN

Memungkinkan pengangkutan, impor, dan distribusi hasil konversi lahan

“

Mengharapkan atau meminta suatu negara untuk memberantas pembalakan liar dan pada saat yang sama menerima atau mengimpor kayu ilegal tidak mendukung upaya untuk memberantas kejahatan kehutanan ini.... Faktanya, membiarkan impor dan perdagangan produk kayu ilegal dapat dianggap sebagai tindakan yang membantu atau bahkan melakukan kejahatan kehutanan.

MUHAMMAD PRAKOSA, MENTERI KEHUTANAN INDONESIA, JANUARI 2003

### 4.1 Definisi: predicate crime

Predicate crime adalah kejahatan yang merupakan komponen dari kejahatan yang lebih besar; dalam konteks finansial, hal tersebut berfungsi sebagai tindak pidana yang menghasilkan pendapatan atau dana untuk aktivitas ilegal selanjutnya. Istilah ini umumnya digunakan dalam kaitannya dengan pencucian uang.

Sebagai bagian dari upaya internasional untuk memerangi kejahatan serius, FATF mencantumkan sejumlah pelanggaran predicate (atau 'designated offences' (pelanggaran yang ditetapkan), demikian sebutannya) dalam 40 Rekomendasinya, bersama dengan standar dan pedoman bagi negara-negara untuk menerapkan anti pencucian uang dan melawan kejahatan pendanaan terorisme (AML/CFT) dan menetapkan kerangka peraturan untuk menegakkan hal ini. Negara-negara mengodifikasikan tindak pidana asal ke dalam undang-undang nasionalnya masing-masing; misalnya, Petunjuk Anti-Pencucian Uang Keenam (6AMLDD) UE mencantumkan 22 predicate offence (yang juga diadopsi oleh Britania Raya ke dalam undang-undang nasional sebelum meninggalkan UE) dan Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS (yang selanjutnya diperluas dengan Undang-Undang Patriot AS) mencakup lebih dari 200.

**TABEL 1: DAFTAR 22 PREDICATE OFFENCE SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM 6AML D**

<b>Predicate crime hingga pencucian uang berdasarkan 6AML D</b>	
Partisipasi dalam kelompok kriminal terorganisasi dan aktivitas bisnis ilegal/racketeering	Penculikan, pengekangan ilegal, dan penyanderaan
Terorisme	Perampokan atau pencurian
Perdagangan manusia dan penyelundupan migran	Penyelundupan
Eksploitasi seksual	Kejahatan perpajakan yang berkaitan dengan pajak langsung dan tidak langsung
Peredaran gelap obat-obatan, narkotika, dan psikotropika	Pemerasan
Perdagangan gelap senjata	Pemalsuan
Perdagangan gelap barang curian dan barang lainnya	Pembajakan
Pemalsuan dan pembajakan produk	Perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar
Kejahatan lingkungan	Korupsi
Pembunuhan dan cedera tubuh yang serius	Penipuan
Pemalsuan mata uang	Kejahatan siber



Menelusuri kembali hasil kejahatan dan memahami hubungan antara predicate offences dan pencucian uang adalah kunci bagi upaya pihak berwenang untuk menghentikan dan membongkar jaringan kriminal dan infrastruktur keuangan yang mendukungnya. Mengidentifikasi predicate offences dan mengenali kejahatan-kejahatan yang mendasarinya memungkinkan penegak hukum untuk melacak aliran keuangan gelap dan memahami hubungan, serta memberi wawasan penting mengenai sifat dan ruang lingkup kegiatan kriminal. Hal ini selanjutnya memungkinkan lembaga penegak hukum untuk mengantisipasi tren yang muncul dan menyesuaikan pendekatan mereka sendiri melalui langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh kejahatan-kejahatan ini.

## 4.2 Predicate crime dan konversi lahan

Konversi lahan dapat dilakukan secara legal atau ilegal, namun bagaimanapun juga, hal ini sering kali bersinggungan dengan serangkaian predicate crime yang mendorong, memungkinkan, dan berkorelasi dengan perusakan lingkungan hidup. Artinya, lembaga keuangan yang memiliki hubungan dengan aktivitas konversi lahan melalui bisnisnya – meskipun aktivitas tersebut tampak sah – juga dapat terkena sejumlah predicate crime yang serius (misalnya, penipuan atau penghindaran pajak).

Yang meningkatkan risiko ini adalah bahwa eksposur tersebut mungkin bersifat tidak langsung dan oleh karena itu 'tidak diketahui'; misalnya, melalui pemberian kredit atau melalui fasilitasi/dukungan yang diberikan kepada perusahaan agrobisnis besar. Bank dapat membantu investor membeli aset investasi ramah lingkungan, yang menghasilkan dana yang terkait dengan perusahaan agribisnis utama yang terlibat dalam banyak predicate offence yang diuraikan dalam laporan ini. Bank yang memfasilitasi transaksi obligasi tersebut menetapkan harga obligasi tersebut dan menjualnya kepada investor dengan imbalan sejumlah biaya yang terkait dengan nilai totalnya, sehingga secara tidak langsung membuat mereka terkena risiko kejahatan keuangan terkait.

Hal ini sering kali dilakukan melalui pihak ketiga atau dana investasi ke pengecer besar yang kaitannya dengan konversi lahan saat ini masih kurang dipahami. Memang benar, antara tahun 2013 dan 2019, sekitar 69% dari agrokonversi hutan tropis dilakukan dengan melanggar undang-undang dan regulasi nasional (Contoh: Pelanggaran hak asasi manusia, penipuan dan korupsi, pelanggaran hukum lingkungan hidup) – dan hal ini mungkin merupakan perkiraan yang terlalu rendah, karena kurangnya bukti ilegalitas belum tentu menunjukkan adanya legalitas, melainkan kurangnya data atau pelaporan yang memadai.

Sejumlah predicate crime yang paling sering dikaitkan dengan pencucian uang dan oleh karena itu disaring oleh lembaga keuangan disajikan di bawah ini, sehubungan dengan beberapa penyebab utama yang paling bertanggung jawab atas deforestasi.



**GAMBAR 4: PENDORONG TERJADINYA DEFORESTASI DAN KONVERGENSI  
DENGAN PREDICATE CRIME YANG UMUM DISELEKSI**

© Lizzie / Themis

		Convergence With Other Predicate Crimes											
		Financial Crimes				Trafficking Fines		Environmental Crimes			Terrorist Financing	Organised Criminal Activity	Money Laundering (proceeds of crime)
		Corruption, Extortion & Bribery	Fraud	Tax Evasion	Trade Based Money Laundering	Human Trafficking	Drugs Trafficking	illegal Mining	Illegal Logging	Illegal Wildlife Trade			
Drivers of Land Conversion	Agricultural Production			X		X	X					X	X
	Cattle Grazing / Ranching		X		X		X					X	X
	Oil & Gas Exploration	X											
	Forrestry	X	X		X		X		X	X	X		
	Mining	X			X	X	X	X	X		X	X	
	Infrastructure Development											X	

Mengingat konvergensi yang luas ini, adanya konversi lahan seharusnya dianggap oleh lembaga keuangan sebagai tanda bahaya dan indikator utama terjadinya kejahatan serius dan predicate crime lainnya; dan data keuangan terkait merupakan sumber yang kaya sehingga penegak hukum dapat memperoleh wawasan yang berharga.

## 4.3 Pendorong dan penentu

### 4.3.1 Pertambangan ilegal

Penambangan ilegal – dengan pembukaan lahan untuk pertambangan dan infrastruktur terkait – merupakan penyebab utama deforestasi di Amazon Asia Tenggara, dan Lembah Kongo, dan terjadi ketika lisensi atau izin penambangan belum diperoleh, telah diperoleh secara ilegal (misalnya melalui pemalsuan atau penyupaan). Aktivitas penambangan ilegal dapat dijalankan oleh perusahaan sah yang beroperasi di luar parameter izinnya, oleh kelompok kejahatan terorganisasi, atau sebagai bagian dari perekonomian informal berupa pertambangan rakyat atau pertambangan skala kecil (yang menggunakan alat-alat dasar (bukan mesin skala besar) digunakan untuk mengekstraksi mineral, logam mulia, dan batu permata, termasuk mineral konflik yang ditetapkan). Ada juga risiko signifikan yang terkait dengan rantai pasokan pertambangan dari sumber legal yang bersinggungan dengan logam dari sumber ilegal dan memasuki pasar konsumen.

Pada awal tahun 2000-an, titik temu antara “Perang Melawan Narkoba” yang dipimpin AS – yang secara khusus menargetkan Kolombia dan Meksiko – dan kenaikan harga emas mendorong kelompok kriminal untuk melakukan diversifikasi operasi mereka dari perdagangan gelap narkoba menjadi penambangan emas, yang memungkinkan mereka untuk melakukan menghasilkan margin keuntungan yang jauh lebih tinggi dengan risiko yang lebih rendah. Memang benar, di Kolombia dan Peru – produsen kokain terbesar di dunia – nilai ekspor emas ilegal melebihi nilai kokain; mungkin tidak mengejutkan, mengingat harga emas bisa dua kali lipat harga kokain, ons per ons.



Laporan Interpol pada tahun 2022 memperkirakan penambangan ilegal menghasilkan pendapatan kriminal hingga USD48 miliar per tahun secara global. Di Peru, hampir USD7 miliar dari USD14 miliar transaksi gelap yang terdeteksi antara tahun 2011 dan 2020 terkait dengan penambangan ilegal, sementara di Kolombia, kesalahan faktor perdagangan di sektor mineral mewakili lebih dari USD5,6 miliar aliran keuangan gelap antara tahun 2010 dan 2018.

Penambangan rakyat secara umum dianggap mewakili wilayah dengan risiko predicate crime terbesar, sehingga memungkinkan pelaku kejahatan untuk memasuki sektor ini dengan mudah; bertindak sebagai agregator atau perantara. Namun, pertambangan skala besar dapat menimbulkan risiko korupsi dan penghindaran pajak yang lebih besar, dengan perusahaan cangkang sering digunakan untuk mengaburkan penerima manfaat – dan risiko berkelanjutan terkait dengan aliran dana ilegal yang memasuki rantai pasokan yang sudah ada masih tetap ada.

### **Konvergensi dengan predicate crime lainnya:**



**Korupsi, penyuapan, pemerasan, penipuan, dan kejahatan siber** (seperti peretasan database) dapat digunakan untuk mendapat izin atau lisensi pertambangan secara ilegal, atau untuk memalsukan izin tersebut.



**Perdagangan manusia, pekerja anak, kerja paksa, dan perdagangan seks serta eksploitasi seksual** sering digunakan dalam operasi pertambangan atau ditemukan di kamp pertambangan.



**Kejahatan lingkungan**, misalnya melalui pencemaran merkuri, yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat lokal dan ekosistem sekitar.



**Perusahaan cangkang dan struktur perusahaan yang kompleks**, termasuk pendaftaran di yurisdiksi kerahasiaan dan surga pajak, dapat digunakan untuk mengaburkan kepemilikan manfaat dan **menghindari pajak**.



**Kegiatan kriminal terorganisasi**, mendasari banyak penambangan ilegal, termasuk yang terlibat dalam perdagangan gelap narkoba (dan dapat digunakan untuk mencuci hasilnya). Hal ini juga dapat digunakan untuk **pendanaan teroris** (seperti yang terjadi di Afrika Barat, misalnya).



Emas yang ditambang secara ilegal merupakan sarana utama terjadinya **pencucian uang berbasis perdagangan**, karena emas dapat dicairkan ke dalam berbagai bentuk dan/atau dicampur dengan emas sah, serta diangkut dalam jumlah besar.



Pertambangan dan infrastruktur terkait (seperti jalan raya) memungkinkan akses yang lebih mudah ke kawasan dengan keanekaragaman hayati yang dapat dieksploitasi oleh pedagang satwa liar ilegal. Para penambang sendiri juga diketahui melakukan perburuan oportunistik dan terlibat dalam **perdagangan satwa liar ilegal**, termasuk melalui **penebangan liar** selektif terhadap spesies pohon berharga untuk kemudian diperdagangkan.

## STUDI KASUS

# EMAS ILEGAL: MEMBANTU DAN MENDANAI KELOMPOK KEJAHATAN TERORGANISASI DAN MENEMBUS PASAR LEGAL

Penelitian yang dilakukan oleh LSM Verité menemukan bahwa hingga 91% ekspor emas Venezuela dan 87% ekspor emas Kolombia diproduksi secara ilegal, sering kali dikendalikan oleh kelompok kejahatan terorganisasi yang didukung oleh investasi berskala besar. Beberapa kelompok kejahatan terorganisasi dan kelompok bersenjata non-negara yang paling aktif di dunia dilaporkan terlibat langsung dalam produksi dan penjualan emas ilegal tersebut, termasuk kartel Sinaloa di Meksiko dan mafia 'Ndrangheta di Italia, serta sindikat Brasil, Rusia, dan Tiongkok.

Emas yang diproduksi secara ilegal dari Amerika Latin diekspor ke kilang (dengan bantuan pejabat yang korup), dilebur, dan dicampur dengan emas yang diproduksi secara legal dan emas scrap, atau dicampur untuk membuat paduan, kemudian diekspor ke pasar global. Kanada dan Amerika Serikat adalah importir emas Amerika Latin terbesar – bahkan impor emas Amerika Latin dari Amerika Latin melebihi volume emas yang diklaim Amerika Latin untuk diekspor.

Meskipun Swiss bertanggung jawab dalam memurnikan sekitar 70% emas yang diproduksi secara global, beberapa kilang di wilayah tersebut telah berhenti membeli emas dari pemasok Amerika Latin terkait dengan penambangan emas ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga menimbulkan kesenjangan di pasar yang bergegas diisi oleh kilang-kilang AS, membeli kelebihan emas ini di Swiss dan memperkenalkannya ke pasar global. Faktanya, Verité menemukan bahwa 90% dari perusahaan-perusahaan Fortune 500 yang mengajukan pengungkapan mineral konflik tahun lalu (dari seluruh perusahaan telekomunikasi, IT, produsen mobil, dan produsen mesin) telah membeli emas dari kilang yang terkait dengan penambangan emas ilegal dari Amerika Latin.

Pada tahun 2022, ada lebih dari 320 tambang emas ilegal di sembilan negara bagian yang termasuk dalam kawasan Legal Amazon, Brasil. Faksi-faksi besar penyelundup narkoba, termasuk Primeiro Comando da Capital, telah menyusup ke operasi penambangan di wilayah Adat, menjalankan sistem ilegal, memeras pajak, mengendalikan lubang tambang, dan menjalin kemitraan dengan geng-geng di negara tetangga, Venezuela untuk menjual mineral selundupan. Emas juga merupakan ekspor utama Bolivia, dengan wilayah pertambangan yang melintasi taman nasional dan cagar alam.



## 4.3.2 Penebangan pohon ilegal

Perusahaan kayu dan penyelundup tunggal juga memperdagangkan secara ilegal spesies kayu yang dilindungi yang diatur oleh Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES), seperti kayu rosewood dan mahoni. Para penebang pohon dapat menebang pohon dari spesies atau kawasan yang tidak diperbolehkan dalam izinnya; misalnya, pohon ipê atau terompet yang bernilai tinggi (termasuk *Handroanthus* spp., *Roseodendron* spp., dan *Tabebuia* spp.) yang menjadi sasaran penyelundup sering kali dikelilingi oleh jenis pohon lain sehingga memungkinkan dilakukannya penebangan selektif tanpa menebang seluruh wilayah – sehingga citra satelit dapat ditipu, dan penyelundup menghindari deteksi. Walaupun penebangan selektif mungkin tidak mengakibatkan deforestasi total di suatu wilayah, namun hal ini menyebabkan degradasi lahan hutan dan sebagian besar disebabkan oleh perdagangan kayu.

### Konvergensi dengan predicate crime lainnya:



Pekerja yang terlibat dalam penebangan liar di wilayah tertentu (misalnya di seluruh Afrika) rentan terhadap kondisi kerja paksa, termasuk penipuan mengenai upah, jam kerja, dan legalitas pekerjaan, penganiayaan dan pelecehan, serta pekerja anak.



Badan Investigasi Lingkungan Hidup (EIA) menyatakan bahwa kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan “terkait erat”, dengan para penyelundup menggunakan metode perdagangan dan pengiriman yang sama untuk pembalakan liar dan perdagangan ilegal satwa liar, dan produk-produk satwa liar ilegal diselundupkan dalam kayu berlubang melalui hotspot geografis yang sama. Banyak dari kelompok kejahatan terorganisasi serius yang sama berada di belakang satwa liar ilegal, perdagangan narkoba, dan kejahatan kehutanan.



Kayu legal dan ilegal dapat dicampur untuk mencuci kayu ilegal secara efektif melalui pencucian uang berbasis perdagangan.



Penipuan, melalui pelaporan yang salah, penyalahgunaan lisensi, dan pemalsuan izin, banyak terjadi, begitu pula korupsi, termasuk kolusi pejabat, penghindaran pajak (misalnya, melalui transfer pricing atau penggunaan perusahaan palsu), dan penghindaran dakwaan: di Papua Nugini, misalnya, perusahaan dilaporkan segera mengubah namanya ketika ada perintah pengadilan sehingga mereka dapat melanjutkan aktivitas terlarangnya.



Penghindaran sanksi; misalnya, pada tahun 2021, perusahaan Jerman WOB Timber dinyatakan bersalah karena melanggar sanksi UE terhadap kayu yang diimpor dari Myanmar. Pengadilan Regional di Hamburg memvonis perusahaan tersebut karena menghindari sanksi terhadap 31 pengiriman kayu senilai jutaan euro antara tahun 2008 dan 2011 ketika junta militer sebelumnya, Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara (SPDC), diberi sanksi oleh UE. Ini bukanlah kasus yang terisolasi; ada contoh global lainnya mengenai ekspor kayu yang terkait dengan individu dan perusahaan yang terkena sanksi yang memasuki pasar Eropa dan Amerika Utara.

# STUDI KASUS: PENEANGAN ILEGAL DI PAPUA NUGINI

Konsesi penebangan kayu mencakup hampir 11 juta hektar – sekitar seperempat luas daratan Papua Nugini – dan semakin banyak sumber yang menyatakan bahwa konsesi tersebut digunakan oleh politisi korup sebagai alat untuk membangun kekayaan pribadi. Gubernur provinsi Oro di negara tersebut telah menjadi kritikus yang vokal terhadap kartel penebangan kayu yang beroperasi di wilayah tersebut selama satu dekade terakhir, dengan menggambarkan bahwa semua usaha penebangan kayu tersebut melanggar hukum, karena tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah (dan, memang benar, sebuah laporan oleh Chatham House menganggap setidaknya 70% penebangan kayu di negara ini ilegal). Meskipun para penebang kayu mungkin mencari spesies pohon tertentu yang memiliki nilai tinggi (misalnya, kayu rosewood Papua Nugini (*Pterocarpus indicus*)), namun sebagian besar kegiatan penebangan ini melibatkan penebangan pohon secara sembarangan, yang kemudian dibawa ke tempat penebangan kayu dan disortir, dengan kayu bernilai tinggi dipilih pada tahap ini.

Menurut Penilaian Risiko Nasional yang dilakukan Bank of Papua New Guinea pada tahun 2017, penebangan liar di negara ini merupakan ancaman signifikan terhadap pencucian uang. Penilaian tersebut menyatakan bahwa ada indikator kuat adanya korupsi skala besar dan penebangan liar di sektor kehutanan di negara ini yang mengakibatkan tingginya tingkat hasil kejahatan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa permasalahan ini tersebar luas dan hilangnya pendapatan juga sangat besar.

Sebuah laporan pada tahun 2021 mencatat bahwa menurut pengajuan perusahaan online di Papua Nugini, bank komersial di negara tersebut telah menyediakan setidaknya K300 juta (USD79 juta) kredit yang tersedia kepada lima perusahaan pengeksport kayu terbesar sejak tahun 2000. Namun, hampir dua pertiga dari transaksi pembiayaan yang terdaftar adalah dalam jumlah yang tidak ditentukan, dan lima eksportir teratas hanya menyumbang 52% dari total ekspor kayu bulat. Dengan demikian, total kredit yang tersedia bagi seluruh industri penebangan kayu bisa mencapai lebih dari tiga kali lipat jumlah tersebut.



### 4.3.3 Perdagangan gelap narkoba

Produksi narkoba secara langsung dan tidak langsung mendorong konversi lahan. Kegiatan yang disebut dengan “deforestasi akibat narkoba” meliputi:



Investasi kembali hasil perdagangan narkoba – untuk tujuan pencucian – menjadi pembebasan lahan legal dan ilegal dan selanjutnya konversi hutan menjadi padang rumput untuk sapi atau lahan pertanian untuk perkebunan kedelai dan kelapa sawit (yang juga sering melibatkan pelanggaran hak asasi manusia selama pengusiran paksa terhadap Masyarakat Adat dan komunitas lokal dari lahan tersebut).



Pembukaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan jalur transit seperti jalan raya, pelabuhan sungai sementara, dan landasan udara untuk mengangkut narkoba.



Konversi lahan di Amerika Selatan dan Tengah untuk menanam koka, yang dibudidayakan untuk dijadikan kokain.



Konversi lahan menjadi perkebunan opium untuk produksi opium dan heroin di Meksiko.



Konversi lahan untuk perkebunan ganja di Madagaskar dan Amerika Selatan dan Tengah (misalnya, lebih dari dua juta tanaman ganja disita di Legal Amazon antara tahun 2015 dan 2020 - lebih dari setengahnya berada di Negara Bagian Pará, Brasil).



## FOKUS: HAK ATAS TANAH ADAT



Sebagian besar kokain di dunia – lebih dari 1.000 metrik ton per tahun – transit melalui Lembah Amazon melalui sekitar 900 jalur narkoba yang berbeda ke lebih dari 65 negara transit dan tujuan. Ada lebih dari 1.200 landasan udara yang tidak terdaftar di Amazon Brasil saja; setidaknya setengah dari jumlah tersebut berlokasi di lahan yang dilindungi atau wilayah adat.

Masyarakat Adat dan masyarakat lokal sering kali kurang mendapat perlindungan karena terbatasnya kehadiran negara dan layanan sosial. Masyarakat Adat dan komunitas lokal menghadapi dampak yang tidak proporsional dari deforestasi dan hubungan kriminalnya, mengalami pengungsian paksa, keracunan akibat polusi air, udara dan tanah, serta meningkatnya eksposur terhadap kekerasan dan viktimisasi.



A close-up photograph of a cacao tree branch. Several green cacao pods are attached to the dark brown bark. The background is filled with lush green leaves, some showing signs of insect damage. The lighting is bright, suggesting a sunny day in a tropical environment.

## STUDI KASUS: BUDIDAYA KOKA DI KOLOMBIA

Dari tahun 2001 hingga 2022, kota madya Tibú di Kolombia utara kehilangan tutupan pohon yang setara dengan 150.000 lapangan sepak bola, dan penanaman koka dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya hal tersebut. Meskipun budidaya tanaman koka – yang merupakan bahan baku pembuatan kokain – menyumbang konversi lahan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penggembalaan sapi, tanaman ini merupakan sumber pendapatan penting yang diandalkan oleh lebih dari 230.000 keluarga di negara ini. Memang benar, ketergantungan yang berlebihan dan produksi tanaman yang berlebihan di Tibú dan daerah penghasil koka lainnya di Kolombia telah menyebabkan nilai pasta koka – yang sering digunakan sebagai pengganti uang tunai di situ – turun sebesar 40% dari tahun 2022 hingga 2023, yang membuat penduduk setempat kesulitan untuk menghidupi diri mereka. Meskipun krisis ini memberi peluang bagi para petani untuk beralih dari koka ke perekonomian yang lebih berkelanjutan, banyak petani yang justru beralih ke kegiatan yang memiliki dampak lebih merusak lingkungan, seperti penambangan emas ilegal, yang kini sekitar 50 kali lebih menguntungkan dibandingkan koka, berkat peningkatan nilai sebesar 360% antara tahun 1990 dan 2020.



## Konvergensi dengan predicate crime lainnya:



**Geng kriminal terorganisasi** dengan aliran pendapatan yang beragam sering kali menjalankan operasi penambangan ilegal dan melakukan pembalakan liar bersamaan dengan **perdagangan narkoba**.



Para penyelundup narkoba dapat mengandalkan korupsi, penyuapan, dan pemerasan untuk membantu mereka menyelundupkan narkoba di sepanjang jalur transit atau membujuk pejabat untuk menutup mata terhadap budidaya atau produksi narkoba, serta penipuan dalam dokumen transit.

### 4.3.4 Aktivitas kejahatan serius yang terorganisasi

Kejahatan lingkungan di Amazon menjadi semakin terorganisasi. Sindikat kejahatan terorganisasi transnasional dengan cepat mendiversifikasi sumber pendapatan mereka, terlibat dalam perdagangan satwa liar, narkoba, mineral, dan kayu secara bersamaan. Barang-barang ini sering kali berbagi jalur transit, metode perdagangan dan pengiriman, serta proses yang sama, bergerak melalui titik geografis, pelabuhan, dan pusat konsolidasi yang sama.

Kelompok kriminal yang sebelumnya beroperasi di kota-kota besar dan daerah perkotaan yang pindah ke Amazon untuk menduduki jalur perdagangan narkoba sudah menetap untuk mengambil keuntungan dari sumber daya alam hutan hujan, seperti emas dan kayu, yang memberi mereka "potensi pertumbuhan yang tinggi."

Kegiatan-kegiatan ini memerlukan pembukaan lahan terlebih dahulu, dan selanjutnya lahan tersebut dikonversi untuk tujuan kegiatan yang seolah-olah legal seperti pertanian, pertambangan, dan peternakan, yang menyediakan sarana bagi organisasi kriminal untuk mencuci keuntungan ilegal mereka. Di Meksiko, misalnya, taktik yang umum dilakukan adalah menebangi hutan, menjual kayunya, dan menanam pohon alpukat resmi sebagai gantinya. Di banyak wilayah di Amerika Latin, pemerintah telah melakukan investasi di bidang agrobisnis, dengan menawarkan kredit dan hibah bersubsidi serta insentif keringanan pajak yang menggoda pelaku ilegal untuk masuk ke dalam industri. Di Honduras, misalnya, lahan dibuka oleh penyelundup narkoba di lahan basah dan rawa bakau untuk menanam tanaman kelapa sawit ilegal guna melegalkan pendapatan dari penyelundupan narkoba dan untuk melegitimasi kehadiran kelompok di wilayah yang dilalui jalur perdagangan narkoba.









## FOCUS:

# KEJAHATAN TERORGANISASI LINTAS NEGARA



Tidak ada definisi yang disepakati secara universal mengenai kejahatan terorganisasi transnasional; bahkan Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional (UNTOC) dengan sengaja menghilangkan definisi yang tepat agar definisi tersebut dapat “diterapkan secara lebih luas pada jenis kejahatan baru yang terus-menerus muncul seiring dengan perubahan kondisi global, regional, dan lokal seiring berjalannya waktu.” Namun definisi kelompok kejahatan terorganisasi adalah:

- sekelompok orang yang terdiri dari tiga orang atau lebih yang tidak dibentuk secara acak;
- ada untuk jangka waktu tertentu; dan
- bertindak bersama-sama dengan tujuan melakukan setidaknya satu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setidaknya empat tahun, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya.

Pemahaman UNTOC mengenai kejahatan yang bersifat lintas negara adalah pelanggaran yang dilakukan di lebih dari satu negara; yang terjadi di satu negara namun direncanakan atau dikendalikan di negara lain; dilakukan di satu negara oleh kelompok yang beroperasi di lebih dari satu negara; atau yang dilakukan di satu negara tetapi memiliki dampak besar di negara lain.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan global, kejahatan terorganisasi transnasional mencakup “hampir semua kegiatan kriminal serius yang bermotif keuntungan dan memiliki implikasi internasional”.



## FOKUS:

# KELOMPOK KEJAHATAN TERORGANISASI: KOLABORASI DAN KONFLIK



Di beberapa daerah, kelompok kejahatan terorganisasi berkolaborasi dengan berbagi infrastruktur – seperti jalan dan jalur udara – dan jalur penyelundupan untuk memperluas operasi mereka. Di tempat lain, kartel berebut sumber daya, sehingga menimbulkan konflik dan kekerasan antar-kelompok yang berdampak buruk terhadap komunitas lokal dan dapat menyebabkan warga sipil terlibat dalam baku tembak. Kelompok kriminal yang berkolaborasi juga dapat bersaing dengan kelompok-kelompok kriminal lain yang bekerja sama; misalnya, di Meksiko, pada tahun 2020, dilaporkan bahwa La Línea dan Kartel Juárez berjuang untuk menguasai industri kayu ilegal melawan Gente Nueva (sekarang dikenal sebagai Los Chapitos), suatu faksi bersenjata dari Kartel Sinaloa yang terkenal kejam.

Amazon Underworld, sebuah inisiatif pemetaan dan pelaporan investigasi lintas batas, menemukan adanya kejahatan terorganisasi dan kelompok bersenjata di semua kota perbatasan di Amazon Kolombia. Di wilayah ini, kelompok bersenjata ilegal telah mengatasi hambatan budaya dan bahasa untuk bekerja sama dan menawarkan pekerjaan kepada individu yang memiliki sedikit peluang ekonomi. Geng-geng kriminal tampaknya mencari pemuda Pribumi dengan fisik kuat, mampu membawa beban berat, dan memiliki pengetahuan serta pemahaman yang baik tentang hutan.

Mantan anggota kelompok pemberontak Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) yang sekarang telah didemobilisasi telah dikaitkan dengan kelompok kriminal Brasil, termasuk Comando Vermelho dan Primeiro Comando da Capital (PCC), yang diketahui merekrut warga setempat untuk mengangkut emas yang ditambang secara ilegal dan narkoba melalui hutan hujan.



## FOKUS:

# PEMBUNUHAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP



Pembela hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup dibunuh dengan frekuensi satu orang setiap hari selama tahun 2022, menurut Global Witness, dengan seperlima pembunuhan terjadi di hutan hujan Amazon. Pembunuhan sebagian besar diatur oleh penjajah tanah dan kelompok kejahatan terorganisasi, banyak di antara mereka yang tidak dihukum. Secara tidak proporsional, lebih dari 30% dari mereka yang dibunuh adalah Masyarakat Adat, meskipun jumlah mereka hanya 5% dari populasi.

## PEMERASAN DAN KEKERASAN



Geng-geng kejahatan dapat memeras atau mengancam pemilik tanah dengan kekerasan – memberi penawaran rendah kepada pemilik tanah dan mengambil alih dengan kekerasan jika tawaran tersebut ditolak. Di wilayah tertentu, ancaman umum adalah: “Kalau tidak mau menjual tanahnya, boleh saja. Janda menjualnya lebih murah.” Mungkin hanya ada sedikit jalan keluar bagi pemilik tanah yang terancam; misalnya, di Meksiko, hanya ada sedikit pilihan yang tersedia selain mengajukan pengaduan kepada pejabat federal, pihak yang sering kali diancam, diculik, atau diperas oleh kartel. Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang tinggal di atau dekat wilayah yang rentan terhadap konversi lahan juga sering menjadi sasaran pemerasan dan ancaman kekerasan.



### Konvergensi dengan predicate crime lainnya:



Geng kejahatan terorganisasi yang serius sering kali mengandalkan bentuk dan jaringan **penyuapan, pemerasan, dan korupsi** yang sama, apa pun jenis perdagangan gelap yang mereka lakukan.



Mereka juga menggunakan teknik **penipuan** yang sama – seperti kesalahan pembuatan faktur, izin perdagangan, peretasan database perdagangan, atau penipuan bill of lading – ketika menyelundupkan barang.



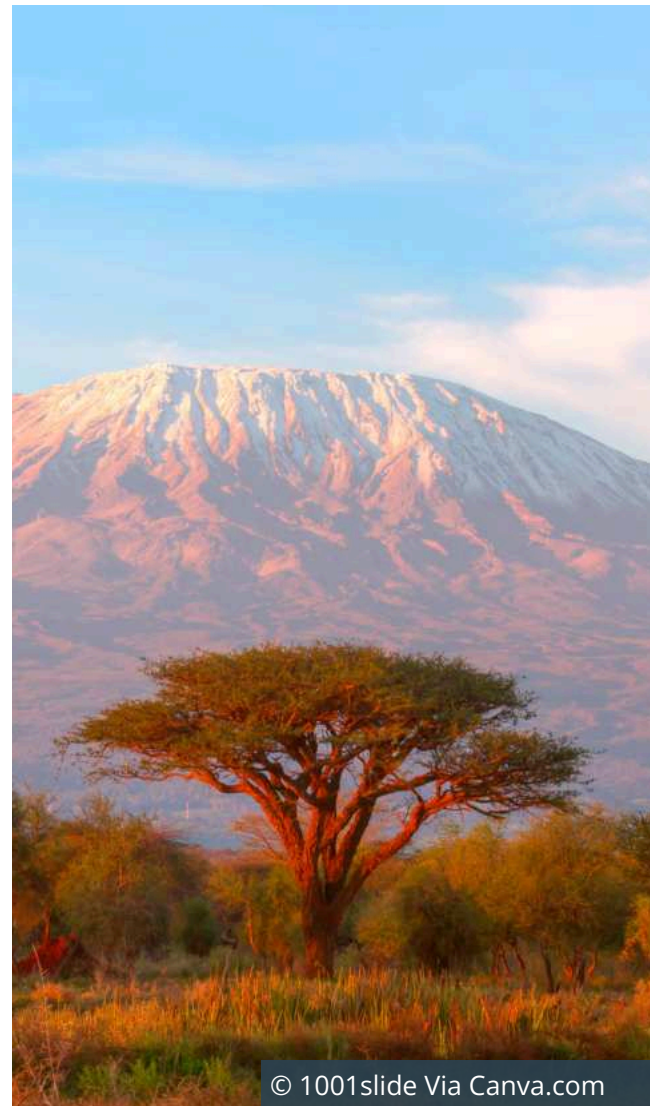
Beberapa geng kejahatan terorganisir diketahui memanfaatkan tenaga kerja dari korban **perdagangan manusia**, terutama dalam operasi penambangan liar dan pembalakan liar.



Sindikatan kejahatan yang mengambil keuntungan dari konversi lahan dapat memanfaatkan perusahaan yang berdomisili di yurisdiksi dengan kerahasiaan tinggi dan negara bebas pajak untuk melakukan **penghindaran pajak** lebih lanjut.

### 4.3.5 Pendanaan teroris dan konflik

Banyak kelompok bersenjata non-negara dan faksi pemberontak diketahui terlibat dalam pembukaan lahan untuk membiayai kegiatan mereka melalui perdagangan sumber daya alam seperti kayu; sumber pendapatan yang tercatat di seluruh dunia di negara-negara seperti Myanmar, Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, dan Republik Afrika Tengah – terutama karena banyak zona konflik berada di sekitar hutan yang kurang terjangkau pemerintah. Misalnya, menurut [laporan](#) Kelompok Pengawasan Komite Dewan Keamanan PBB untuk Somalia dan Eritrea, sumber utama pendapatan Al Shabaab tampaknya berasal dari [pengumpulan pajak tidak resmi atas arang](#) di pos pemeriksaan jalan dan pelabuhan (arang di wilayah tersebut dihasilkan dari kayu aromatik dari pohon Akasia (*Acacia bussei*) yang ditebang dan merupakan barang mewah yang banyak dicari untuk memanggang daging di UEA, Oman, Arab Saudi, dan Yaman). Di [Distrik Badhadhe](#), Somalia, kelompok ini dilaporkan telah menghasilkan hingga USD18 juta per tahun dari pajak ilegal dari lalu lintas arang. Memang benar, sejauh mana arang berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi para penjahat dan kelompok bersenjata non-negara di Somalia mengakibatkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang [mengembargo](#) ekspor dan impor arang Somalia.



© 1001slide Via Canva.com

Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Rwanda (FDLR), sebuah kelompok pemberontak bersenjata yang terkait dengan genosida Rwanda pada tahun 1994 dan aktif di Republik Demokratik Kongo bagian timur, juga diketahui membiayai kegiatannya melalui arang yang diperoleh secara ilegal dari pohon-pohon yang tumbuh di Taman Nasional Virunga – kawasan yang semakin mengalami deforestasi di Cekungan Kongo.

#### Konvergensi dengan predicate crime lainnya:



Di Somalia, banyak **kelompok dan jaringan kriminal terorganisasi** yang beroperasi bersama dengan Al-Shabaab, menggunakan jaringan berbasis etnis dan klan serta **korupsi yang merajalela** untuk menyelundupkan komoditas, seperti arang ilegal, ke luar negeri.



**Penipuan**, seperti pemalsuan dokumen bea cukai, banyak digunakan untuk menyamarkan asal usul arang ilegal Somalia ketika tiba di UEA dan sebagai gantinya menunjukkan bahwa arang tersebut dikirim dari negara-negara seperti Pakistan, Ghana, Djibouti, Pantai Gading, Kenya, Tanzania, dan Komoro – sehingga juga memungkinkan **penghindaran sanksi**. Surat Keterangan Asal dapat dipalsukan seluruhnya atau diperoleh melalui **korupsi, pemerasan, dan penyuapan**, dengan keterlibatan perantara atau pejabat dari konsulat atau kedutaan.

### 4.3.6 Korupsi dan suap

Korupsi mendasari dan mempercepat sebagian besar konversi lahan ilegal. Sering kali, lembaga yang sama yang bertugas melindungi spesies satwa yang terancam punah, pohon, kawasan lindung, dan mineral berharga rentan terhadap suap dan paksaan. Kasus pejabat pemerintah daerah atau nasional mengeluarkan lisensi yang memperbolehkan perusahaan sektor ekstraktif untuk beroperasi di kawasan yang lingkungan hidupnya dilindungi atau kawasan di mana upaya perlindungan – seperti studi – diperlukan (tetapi dihindari) sebagai imbalan atas suap adalah hal biasa.

Korupsi dapat muncul dalam berbagai cara di seluruh rantai pasok kehutanan. Sebagaimana diidentifikasi oleh INTERPOL, penyuapan merupakan tipologi korupsi yang paling umum terjadi di sektor kehutanan, diikuti oleh penipuan, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, dan kronisme. Misalnya, suap dapat diberikan kepada pejabat publik untuk mendapatkan konsesi kayu atau mengizinkan kayu ilegal melewati pos pemeriksaan, atau kepada petugas bea cukai untuk memfasilitasi ekspor kayu ilegal. Di sini, para pejabat dapat disuap untuk mengabaikan kayu ilegal dan menciptakan rantai pasok yang dapat dilacak dengan cara menipu dalam memverifikasi perjalanan kayu dari konsesi melalui pos pemeriksaan dan ke pabrik penggergajian kayu yang tidak pernah melihat kayu tersebut. Mengetahui bahwa pejabat dapat disuap dan korup akan semakin mendorong para penjahat untuk terlibat dalam kegiatan konversi lahan ilegal yang menguntungkan.

Kelompok kriminal terorganisasi dapat dibekingi dan didukung oleh sejumlah tokoh politik dan ekonomi yang mendanai, melindungi, dan mengambil keuntungan dari kegiatan ilegal. Korupsi yang dilakukan oleh pialang, calo, dan agen pelayaran sering kali juga diperlukan untuk memastikan komoditas ilegal sampai ke tujuannya.

Dalam hubungan dua arah, keuntungan besar yang diperoleh dari kegiatan pembukaan lahan juga dapat digunakan untuk menyuap hakim dan jaksa yang bekerja melawan kelompok kriminal (termasuk mereka yang melakukan deforestasi ilegal), yang selanjutnya menghidupkan korupsi dan mengganggu stabilitas supremasi hukum.



### 4.3.7 Penghindaran pajak

Penggunaan yurisdiksi lepas pantai untuk mendirikan struktur perusahaan yang memfasilitasi kejahatan lingkungan hidup telah diamati oleh sektor nirlaba di Asia, Afrika, Karibia, Timur Tengah, dan Eropa. Konsultasi yang dilakukan oleh FATF sebagai bagian dari laporan 'Pencucian Uang dari Kejahatan Lingkungan' menunjukkan bahwa para penjahat di Amerika Selatan, misalnya, sering mendirikan badan hukum di kepulauan Karibia yang secara langsung berinteraksi dengan calon pembeli yang terlibat dalam pemurnian produk (seperti emas). Semua dana kemudian melewati struktur perusahaan tersebut, baik yang tetap berada di yurisdiksi transit sebagai sarana penempatan atau dikembalikan ke negara sumber – kemungkinan besar akan mendanai aktivitas ilegal lebih lanjut.

FATF juga mencatat bahwa kejahatan perpajakan terkait kejahatan lingkungan menunjukkan penggunaan perbankan luar negeri serta struktur perusahaan di luar yurisdiksi tempat aktivitas ilegal tersebut terjadi.



© Chris J. Ratcliffe / WWF-UK



## FOKUS:

# PENGHINDARAN PAJAK: MENDORONG DAN SECARA LANGSUNG MENDANAI KONVERSI LAHAN



Sebuah studi menemukan bahwa negara suaka pajak menawarkan saluran utama bagi investor untuk mendanai agribisnis di wilayah tropis; 68% dari seluruh aliran modal asing yang diselidiki ke sembilan perusahaan terkemuka di sektor kedelai dan daging sapi di Amazon Brasil ditransfer melalui negara-negara suaka pajak antara tahun 2000 dan 2011. Sebagian besarnya dilakukan melalui Kepulauan Cayman. Laporan tersebut mencatat bahwa kerahasiaan dan transparansi yang ditawarkan oleh tempat-tempat suaka tersebut tampaknya penting bagi mereka yang berinvestasi dalam jumlah besar di perusahaan agribisnis yang bertanggung jawab atas konversi lahan secara signifikan di Amazon, kemungkinan besar karena hal tersebut melindungi mereka dan memungkinkan mereka untuk lebih menyembunyikan keterlibatan mereka.

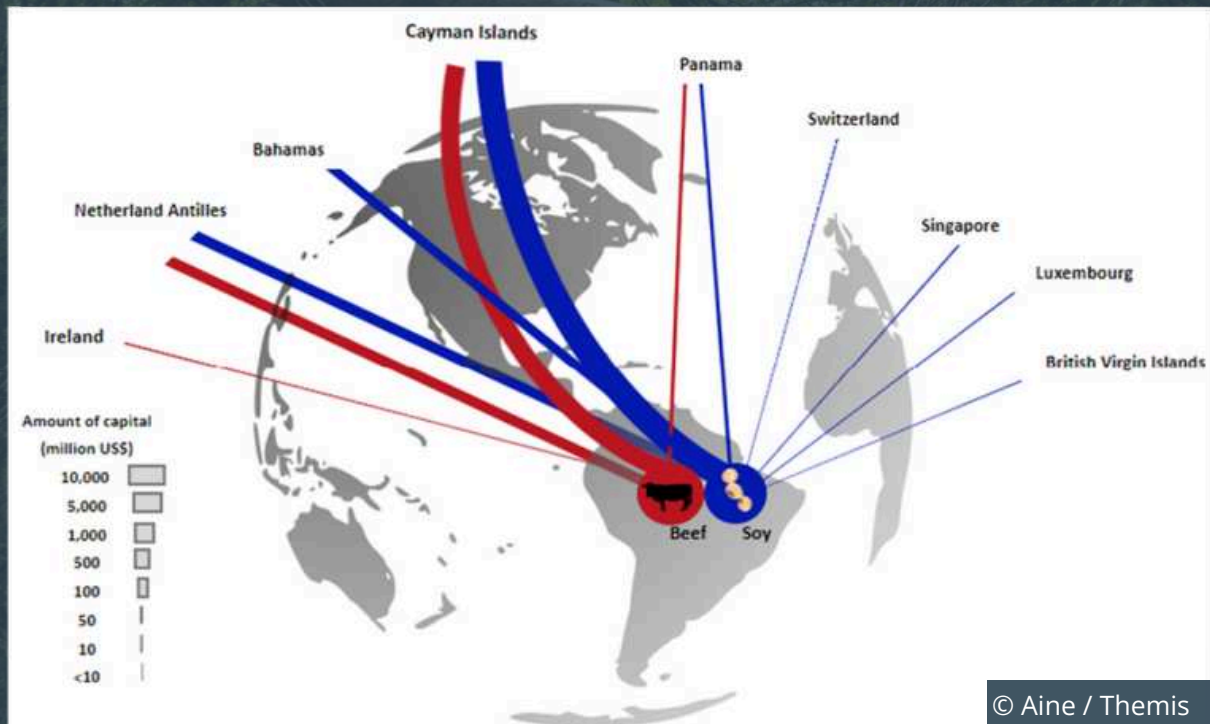
“

Rantai komoditas tentu saja cukup kompleks, namun sederhananya, kegiatan ekonomi di lapangan memerlukan modal agar dapat beroperasi, dan kami menganggapnya menarik, dan layak untuk didiskusikan, bahwa sebagian besar modal ini ditransfer dari anak perusahaan yang berlokasi di yurisdiksi suaka pajak”.

VICTOR GALAZ, ASSOCIATE PROFESSOR DAN WAKIL DIREKTUR DI PUSAT KETAHANAN STOCKHOLM DI UNIVERSITAS STOCKHOLM, PENULIS UTAMA STUDI ‘SUAKA PAJAK DAN DEGRADASI LINGKUNGAN GLOBAL’ (SEPERTI YANG DICERITAKAN KEPADA MONGABAY)



GAMBAR 5: ALIRAN MODAL MASUK DARI SUAKA PAJAK KE INDUSTRI DAGING SAPI DAN KEDELAI DI AMAZON BRASIL



Modal asing (pinjaman, uang muka, impor yang dibiayai, dan leasing/sewa) ditransfer dari negara suaka pajak antara bulan Oktober 2000 dan Agustus 2022 ke sektor-sektor ekonomi utama yang terkait dengan perubahan penggunaan lahan di Amazon Brasil.

Berdasarkan data dari Tax havens and global environmental degradation, diterbitkan di Nature, Ecology & Evolution.

© EriCatarina Via Canva.com

Struktur perusahaan yang kompleks, yang memungkinkan penghindaran pajak, juga dapat digunakan untuk mengaburkan identitas individu dan organisasi yang pada akhirnya mengendalikan dan mengambil manfaat dari perusakan kawasan hutan. Pelaku kejahatan sering kali membentuk struktur seperti itu dengan kepemilikan berlapis-lapis yang terdaftar di yurisdiksi luar negeri yang ditandai dengan tingkat kerahasiaan perusahaan yang tinggi, sehingga memungkinkan mereka untuk mencuci uang dan menghindari pajak. Dengan melakukan hal ini, mereka menghilangkan pendapatan yang sangat dibutuhkan pemerintah di negara-negara sumber, misalnya untuk mendukung layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan mendasar lainnya. Dengan demikian, dampak konversi lahan terhadap hak asasi manusia bersifat langsung (misalnya, ketika Masyarakat Adat dan komunitas lokal diperlakukan dengan kekerasan) dan tidak langsung (karena aliran keuangan gelap yang terkait menghilangkan kemampuan pemerintah untuk menyediakan sumber daya untuk memenuhi kewajiban hak asasi mereka).

Menurut FATE, tantangan bagi penyelidik keuangan adalah membedakan antara penggunaan faktor untuk menghindari pajak dan untuk menyembunyikan aktivitas ilegal (seperti penambangan gelap atau deforestasi); penghindaran pajak mungkin menjadi kejahatan sekunder yang hanya difasilitasi oleh penggunaan kendaraan di yurisdiksi luar negeri yang tujuan utamanya adalah untuk mengaburkan kejahatan yang mendasarinya.



### 4.3.8 Penipuan

Teknik penipuan dan pemalsuan khusus banyak digunakan pada semua tahap konversi lahan ilegal – mulai dari pemalsuan izin yang digunakan untuk mengakses kawasan hutan hingga dokumen faktur perdagangan yang digunakan untuk mengangkut kayu ilegal.

#### Teknik penipuan yang umum meliputi:

- Bills of lading atau surat pengapalan, sering kali ditulis tangan dan mudah diubah untuk mengubah asal kiriman, komoditas yang terdaftar, atau perusahaan yang bertanggung jawab mengirimkan kontainer.
- Tidak dilaporkannya jenis atau jumlah spesies kayu yang dilindungi pada dokumen pelayaran.
- Pemalsuan sertifikasi untuk kayu premium atau kayu yang bersumber secara lestari.
- Laporan pendapatan palsu yang disampaikan kepada otoritas pajak federal untuk menghindari pajak.
- Pemilik lahan mendapat izin untuk menebang lebih banyak pohon daripada yang ingin mereka tebang, dan menjual kredit yang belum terpakai kepada pabrik kayu dan petani lainnya.
- Mencampur bubur kertas yang diperoleh secara ilegal dengan kayu perkebunan yang diproduksi secara legal. Setelah kayu diolah menjadi pulp, hanya analisis serat di laboratorium yang dapat mengungkap spesies pohon dan negara asal.

#### Konvergensi dengan predicate crime lainnya:



Penipuan selanjutnya digunakan sebagai cara untuk memungkinkan penghindaran pajak yang terkait dengan konversi lahan dan **penghindaran sanksi** (misalnya, atas ekspor dan impor arang ilegal Somalia).





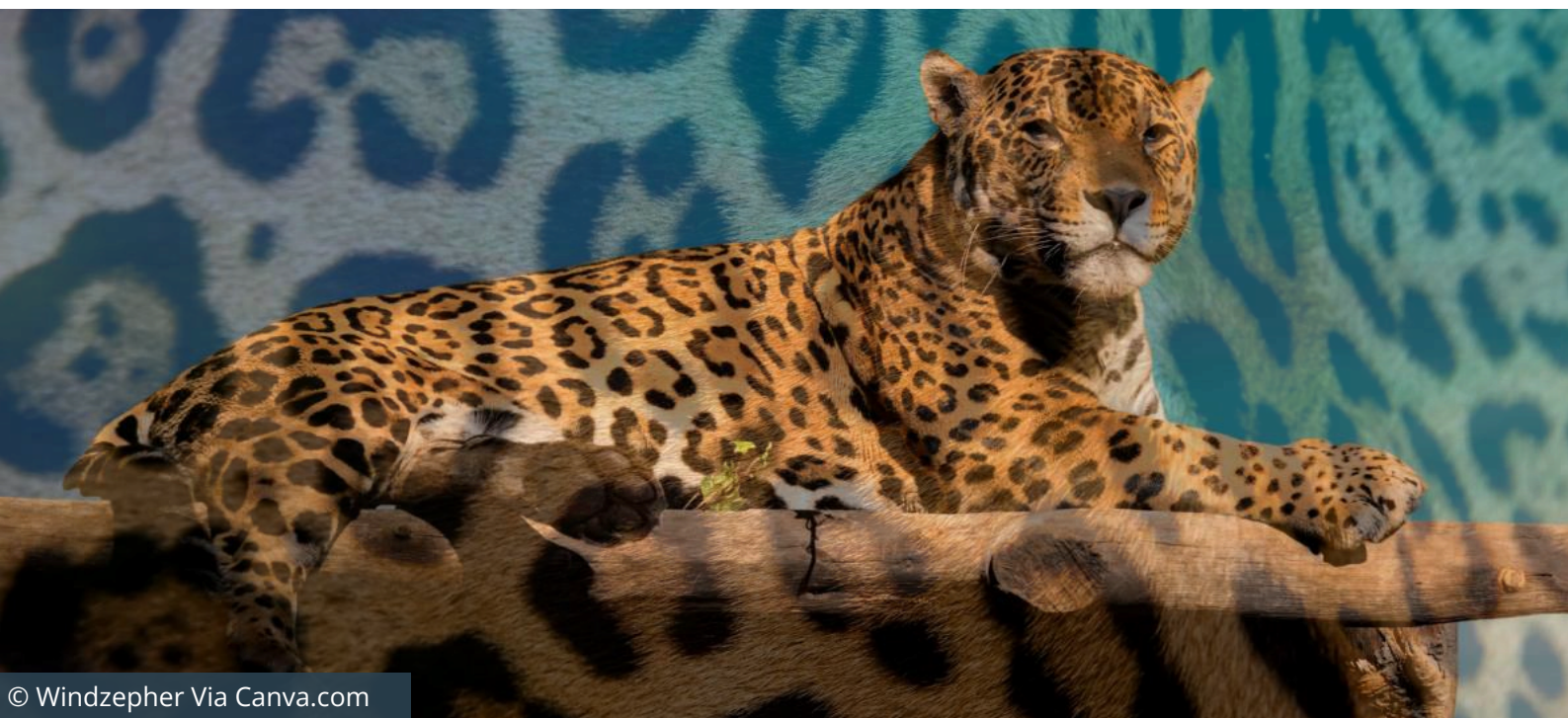
### 4.3.9 Pencucian uang berbasis perdagangan

Sebagaimana telah dijelaskan secara terperinci, para penyelundup narkoba dan kelompok kriminal terorganisir berkontribusi terhadap konversi lahan ketika mereka dengan sengaja membuka lahan untuk mencuci hasil penjualan narkoba; misalnya untuk keperluan peternakan sapi, pertanian alpukat, monokultur tanaman lain seperti kedelai dan kelapa sawit, pertambangan, atau penggergajian kayu. Mereka juga mungkin menerima pengiriman kayu atau produk deforestasi ilegal dan legal (misalnya mineral) sebagai teknik pencucian uang berbasis perdagangan.

## 4.4 Kejahatan yang berkorelasi (correlating crime)

### 4.4.1 Perdagangan ilegal satwa liar dilindungi

Baik EIA maupun FATF mengidentifikasi adanya konvergensi utama antara perdagangan satwa liar ilegal dan pembalakan liar serta perdagangan yang terkait. Meluasnya infrastruktur ilegal, seperti pembangunan jalan tidak resmi di taman nasional untuk memfasilitasi penebangan – yang mungkin terjadi karena korupsi dan penyuaan pejabat lokal atau kurangnya kapasitas penegakan hukum – berkontribusi signifikan terhadap konversi lahan. Hal ini juga berperan penting dalam memberi akses yang lebih mudah terhadap satwa liar eksotik, yang dieksploitasi oleh pemburu liar. Perburuan oportunistik – dibandingkan dengan perburuan yang bersifat strategis dan terencana – juga terjadi, terutama dari para penambang, penebang kayu, dan pekerja konstruksi lainnya yang terlibat dalam degradasi hutan dan konversi lahan – untuk tujuan konsumsi langsung, perdagangan dalam negeri, atau perdagangan internasional (misalnya, untuk dijual dan digunakan dalam industri Pengobatan Tradisional Tiongkok (TCM), seperti yang telah didokumentasikan dengan para penambang dan penebang oportunistik yang berburu dan membunuh jaguar di hutan hujan Amazon di Suriname, atau melakukannya 'untuk memesan' dari pedagang lokal - pasta jaguar dapat diperoleh sekitar USD3.000 per toples sebagai obat TCM untuk nyeri sendi dan potensi seksual).





Perusahaan kayu dapat memaksimalkan keuntungan dengan memungkinkan penyelundupan produk-produk ilegal dari satwa liar, dengan bertindak sebagai operasi terdepan dengan aktivitas penebangan legal mereka sebagai kedok dan menyediakan sarana untuk mencuci produk-produk ilegal. Misalnya, ada kasus spesies flora dan fauna (serta narkoba) yang diselundupkan dalam kayu gelondongan yang sudah dilubangi (yang kemudian dapat diisi dengan lilin dan ditutup kembali) atau kayu palsu, atau disembunyikan di antara pengiriman kayu yang lebih besar, yang mungkin terwujud dalam bentuk menilai kargo terlalu tinggi atau terlalu rendah.

#### **4.4.2 Perdagangan manusia, kerja paksa, perbudakan, dan pekerja anak**

Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa sebanyak 40% dari seluruh deforestasi di seluruh dunia dilakukan oleh korban perbudakan modern atau kerja paksa dan bahwa deforestasi berbasis budak bertanggung jawab atas emisi sekitar 2,54 miliar ton karbon dioksida setiap tahunnya. Memanfaatkan korban perdagangan manusia untuk melakukan aktivitas yang berbahaya secara fisik seperti penebangan kayu dan pembukaan lahan memungkinkan mereka yang menjalankan operasi tersebut untuk mengurangi risiko dan meningkatkan aktivitas mereka sekaligus menghemat biaya. Perbudakan dan kerja paksa juga banyak digunakan dalam operasi yang memerlukan deforestasi atau pembukaan lahan terlebih dahulu, seperti pertambangan, pertanian, atau produksi arang.

#### **4.5 Pentingnya seleksi dan pemantauan**

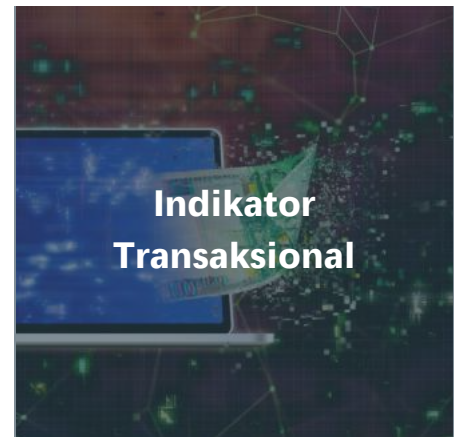
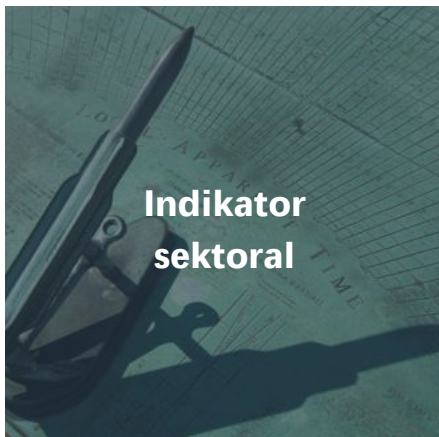
Mengingat potensi konvergensi yang luas ini, perusahaan perlu memahami sepenuhnya kemungkinan hubungan antara kegiatan konversi lahan dan predicate crime, mengintegrasikan tipologi yang berkembang ini ke dalam sistem seleksi dan pemantauan mereka untuk lebih memahami eksposur dan risiko mereka, dan untuk menghindari pelanggaran peraturan. Panduan ini akan mengemas bidang-bidang konvergensi ini menjadi tanda bahaya praktis yang dapat dimasukkan oleh perusahaan ke dalam pengendalian yang ada, termasuk:



© Andre Dib / WWF-Brazil



Indikator geografis (sumber risiko tinggi, wilayah transit dan tujuan, serta jalur perdagangan)



Hal ini juga akan menjadi dasar alat penilaian risiko digital yang dapat digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi eksposur mereka terhadap predicate crime yang terkait dengan aktivitas konversi lahan. Panduan ini juga akan berisi bagian-bagian yang memerinci studi kasus yang relevan dan panduan tentang cara membangun kerangka kerja strategis yang efektif untuk mengelola risiko terkait konversi lahan (dan, kemudian, terkait kejahatan lingkungan lainnya), dalam istilah dan bahasa yang mudah dipahami oleh perusahaan (termasuk sistem dan alat, kebijakan dan proses, pelatihan dan budaya, tata kelola, dan budaya wetika dan nilai atasan).

Pada akhirnya, Panduan ini akan mencakup bagian mengenai “suara global dalam menangani konversi lahan”, yang akan menampilkan upaya-upaya lokal dan internasional untuk memerangi aktivitas ilegal terkait konversi lahan.

Panduan ini juga akan mencakup bagian khusus mengenai tanda-tanda bahaya dan tipologi yang terkait dengan predicate crime terkait konversi lahan; oleh karena itu, hal ini tidak akan dijelaskan secara terperinci dalam laporan ini. Memahami tanda bahaya dan tipologi adalah kunci untuk memastikan penilaian dan pemantauan risiko predicate crime yang komprehensif, karena pola yang tampaknya tidak berhubungan dapat membantu mengungkap aktivitas yang mencurigakan.

Di bawah ini adalah contoh daftar indikator risiko korupsi dan penyuapan.

# INDIKATOR RISIKO KORUPSI DAN PENYUAPAN

- Komoditas atau produk awalnya bersumber dari negara dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi, misalnya negara yang terdaftar sebagai negara berisiko tinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International.
- Komoditas atau produk awalnya bersumber dari negara dengan sistem ekstraksi sumber daya dan penerbitan lisensi yang tidak jelas, termasuk wilayah dengan keterbatasan kehadiran otoritas untuk pemantauan dan penegakan hukum.
- Produk atau komoditas merupakan bagian dari rantai pasokan yang panjang dan terlalu rumit sehingga memungkinkan terjadinya penyuapan dan korupsi dalam siklus pencarian pemasok, pengadaan, atau pengiriman.
- Kekayaan atau aktivitas tunai seseorang yang tidak dapat dijelaskan, terutama yang tidak memiliki hubungan bisnis atau riwayat komersial yang jelas, yang melibatkan pejabat senior, orang-orang yang terpapar politik (PEP), atau kerabat dari rekanan dekat (RCA) PEP, terutama mereka yang memiliki tanggung jawab terkait dengan manajemen atau pelestarian sumber daya alam.
- PEP atau RCA mereka memanfaatkan struktur perusahaan yang rumit ketika menjalankan bisnis di sektor yang berisiko lebih tinggi seperti kehutanan atau pertambangan.
- PEP atau pejabat publik yang bertanggung jawab atas pengelolaan atau perlindungan lingkungan melakukan perjalanan ke yurisdiksi luar negeri untuk kegiatan bisnis yang dirahasiakan.
- Surat keterangan asal atau dokumen lain yang tampak menyesatkan, tidak akurat, atau mencurigakan.
- Perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan atau kehutanan memegang kontrak dengan penyedia layanan atau kegiatan pemerintah lain yang tidak terkait.
- Individu dan entitas yang disebutkan oleh penegak hukum, media, atau jurnalis investigasi terlibat dalam penyuapan, korupsi, lingkungan hidup, atau kejahatan terorganisir lainnya.



# 5

## STUDI KASUS

Studi kasus berikut menggambarkan beberapa cara serangkaian predicate crime menyatu dengan konversi lahan dan bagaimana tipologi tertentu digunakan untuk memfasilitasi, mengaburkan, atau mencuci hasil dari kegiatan ilegal yang terkait.

Studi kasus lainnya akan diberikan dalam Panduan ini sebagai ilustrasi bagi perusahaan, serta daftar terperinci mengenai tanda bahaya dan tipologi yang sesuai dengan setiap jenis kejahatan.

### 5.1 Penggelapan sapi di Amerika Selatan dan Tengah

Sapi dapat “dicuci” (jika mereka digembalakan di lahan yang telah dibuka secara ilegal dan diubah menjadi padang rumput) dan digunakan sebagai sarana pencucian hasil kejahatan dari eksploitasi lain, seperti perdagangan narkoba.

Di Brasil, sapi telah “dicuci” untuk mengaburkan kaitannya dengan pembukaan lahan, ketika mereka dipindah dari peternakan yang berkontribusi terhadap konversi lahan ke peternakan “bersih” yang tidak mengakibatkan hilangnya hutan baru-baru ini.

Pada tahun 2009, beberapa rumah potong hewan di Brasil menandatangani Ketentuan Penyesuaian Perilaku, sebuah inisiatif dari Kantor Kejaksaan Federal dan Komitmen Publik mengenai Peternakan Hewan Ternak, dan sebuah protokol sukarela yang dikembangkan oleh Greenpeace, yang melarang mereka membeli sapi yang dipelihara di lahan deforestasi. Namun, seekor sapi mungkin melewati hingga 10 peternakan sebelum disembelih (sejak lahir, hingga pemeliharaan dan penggemukan). Peternakan-peternakan tersebut mungkin terkait dengan deforestasi ilegal, namun banyak rumah potong hewan menilai keterkaitan dengan deforestasi hutan hanya terjadi pada peternakan terakhir yang dilewati sapi, yaitu pemasok langsung mereka. Selama peternakan terakhir dalam rantai pasokan berasal dari peternakan yang “bersih” dan bebas dari deforestasi yang belum lama terjadi, rumah potong hewan (dan perusahaan pengangkut serta pengecer berikutnya, seperti supermarket) kemungkinan besar akan menandai peternakan tersebut sebagai peternakan bebas deforestasi, bahkan jika sapi tersebut telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dan telah melewati sembilan peternakan lain yang telah dikonversi dari lahan hutan. Memang benar, data menunjukkan bahwa beberapa peternak memiliki peternakan yang “kotor” dan “bersih” dan mencuci sapi melalui properti mereka sendiri. Selama satu properti tetap bersih, mereka dapat terus membuka lahan untuk tujuan penggembalaan sapi di sejumlah peternakan lainnya.

Investigasi lain yang dilakukan oleh Global Witness menemukan bahwa para peternak telah dengan curang menggeser batas-batas peternakan mereka setelah membuka lahan, sehingga konversi lahan ini tidak lagi termasuk dalam lingkup properti dan peternakan tersebut tampak bebas dari deforestasi. Hal ini diduga terjadi pada Peternakan Fazenda Espora de Ouro II di negara bagian Pará, Brasil, yang juga ditemukan oleh Global Witness sepertinya terdaftar atas nama individu yang tidak dapat menjadi pemiliknya secara sah (berdasarkan penilaian terhadap database hak atas tanah dan penerima manfaat).

3

Sapi dijual ke rumah potong hewan yang hanya melakukan pemeriksaan terhadap pemasok langsung mereka – peternakan penggemukan

2

Sapi dijual ke peternakan penggemukan yang bebas dari deforestasi

1

Sapi dilahirkan dan dibesarkan di lahan yang baru saja ditebangi dan diubah menjadi padang rumput

4

Rumah potong hewan menjual daging ke pengecer

5

Daging tampaknya bebas deforestasi



© Jeffrey Shwartz Via Canva.com

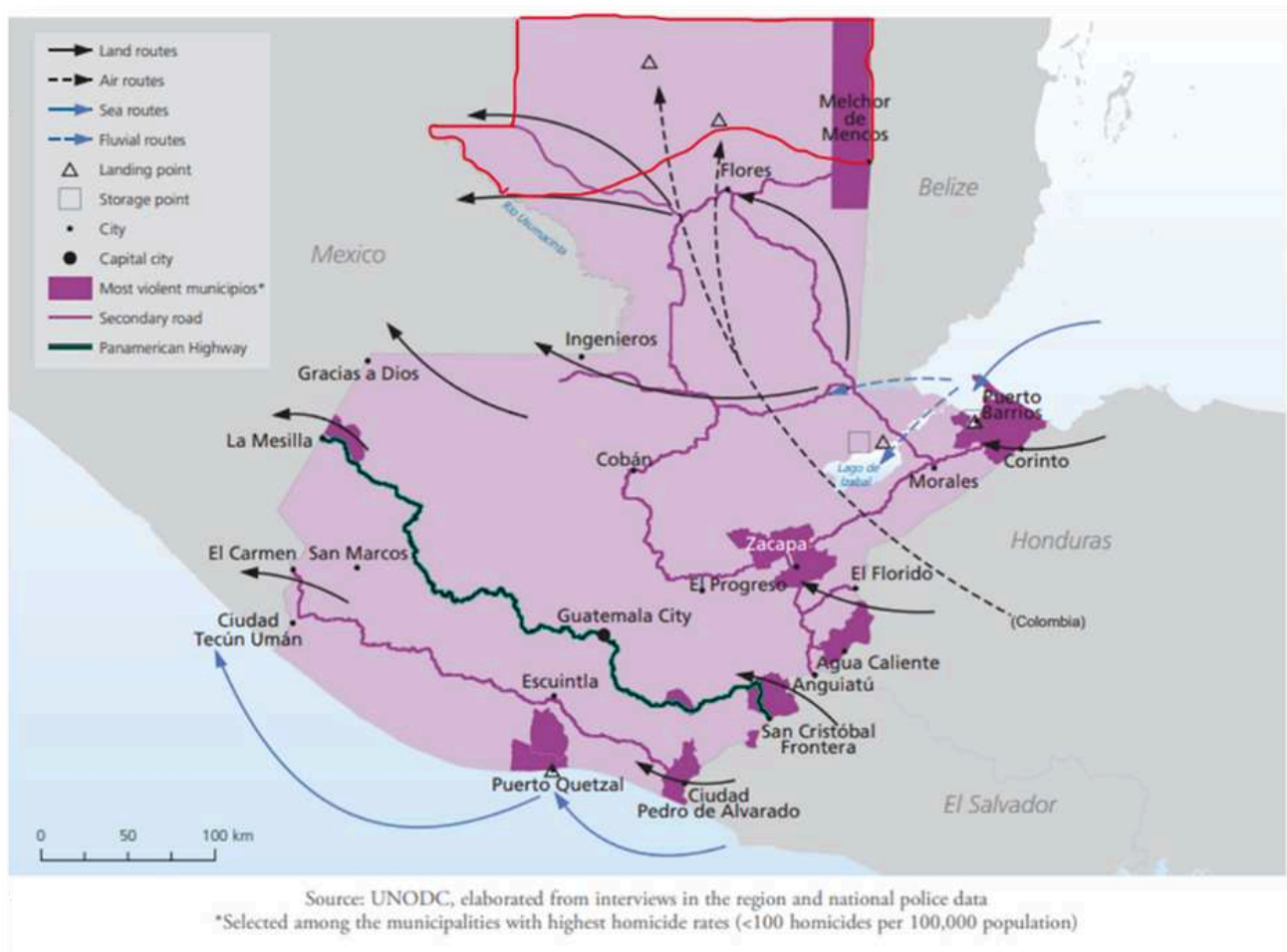
Berdasarkan data dari: <https://www.vox.com/science-and-health/2022/10/19/23403330/amazon-rainforest-deforestation-cattle-laundering>.



Sapi juga dapat – dan secara bersamaan – digunakan sebagai alat pencucian hasil kegiatan terlarang. Para penyelundup narkoba – terutama di Kolombia (tempat ketertelusuran produk daging sapi sangat buruk), Honduras, dan Guatemala – diketahui mencuci pendapatan dari narkoba dengan membeli atau merampas tanah yang mereka ubah menjadi padang rumput untuk sapi, yang juga mereka beli dengan hasil penyelundupan narkotika. Ketika hewan ternak dijual, keuntungannya sulit ditelusuri kembali ke jaringan narkoba dan hasil ilegalnya dicuci secara efektif. Praktik ini, yang dikenal sebagai “peternakan narkoba”, diduga berkontribusi hingga 87% deforestasi di Cagar Maya Biosphere, sebuah kawasan hutan warisan UNESCO yang mencakup lebih dari 2 juta hektar hutan hujan di Guatemala utara dan berbatasan dengan hutan lindung lainnya di Meksiko dan Belize. Cagar Alam ini sangat rentan terhadap deforestasi yang dilakukan oleh kelompok kejahatan karena lokasinya yang strategis di sepanjang jalur penyelundupan narkoba yang signifikan melalui Guatemala dan Meksiko menuju ke AS.

Peternakan sapi di wilayah tersebut juga sering berfungsi untuk menyembunyikan landasan udara dan fasilitas produksi yang digunakan oleh penyelundup untuk memproduksi dan mengangkut narkoba atau produk terlarang lainnya. Landasan udara kini memenuhi cagar Maya Biosphere, yang digunakan oleh pesawat yang datang dari Kolombia dan Venezuela untuk membawa kokain untuk diselundupkan melintasi perbatasan ke Meksiko.

**GAMBAR 6: JALUR PERDAGANGAN KOKAIN KE GUATEMALA MELALUI CAGAR MAYA BIOSPHERE (BERGARIS BATAS MERAH)**



Sumber: [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC\\_Central\\_America\\_and\\_the\\_Caribbean\\_english.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_english.pdf)

## 5.2 Pencucian emas yang ditambang secara ilegal di Kolombia

Penambangan emas ilegal diketahui merupakan masalah serius di Kolombia - hal ini terlihat dari fakta bahwa Kolombia mengekspor lebih banyak emas dibandingkan produksi resminya. Menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), operasi penambangan ilegal di Kolombia terjadi di lebih dari 970 lokasi, dengan luas lebih dari 64.000 hektar - dan pada tahun 2020, diperkirakan 69% emas di negara tersebut ditambang secara ilegal.

Pada tahun 2019, tim jaksa dari Kantor Kejaksaan Agung Kolombia memimpin operasi yang dijuluki Leyenda del Dorado (Legenda Emas) untuk membongkar jaringan dugaan pemasok emas ilegal, termasuk C.I.J. Gutiérrez (CIJG), salah satu perusahaan emas terbesar di negara ini. Perusahaan ini menimbulkan kecurigaan pihak berwenang ketika catatan pajak dan bea cukai menunjukkan bahwa mereka mengekspor emas senilai sekitar USD146.000 pada tahun 2006 menjadi lebih dari USD453.000 enam tahun kemudian. Tinjauan terhadap transaksi keuangan CIJG selama satu dekade terakhir mengungkap operasi fiktif yang digunakan untuk mencuci uang senilai sekitar USD740 juta dan memungkinkan penjualan emas yang ditambang secara ilegal di pasar global yang legal. Tujuan ekspor utama untuk emas CIJG adalah AS dan Swiss, yang menunjukkan betapa mudahnya emas ilegal yang berasal dari aktivitas terkait konversi lahan dapat menembus pasar-pasar tersebut. Memang benar, perusahaan emas terlibat dalam sekitar seperempat dari seluruh transaksi mencurigakan di FinCEN Files, sebuah investigasi yang diterbitkan pada tahun 2020 mengenai aliran keuangan gelap di seluruh dunia.

Suatu investigasi pada tahun 2016 menemukan bahwa sekitar 8% dari 100.000 klaim penambangan yang terdaftar di Badan Pertambangan Nasional Kolombia didaftarkan kepada penambang skala kecil atau penambang subsisten, yang dikenal sebagai “barequeros” (pendulang emas tradisional di tepi sungai tanpa menggunakan mesin) yang entah sudah mati atau tidak pernah ada. Perusahaan menggunakan barequeros palsu ini sebagai alias untuk ‘membuktikan’ bahwa emas telah diperoleh secara sah melalui operasi penambangan resmi – yang merupakan prasyarat hukum jika mereka ingin mengekspor logam mulia tersebut. Jaksa mengaitkan praktik ini dengan CIJG ketika mereka menemukan bahwa dua pria yang terbunuh telah terdaftar sebagai barequeros dan pemasok emas bagi perusahaan tersebut.

Izin penambangan barequeros yang didaftarkan oleh CIJG digunakan untuk tujuan perdagangan dan mengirimkan transaksi senilai jutaan dolar, namun tanpa bukti atas aktivitas penambangan terkait (menunjukkan bahwa penambangan tersebut dilakukan secara tidak sah di tempat lain). Hal ini memungkinkan pencucian uang dalam jumlah besar di luar negeri dan emas yang ditambang secara ilegal dijual di pasar resmi di Eropa dan Amerika.

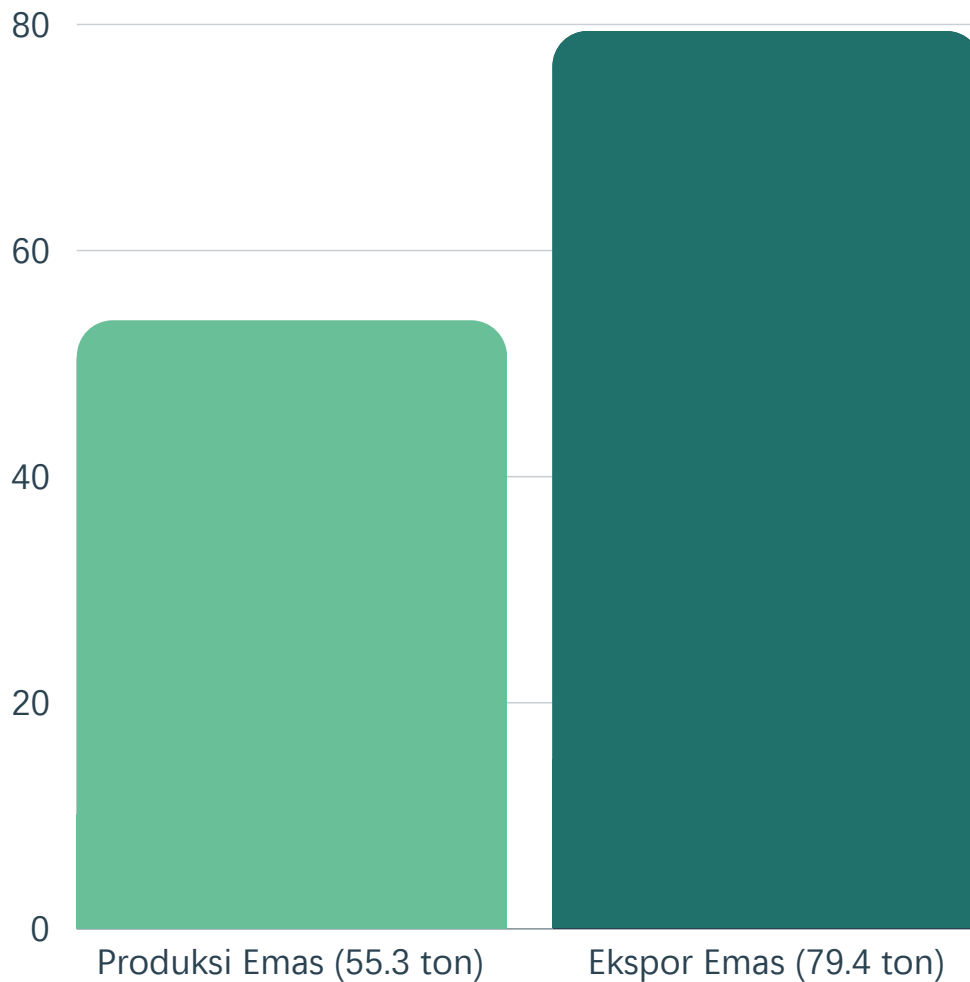
Eksekutif dari perusahaan pertambangan emas Kolombia lainnya, C.I. Goldex, juga ditangkap pada tahun 2015 atas tuduhan memalsukan transaksi jutaan dolar, termasuk pemalsuan tanda tangan dan sidik jari.





**GAMBAR 7: PERBEDAAN DATA EKSPOR DAN IMPOR EMAS KOLOMBIA, MENUNJUKKAN TINGGINYA PENAMBANGAN ILEGAL**

**Data produksi emas Kolombia versus data ekspor emas dalam ton untuk tahun 2021**



© Aine / Themis

### **5.3 Penyuaan, korupsi, penghindaran pajak, dan pelanggaran hak asasi manusia di sektor kelapa sawit dan penebangan kayu di Papua Nugini**

Sekitar tahun 2000, Malaysia mengalami deforestasi dengan laju yang lebih cepat dibandingkan negara lain di dunia, kehilangan 14% hutan hujannya – sebagian besar karena perkebunan kelapa sawit – hanya dalam waktu 12 tahun. Meningkatnya pengawasan dan tekanan terhadap perusahaan-perusahaan Malaysia dan peran mereka dalam konversi lahan pada dekade-dekade berikutnya mendorong mereka untuk mencari peluang bisnis baru di tempat lain, dan hutan perawan di Papua Nugini tampaknya merupakan alternatif yang menguntungkan. Dengan pesatnya perpindahan perusahaan kelapa sawit Malaysia ke wilayah tersebut, Papua Nugini menjadi salah satu eksportir kayu tropis terbesar di dunia, dengan banyak perusahaan yang ingin memaksimalkan keuntungan dengan menanam perkebunan kelapa sawit di lahan yang baru saja ditebang untuk diambil kayunya. Saat ini, Papua Nugini adalah salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia dan minat mereka terhadap pasar semakin meningkat, seiring dengan rencana peningkatan produksi sepuluh kali lipat pada tahun 2030.

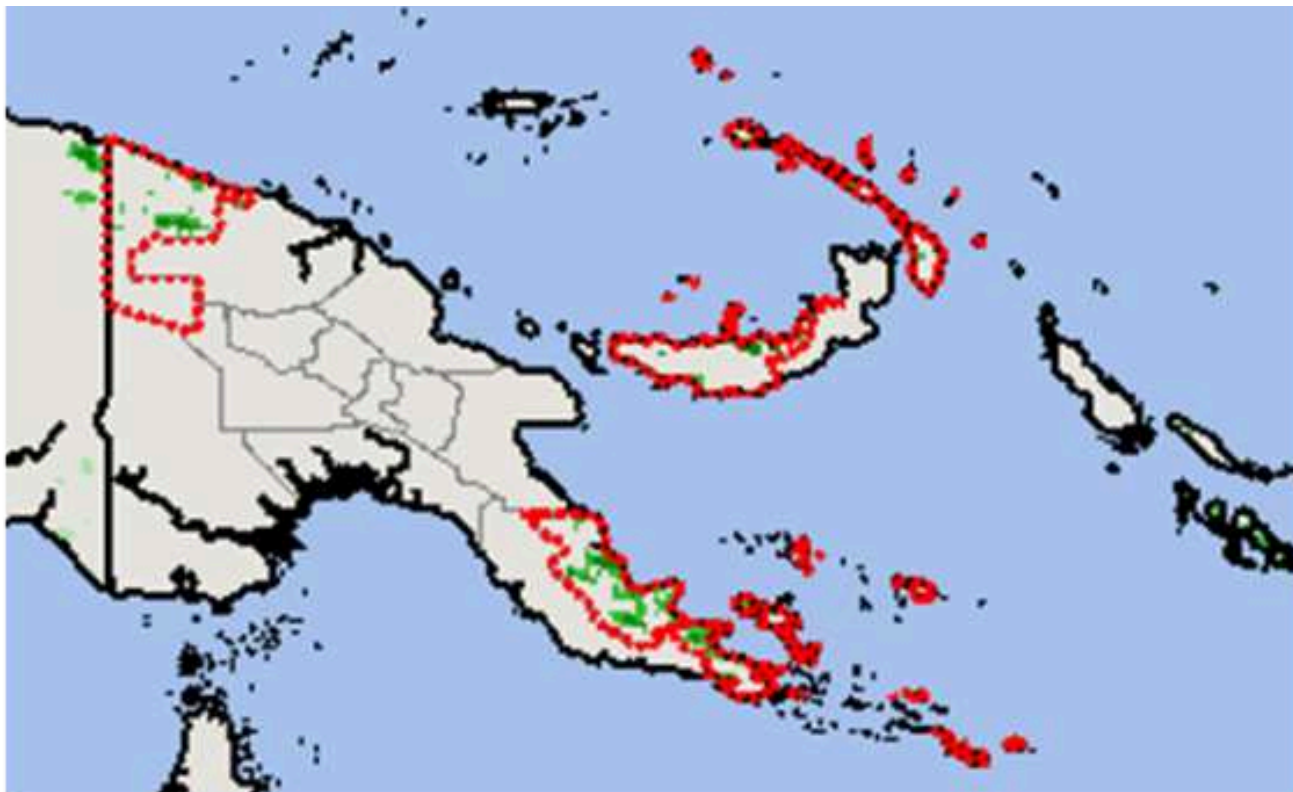
Dalam suatu investigasi yang dilakukan oleh Global Witness pada tahun 2022, beberapa manajer perkebunan kelapa sawit dilaporkan mengakui adanya korupsi dan pelanggaran ketenagakerjaan yang terjadi selama lima tahun terakhir, termasuk mantan wakil administrator provinsi untuk East New Britain (sebuah wilayah di negara tersebut) yang kemudian menjadi seorang direktur pendiri Tobar Investment Ltd., sebuah perusahaan pertanian yang terdaftar di Papua Nugini. Menurut Global Witness, perusahaan tersebut (yang beroperasi bersama East New Britain Palm Oil Ltd (ENBPOL) – bagian dari East New Britain Resources Group (ENBRG) yang didukung Malaysia – berdasarkan perjanjian usaha patungan), juga menyuap kepolisian setempat untuk melakukan penggerebakan dengan kekerasan di sebuah desa untuk melakukan tindakan brutal terhadap penduduk setempat yang menolak perkebunan dan aktivitas kelapa sawit.

Manajer pengadaan tanah dari perusahaan lain yang terdaftar di Papua Nugini (Tzen Niugini, dimiliki oleh Kenlox Global Limited, yang berdomisili di suaka pajak dan kerahasiaan Kepulauan Virgin Britania Raya namun memiliki direktur dan pemegang saham asal Malaysia) dituduh membual tentang penggunaan korupsi dan penyuapan yang dilakukannya pejabat pemerintah untuk mendapatkan izin penebangan dan akses lahan. Para eksekutif perusahaan juga dilaporkan mengakui menggunakan pekerja anak, dengan mempekerjakan pekerja berusia 10 tahun di perkebunan, meskipun undang-undang nasional menyatakan bahwa anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak boleh dipekerjakan dalam pekerjaan berat.

Investigasi itu juga mengungkap skema yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan ini untuk menghindari bea masuk di India. Kepala eksekutif ENBRG dilaporkan mengakui bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Nugini berpura-pura bahwa minyak sawit mereka diekspor dari Malaysia, karena impor minyak sawit mentah Malaysia dikenakan pajak yang lebih ringan dibandingkan impor minyak sawit mentah di Papua Nugini.

Banyak nama merek produk rumah tangga terlibat dalam penyelidikan Global Witness, sebaai pembeli minyak sawit dan turunannya diproduksi dalam kondisi seperti ini.

**GAMBAR 8: WILAYAH UTAMA PRODUKSI MINYAK KELAPA SAWIT DI PAPUA NUGINI (MENCAKUP 80% DARI OUTPUT NASIONAL) TAHUN 2022**



*Sumber: Foreign Agricultural Service, Departemen Pertanian AS*



Pada tahun 2023, Komisi Pendapatan Internal (IRC) Papua Nugini juga mengumumkan bahwa mereka telah mengenakan pajak sebesar USD40 juta terhadap operator penebangan kayu terkemuka (yang identitasnya, pada saat penulisan artikel ini, dirahasiakan) karena terlibat dalam penghindaran pajak melalui transfer pricing. Penetapan harga transfer ini menyebabkan penilaian yang terlalu rendah terhadap harga kayu gelondongan yang dijual dan diekspor ke perusahaan dalam grup multinasional yang sama (hubungan yang ingin disamarkan oleh kelompok tersebut melalui kepemilikan di luar negeri), untuk mengalihkan keuntungan ke perusahaan di yurisdiksi pajak lebih rendah, mengurangi margin keuntungan dan karenanya kewajiban pajak di Papua Nugini.

IRC menganalisis kinerja keuangan operator penebangan, yang menunjukkan bahwa mereka berada dalam posisi yang terlalu buruk untuk dapat secara realistis mempertahankan diri dan terlibat dalam perilaku usaha yang wajar dan lazim dengan pihak-pihak independen (seperti yang mereka lakukan dengan anak-anak perusahaan yang tidak diumumkan).

IRC mengakui keberhasilannya dalam penyelidikan ini sebagian besar disebabkan oleh kemajuan dalam kerja sama perpajakan internasional dalam beberapa tahun terakhir, serta “alat canggih” seperti standar pertukaran informasi, yang memungkinkan IRC memperoleh informasi tentang wajib pajak asing dari administrasi pajak di yurisdiksi lain dan mengonfirmasi keterkaitan yang dicurigai. Perlu dicatat bahwa peserta dalam kelompok fokus yang diadakan sebagai bagian dari proyek ini juga mencatat pentingnya aliran data yang bebas dan budaya serta kerangka kerja berbagi informasi antar yurisdiksi dan lembaga.

Data yang membantu IRC mengonfirmasi hubungan terkait dengan:



Manajemen (direktur yang sama mengelola entitas yang konon tidak terkait)



Kepemilikan saham dan kepentingan bersama (orang yang sama memegang saham di entitas yang konon tidak terkait)



Pengaturan yang tidak akan mungkin dilakukan antara pihak-pihak yang independen dan tidak berhubungan



Laporan keuangan yang mencantumkan kedua perusahaan sebagai pihak berelasi.

Penghindaran pajak ini, kata IRC dalam pengumumannya, setara dengan sekitar USD2,2 juta dan merampas infrastruktur, keamanan, kesehatan, dan pendidikan yang sangat dibutuhkan warga Papua Nugini, serta barang dan jasa publik lainnya, yang tanpanya negara tidak dapat menjamin pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.



# 6

## PANDANGAN DARI LEMBAGA KEUANGAN:

### HASIL SURVEI YANG MENILAI KESADARAN DAN SIKAP INDUSTRI TERHADAP KONVERSI LAHAN DAN KEJAHATAN DASAR YANG TERKAIT

Ketika menyangkut isu-isu seperti konversi lahan, sektor keuangan semakin dipandang sebagai mekanisme untuk memanfaatkan perubahan positif (dan, oleh karena itu, juga dimintai pertanggungjawaban ketika sektor ini menutup mata). Fokus pada sistem keuangan ini berasal dari keunikan posisinya, tempat berbagai aliran ilegalitas yang terkait dengan konversi lahan bersinggungan dan oleh karena itu dapat dideteksi dan dicegah, serta kekuatannya, dalam memberikan dukungan keuangan yang penting bagi proyek dan perusahaan di seluruh dunia. Oleh karena itu, sektor ini memiliki kemampuan khusus untuk meminta pertanggungjawaban dunia usaha, dan untuk melemahkan pelaku usaha ilegal dan kriminal.

Untuk laporan ini, 644 profesional dari gabungan lembaga keuangan besar dan UKM di 17 negara\* mengisi survei yang berupaya memahami sikap dan pendekatan dalam mengelola risiko konversi lahan di seluruh industri. Analisis dilengkapi dengan lokakarya kelompok fokus dan wawancara individu dengan pakar risiko dan kepatuhan serta pakar tematik di bidang kejahatan lingkungan dan keuangan.

\* Responden survei kami bekerja untuk lembaga keuangan di:





GAMBAR 9: TANTANGAN UTAMA UNTUK MENGATASI EKSPOSUR SEKTOR KEUANGAN TERHADAP KONVERSI LAHAN, SEPERTI YANG DIPAHAMI OLEH PESERTA DISKUSI KELOMPOK TERARAH



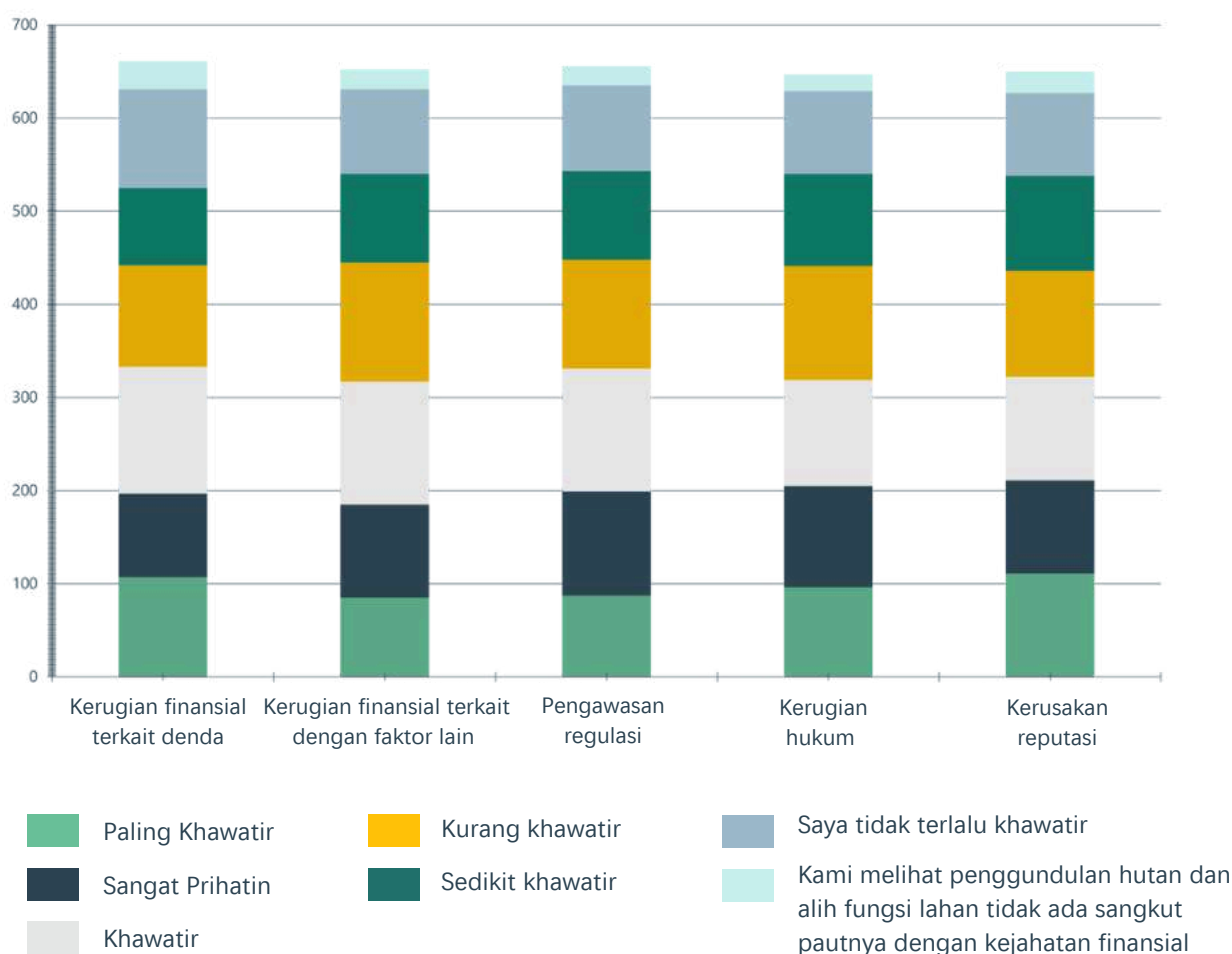
© Lizzie / Themis

## 6.1 Kesadaran, penentuan prioritas, dan sikap

### 6.1.1 Sebuah masalah bersama

Responden survei tampaknya sama khawatirnya dengan potensi **kerusakan reputasi, peraturan, hukum, dan keuangan** yang dihadirkan bagi mereka oleh keterkaitan dengan kejahatan keuangan terkait konversi lahan, seperti yang diilustrasikan oleh diagram di bawah ini. Pada setiap kategori, sejumlah kecil responden (antara 2,8% dan 4,5%) menyatakan bahwa mereka melihat konversi lahan “tidak terkait kejahatan keuangan”.

**GAMBAR 10: HARAP NILAI KEKHAWATIRAN ORGANISASI ANDA TERHADAP KEJAHATAN KEUANGAN YANG TERKAIT DENGAN KONVERSI TANAH (HARAP DIURUTKAN BERDASARKAN KEPENTINGANNYA)**



© Lizzie / Themis

Distribusi respons yang cukup merata ini menunjukkan perlunya **beberapa tindakan terpadu** baik secara internal (dengan masukan dari beberapa departemen berbeda (termasuk perspektif kepatuhan, serta komunikasi dan humas) dan eksternal (dengan saran dan inisiatif dari LSM, serta pemerintah dan badan penasihat) mungkin merupakan cara yang paling menarik dan berhasil untuk **melibatkan para pengambil keputusan utama** dalam perusahaan.

### 6.1.2 Perundang-undangan dan regulasi merupakan insentif utama

Data dari kelompok fokus mendukung hal ini, yang menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mengetahui laporan dari LSM mengenai pentingnya mengatasi konversi lahan dan peran sektor keuangan dalam hal ini, serta potensi berita merugikan seputar kegiatan mereka dan kegiatan rekan-rekan mereka, hal ini **tidak cukup menarik** bagi mereka untuk **berkomitmen penuh terhadap 'pembiayaan bebas konversi'**. Hal serupa juga terjadi pada regulasi mandiri industri, yang tidak dianggap oleh peserta diskusi kelompok fokus sebagai pendorong perubahan yang cukup dalam hal konversi lahan. Sebaliknya, banyak pihak yang menyatakan bahwa, benar atau salah, suatu pemikiran yang optimis untuk menganggap bahwa banyak lembaga keuangan akan berkomitmen untuk melakukan tindakan afirmatif yang kuat **tanpa regulasi dan undang-undang yang jelas** yang memperjelas tanggung jawab dan kewajiban mereka dalam hal ini. Meskipun **kerangka kerja sukarela** merupakan komponen penting dari pendekatan sektoral menuju pembiayaan bebas konversi, kerangka kerja sukarela **bukanlah pengganti supremasi hukum**.



Instrumen hukum dan peraturan membantu lembaga keuangan untuk menuntut atau membenarkan alokasi sumber daya tambahan (termasuk pelatihan, teknologi, dan staf tambahan) dan kemungkinan hilangnya klien tertentu dari komoditas dengan risiko konversi tinggi yang mungkin memerlukan peralihan ke model bebas konversi. , serta terbukti memperburuk potensi dampak terhadap organisasi mereka jika mereka gagal mengatasinya secara memadai.

Kebutuhan akan peraturan dan perundang-undangan yang kuat terkait dengan konversi lahan juga diamini oleh FATF, yang mengungkapkan kekhawatirannya atas **“kurangnya tindakan pemerintah yang proporsional”** yang saat ini diambil oleh berbagai negara untuk mendeteksi dan memutus aliran keuangan yang terkait dengan kejahatan lingkungan hidup. FATF telah meminta negara-negara untuk meninjau kembali eksposur risiko mereka – terutama mengingat bahwa “hasil dari kejahatan lingkungan hidup sama besarnya dengan kejahatan keuangan lainnya yang menghasilkan USD110 hingga 281 miliar per tahun”, dan bahwa kejahatan kehutanan, pembukaan lahan ilegal dan pertambangan – serta perdagangan sampah – menyumbang 66% dari jumlah tersebut.

### 6.1.3 Sumber daya yang memadai

Peserta penelitian juga menyampaikan perlunya **pelatihan** dan **sumber daya** khusus konversi lahan yang menargetkan lembaga keuangan untuk membantu perusahaan mengatasi hambatan yang ada, termasuk kurangnya **prioritisasi internal, kemauan kelembagaan, dan pendanaan**. Sebagai bagian dari hal ini, pentingnya menjadikan pelatihan spesifik untuk berbagai peran pekerjaan dan aktivitas bisnis ditekankan, sehingga pelatihan tersebut benar-benar mempertimbangkan dan mengatasi tantangan, kekhawatiran, dan sudut pandang tertentu.

### 6.1.4 Risiko dan peluang

Selama diskusi kelompok fokus, para profesional menggarisbawahi pentingnya menggambarkan potensi kerugian nilai yang besar terkait dengan konversi lahan bagi perusahaan, untuk lebih mendorong pembuatan prioritas internal terhadap permasalahan tersebut. Mereka menekankan bahwa agar tindakan yang berarti dapat terwujud, perlu ditunjukkan bahwa konversi lahan merupakan risiko yang bersifat material secara finansial; tanpa ini, hal itu tidak akan diprioritaskan. Disarankan bahwa hal ini dapat mencakup penyediaan “kasus bisnis” bagi lembaga keuangan, membingkai permasalahan tersebut sebagai peluang untuk menghasilkan pendapatan dan – sebisa mungkin – upaya untuk mengukur risiko yang ditimbulkan oleh konversi lahan.



## Sumber informasi dan dukungan

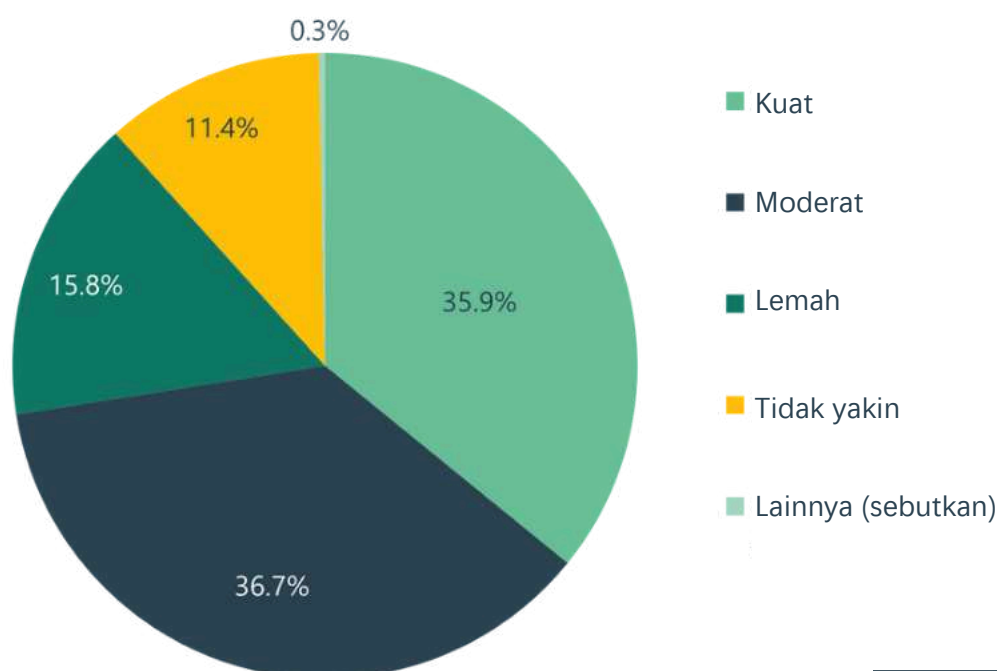
Responden menyatakan bahwa mereka berpendapat bahwa laporan (38,6%), kemitraan publik-swasta (32,7%), dan komitmen internasional (31,9%) merupakan inisiatif dan sumber informasi, dukungan, dan motivasi yang paling berguna dalam upaya mengatasi permasalahan serupa (seperti perdagangan satwa liar ilegal dan risiko lingkungan yang lebih luas).

### 6.1.5 Kebijakan dan kontrol

Lebih dari 60% responden survei mengatakan bahwa **kebijakan** risiko konversi lahan belum ada (45,7%) atau belum dikembangkan atau sudah ada (18,6%) di perusahaan mereka. Hal ini konsisten dengan penelitian pada tahun 2023 yang dilakukan oleh LSM Global Canopy, yang menemukan bahwa tiga perempat (536) lembaga keuangan yang dinilai masih belum memiliki kebijakan deforestasi publik, dan hanya 10% (69) yang memiliki kebijakan deforestasi untuk komoditas yang memiliki risiko paling tinggi (produk sapi, kedelai, minyak sawit, dan produk kayu). Selain itu, 27,2% responden kami mengindikasikan bahwa organisasi mereka tidak memiliki langkah uji tuntas khusus untuk mengidentifikasi potensi kejahatan keuangan terkait dengan konversi lahan; dan 19,9% responden menyatakan bahwa konversi lahan tidak tercakup dalam pelatihan staf maupun kerangka tata kelola organisasi mereka. Hal ini penting karena hampir separuh (49,5%) responden juga menjawab bahwa organisasi mereka memiliki klien atau rekan bisnis di sektor atau negara yang terkait dengan tingkat konversi lahan yang lebih tinggi.

Data ini menyoroti **kesenjangan dalam pengetahuan kelembagaan** di seluruh industri, serta **kerentanan penting dalam sistem keuangan global** ketika menangani hasil kejahatan keuangan terkait konversi lahan, jika hampir setengah dari lembaga keuangan yang dijadikan sampel beroperasi dengan atau di sektor atau area berisiko tinggi namun lebih dari seperempatnya tidak melakukan uji tuntas terkait secara spesifik.

**GAMBAR 11: BAGAIMANA RESPONDEN MENILAI KESADARAN ORGANISASI DAN PEMAHAMAN PERUSAHAAN TERHADAP RISIKO KEJAHATAN KEUANGAN YANG TERKAIT DENGAN KONVERSI TANAH?**





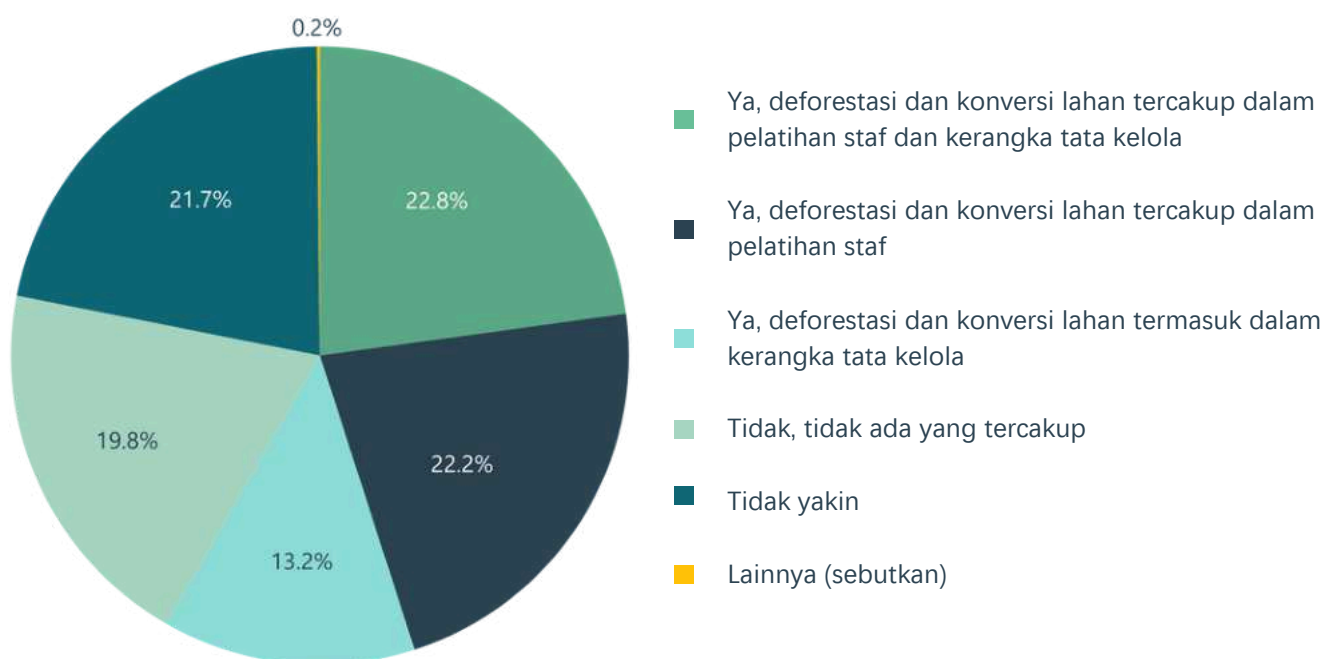
## 6.1.6 Variasi regional dalam kesadaran

Responden survei dari **Indonesia** dan **Brasil** termasuk di antara mereka yang melaporkan **tingkat kesadaran dan pemahaman tertinggi** mengenai risiko kejahatan keuangan terkait dengan konversi lahan di perusahaan mereka – mungkin karena mereka berada di wilayah dengan risiko tinggi terhadap masalah ini. Sejumlah besar responden di Indonesia melaporkan tingkat kesadaran dan pemahaman yang kuat (50,0%) atau sedang (41,7%) mengenai risiko finansial yang terkait dengan deforestasi dan jenis konversi lainnya.

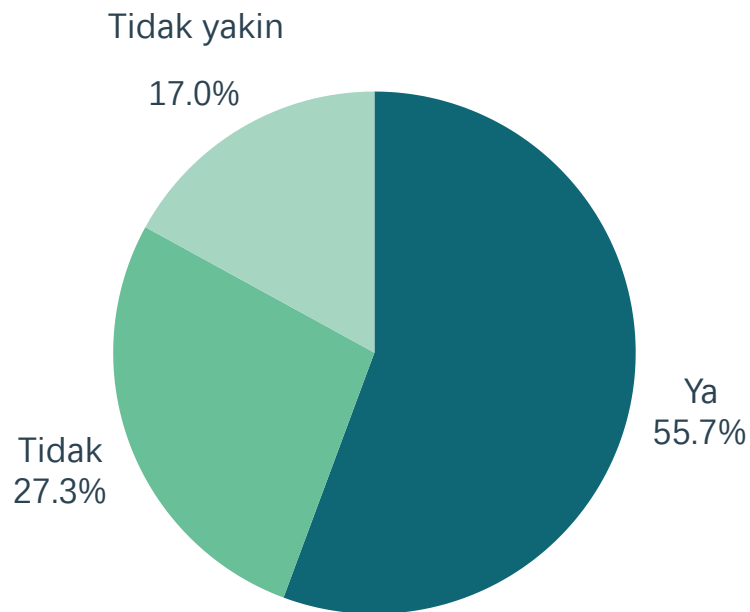
Sementara itu, di **Brasil**, 84,7% responden melaporkan tingkat kesadaran dan pemahaman yang kuat (38,5%) atau sedang (46,2%). Perlu dicatat bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman di kalangan profesional keuangan Brasil **berkorelasi dengan peningkatan regulasi mandiri** mengenai konversi lahan di antara lembaga-lembaga keuangan di negara tersebut. Misalnya, 81% lembaga keuangan di pasar kredit Brasil telah menandatangani perjanjian tahun 2023 antara Federasi Bank Brasil yang disebutkan di atas, yang mewajibkan perusahaan pengepakan daging dan rumah potong hewan yang mencari pembiayaan untuk menerapkan pemantauan lingkungan terhadap pemasok yang memelihara ternak di Amazon.

Hal ini semakin menyoroti **pentingnya pendekatan multi-aspek** terhadap pendidikan, peningkatan kesadaran dan pemberian insentif, serta regulasi dalam mendorong pemahaman perusahaan terhadap isu ini. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan seputar tingkat kesadaran yang berbeda-beda mengenai berbagai cara pembiayaan konversi lahan yang dilakukan oleh bank. Misalnya, meskipun pembiayaan langsung agribisnis mungkin teridentifikasi, penawaran umum perdana (IPO), pencatatan saham (listing), dan sarana investasi tidak boleh dimasukkan dalam kelompok yang sama; namun itu juga merupakan faktor penentu. (lihat Lampiran 2: Saran dan panduan dari badan internasional).

**GAMBAR 12: TAHUKAH ANDA JIKA ORGANISASI ANDA SAAT INI MEMASUKKAN DEFORESTASI DAN KONVERSI LAHAN KE DALAM KERANGKA TATA KELOLA ATAU PELATIHAN STAFNYA? PILIH SEMUA YANG SESUAI**

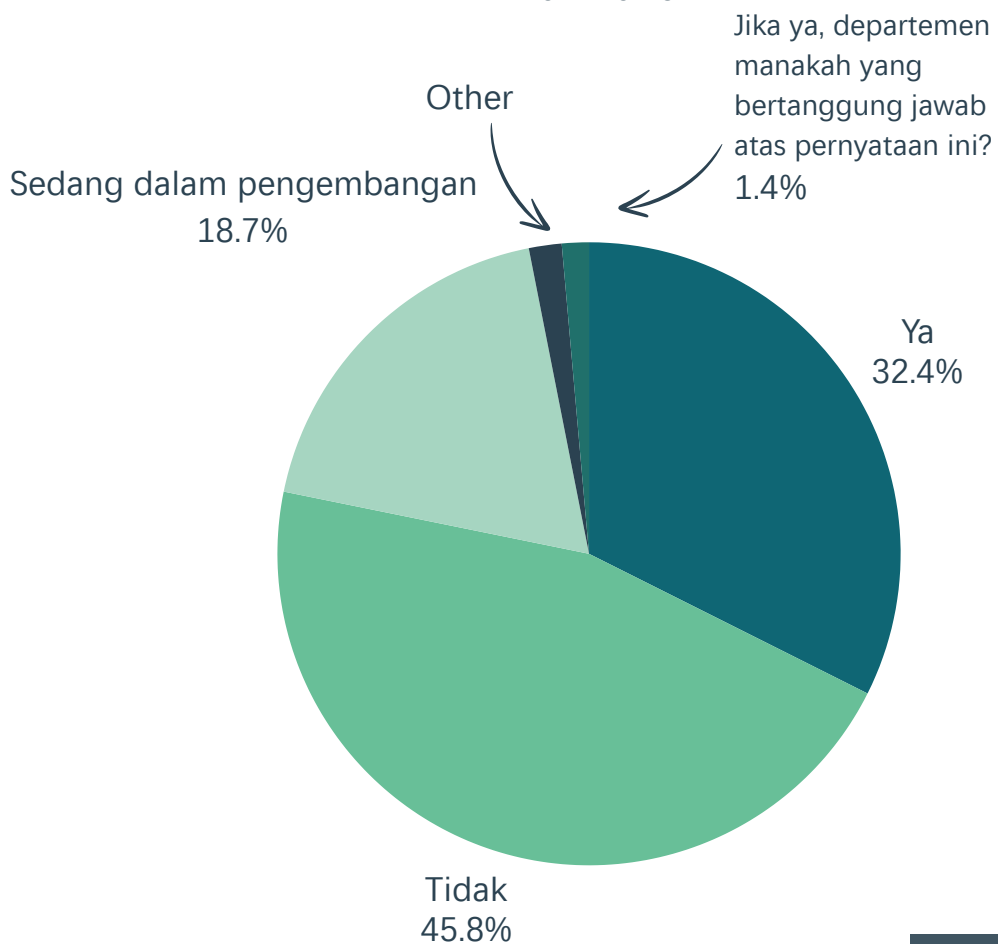


**GAMBAR 13: APAKAH ORGANISASI ANDA MENERAPKAN TINDAKAN UJI TUNTAS KHUSUS UNTUK MENGIDENTIFIKASI POTENSI KEJAHATAN YANG TERKAIT DENGAN DEFORESTASI DAN KONVERSI LAHAN? PILIH SALAH SATU**



© Aine / Themis

**GAMBAR 14: APAKAH ORGANISASI ANDA MEMILIKI KEBIJAKAN RISIKO DEFORESTASI DAN KONVERSI LAHAN? PILIH SALAH SATU**



© Aine / Themis

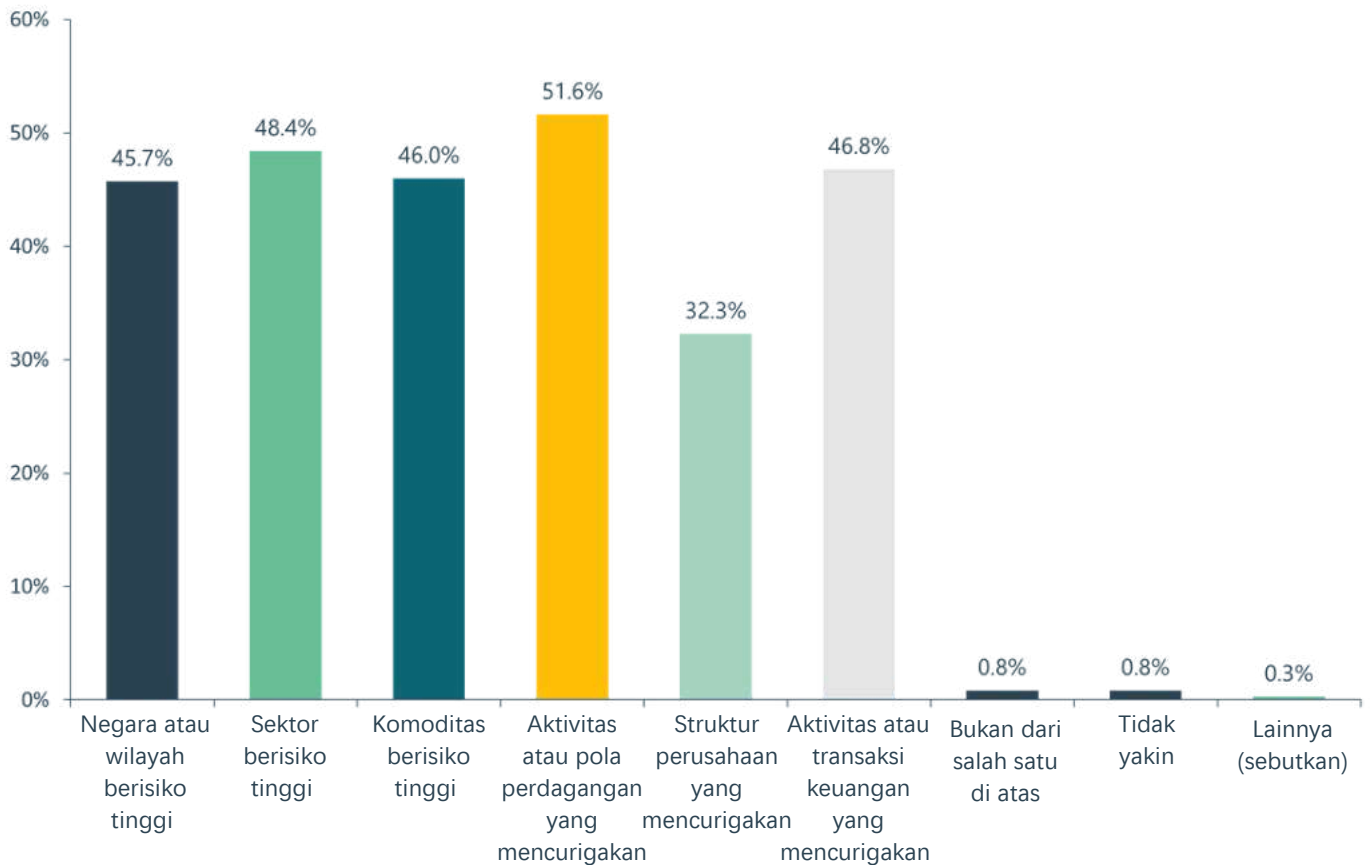


## 6.2 Tindakan seleksi dan pemantauan

Bagi responden yang mengatakan bahwa organisasinya memiliki serangkaian langkah uji tuntas khusus untuk mengidentifikasi potensi kejahatan keuangan yang terkait dengan deforestasi dan jenis konversi lahan lainnya, **pemantauan transaksi** (58,9%), **verifikasi identitas** (56,6%), dan **seleksi jaringan** (50,7%) adalah tiga tindakan teratas yang digunakan.

Sebanyak 58,5% responden mengatakan bahwa organisasi mereka menggunakan **indikator tanda bahaya** untuk mengidentifikasi potensi kejahatan keuangan yang terkait dengan konversi lahan, dan 16,8% responden tidak yakin apakah mereka melakukan hal tersebut. Indikator tanda bahaya teratas yang diidentifikasi melalui survei diuraikan dalam diagram di bawah ini.

**GAMBAR 15: INDIKATOR TANDA BAHAYA YANG DISELEKSI OLEH LEMBAGA KEUANGAN, PILIH SEMUA YANG BERLAKU**



© Lizzie / Themis

Responden survei menunjukkan **distribusi yang relatif merata pada tanda bahaya** yang diseleksi—meskipun relatif sedikit (16,5%) responden yang menyatakan bahwa mereka **memantau atau menyaring perusahaan secara berkala atau berkelanjutan**, dibandingkan pada tahap awal suatu hubungan, yang mengindikasikan adanya kerentanan di seluruh sektor, terutama eksposur risiko terhadap pelaku yang baru memulai aktivitas terlarang setelah mereka terdaftar di bank.

**TABEL 2: TANDA BAHAYA YANG DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN RESPONDEN SURVEI DAN TAHAP UJI TUNTAS YANG SESUAI**

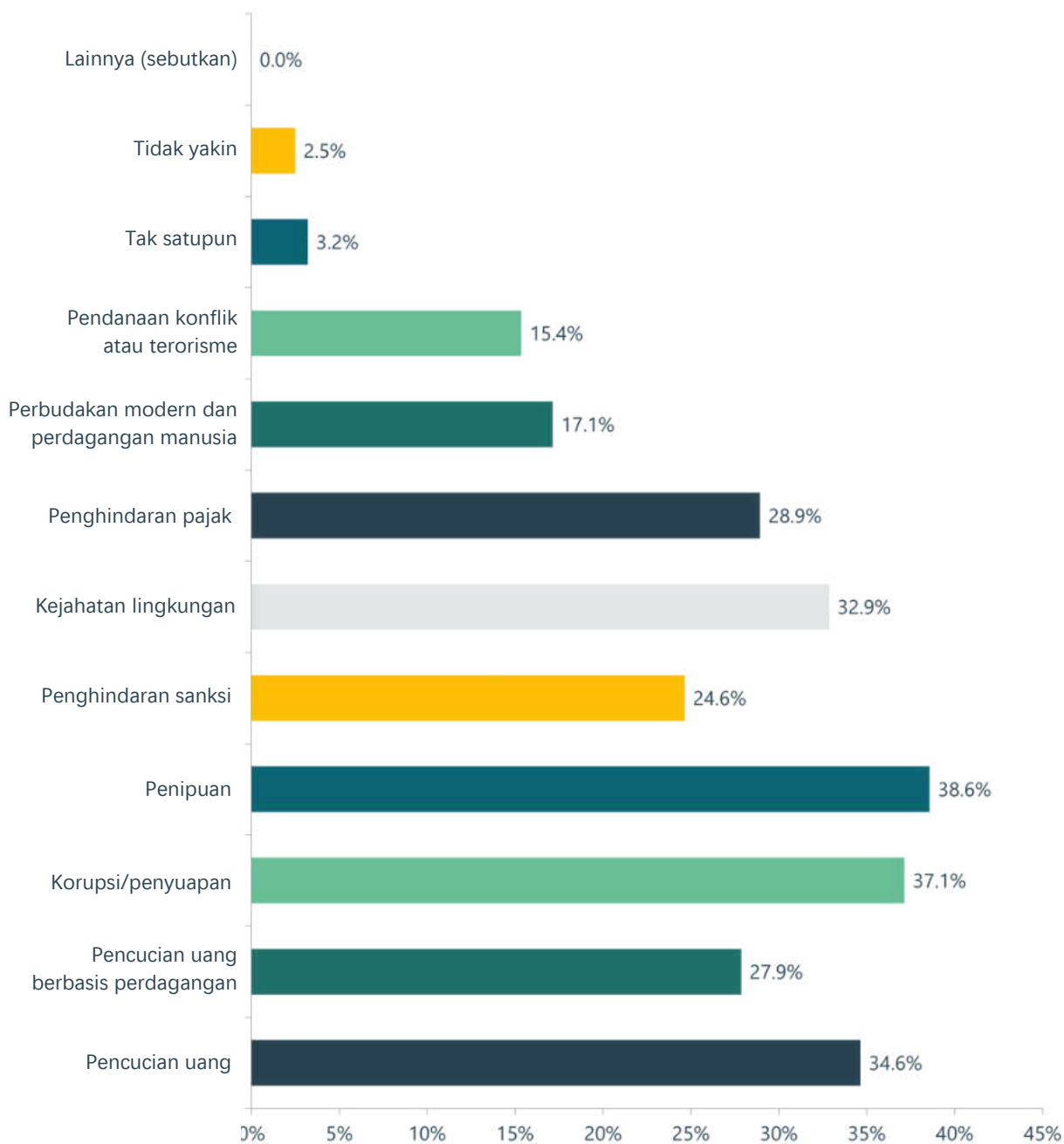
Tanda bahaya tertentu yang diseleksi selama uji tuntas	Tahapan dalam hubungan bisnis saat tanda bahaya diseleksi
Sejarah praktik lingkungan yang tidak etis (48,5%)	Sebelum transaksi baru (50,4%)
Riwayat praktik ilegal, hukuman, atau denda sesuai peraturan (43,9%)	Sebelum memberi layanan keuangan apa pun (49,0%)
Riwayat memasok produk dari negara-negara berisiko tinggi atau terkena sanksi (43,3%)	Sebelum berinvestasi (45,8%)
Sejarah praktik tidak etis terkait hak asasi manusia atau hak masyarakat lokal (43,0%)	Sebelum hubungan bisnis terjalin (41,7%)
Riwayat korupsi atau penyuapan (39,2%)	Secara berkala (16,5%)
Sejarah penghindaran pajak (34,3%)	

### 6.2.1 Tindakan seleksi dan identifikasi

Responden menempatkan tiga besar predicate crime yang dianggap terkait dengan konversi lahan sebagai **penipuan** (38,5%), **korupsi dan penyuapan** (37,1%), dan **pencucian uang** (34,6% - namun jauh lebih tinggi bila **pencucian uang berbasis perdagangan** (27,9%) dimasukkan di dalamnya). Temuan-temuan ini sejalan dengan penelitian berbasis literatur dan hasil jurnalisme investigatif yang menunjukkan bahwa penipuan, korupsi, dan penyuapan **banyak memfasilitasi konversi lahan** di seluruh dunia. Selain itu, mungkin para profesional kejahatan keuangan lebih terlatih dan sadar akan kejahatan-kejahatan ini dibandingkan dengan predicate crime lainnya seperti perdagangan manusia, misalnya – yang merupakan bidang fokus yang relatif baru bagi banyak perusahaan – atau bahwa keterkaitan mereka dengan pembukaan lahan lebih mudah dipahami.



**GAMBAR 16: TIPOLOGI UTAMA YANG DIPERSEPSIKAN TENTANG POTENSI AKTIVITAS PREDICATE CRIME TERKAIT KONVERSI LAHAN YANG DIIDENTIFIKASI OLEH RESPONDEN SURVEI**

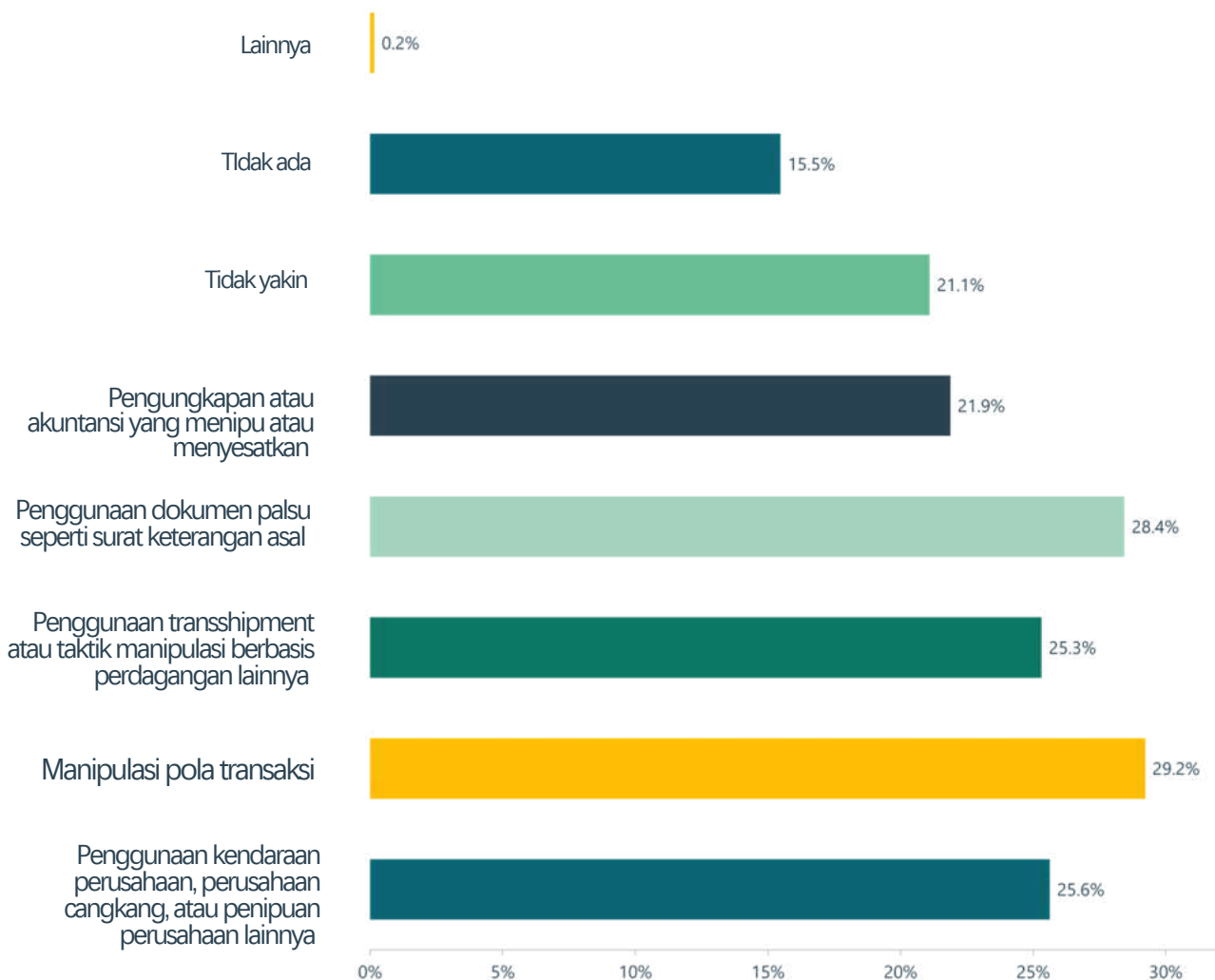


© Lizzie / Themis

## 6.2.2 Menangani kejahatan keuangan terkait konversi lahan

**Antara seperlima dan sepertiga** responden survei juga menyatakan bahwa perusahaan mereka telah **memberi kesaksian** tentang upaya pihak ketiga untuk menyembunyikan kejahatan keuangan atau praktik bisnis tidak etis terkait dengan konversi lahan melalui taktik yang berbeda, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

**GAMBAR 17: TAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI OLEH MANTAN/CALON KLIEN ATAU REKANAN BISNIS YANG BERUSAHA MENYEMBUNYIKAN KEJAHATAN KEUANGAN ATAU PRAKTIK BISNIS YANG TIDAK ETIS TERKAIT DENGAN KONVERSI TANAH, PILIH SEMUA YANG BERLAKU**



© Lizzie / Themis

Ketika ditanya apakah organisasi mereka pernah **berhenti melakukan bisnis** dengan klien, investor, pemasok, atau pihak ketiga karena kekhawatiran terhadap potensi aktivitas kejahatan keuangan terkait dengan konversi lahan, 44,0% menjawab 'ya', sementara 36,4% 'tidak', dan 19,6% menjawab 'tidak yakin'. Karena survei ini memberi opsi – yang banyak diambil – untuk menjawab pertanyaan secara anonim, kemungkinan besar jawaban-jawaban tersebut tidak terdistorsi atau disalahartikan oleh para responden yang mencoba menggambarkan perusahaan mereka secara positif dengan lebih-lebihkan reaksi mereka terhadap kekhawatiran kejahatan keuangan terkait konversi lahan.

Mereka juga memberi semangat karena mereka menyarankan bahwa **menekankan risiko eksposur** terhadap kejahatan finansial melalui kegiatan konversi lahan dapat menjadi **pendorong utama** dalam mengurangi pendanaan untuk kegiatan yang merugikan ini – jika hampir separuh responden telah menunjukkan kesediaan untuk mengakhiri hubungan dengan negara lain karena kekuatan kekhawatiran tersebut.



## 6.3 Permasalahan data: eksternal dan internal

### 6.3.1 Sistem seleksi otomatis perusahaan

Masalah seleksi data yang diangkat selama diskusi kelompok fokus mencakup **kualitas, ruang lingkup, dan relevansi** data yang terkait dengan konversi lahan dan predicate crime terkait, serta dampaknya terhadap kemampuan perusahaan untuk memasukkannya ke dalam sistem seleksi otomatis. Permasalahan spesifiknya mencakup **perbedaan** dalam **konvensi penamaan** dan **ejaan** di berbagai wilayah dan kurangnya **data tanggal lahir** yang dapat diandalkan atau tepat, yang menghambat upaya perusahaan untuk mempersempit kecocokan untuk individu yang relevan atau mencurigakan.

Banyak peserta kelompok fokus percaya bahwa secara umum ada cukup data yang tersedia namun kesulitan muncul dalam memilah data tersebut dan memilih informasi yang harus digunakan atau diistimewakan dibandingkan yang lain, serta bagaimana mengatasi masalah sulit dari beberapa **kecocokan positif palsu** saat melakukan seleksi terhadap nama.

### 6.3.2 Berbagi data peer-to-peer

Peserta dalam kelompok fokus juga menyoroti kurangnya gerbang atau platform yang memadai untuk berbagi informasi antara lembaga keuangan, yang menghalangi perusahaan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang perkembangan tipologi predicate crime. Berbagi informasi akan memfasilitasi upaya untuk membangun pemahaman, namun para peserta sangat menyadari kendala terkait **Regulasi Perlindungan Data Umum** (GDPR) dalam berbagi data pribadi tentang individu yang mencurigakan masih menjadi penghambat.

### 6.3.3 Data pribadi dan undang-undang perlindungan data

Kekhawatiran utama dari peserta kelompok fokus berpusat pada **perbedaan undang-undang mengenai data pribadi di berbagai yurisdiksi** dan bagaimana hal ini dapat menjadi hambatan dalam mengakses informasi yang relevan dan akurat. Ada konsensus umum di antara peserta kelompok fokus bahwa pemerintah di seluruh dunia harus menyediakan data andal yang **tersedia dan dapat diakses oleh publik**. Lebih lanjut dicatat bahwa akses terhadap **data penyidikan** untuk pelanggaran terkait akan menjadi sumber daya yang sangat berharga dalam hal pemeriksaan uji tuntas, karena banyak penjahat yang beroperasi di bidang ini belum dan mungkin tidak akan pernah dituntut. Hal ini khususnya terjadi ketika **korupsi dan penyuapan** bersinggungan dengan konversi lahan, karena para pelaku yang memiliki sumber daya yang cukup, pengaruh atau ancaman kekerasan yang meyakinkan bisa saja melepaskan diri dari dakwaan sebelum dijatuhi hukuman. Hal ini diilustrasikan dengan baik oleh studi kasus [Luis Valdez Villacorta](#), yang ditangkap atas tuduhan perdagangan narkoba tanpa hukuman, sehingga memungkinkan dia untuk menjadi wali kota provinsi Coronel Portillo di Peru yang memungkinkan dia untuk memanfaatkan kekuasaan dan pengaruhnya untuk melakukan beragam kegiatan kriminal yang diduga, termasuk pencucian kayu, perdagangan narkoba, dan perintah pembunuhan terhadap seorang jurnalis. Kasus ini juga menyoroti risiko-risiko yang terkait dengan tumpukan investigasi kejahatan terorganisir di banyak negara, karena kompleksitasnya menyebabkan proses penuntutan memerlukan waktu bertahun-tahun – dan oleh karena itu, memerlukan waktu bertahun-tahun hingga data terkait tersedia untuk umum.

Meskipun semua peserta sepakat bahwa data tersebut akan memberi perbedaan besar pada proses seleksi mereka, mereka juga mengakui bahwa hal ini sangat kecil kemungkinannya untuk terwujud karena memerlukan **perombakan radikal terhadap perlindungan data** dan proses hukum di banyak negara.

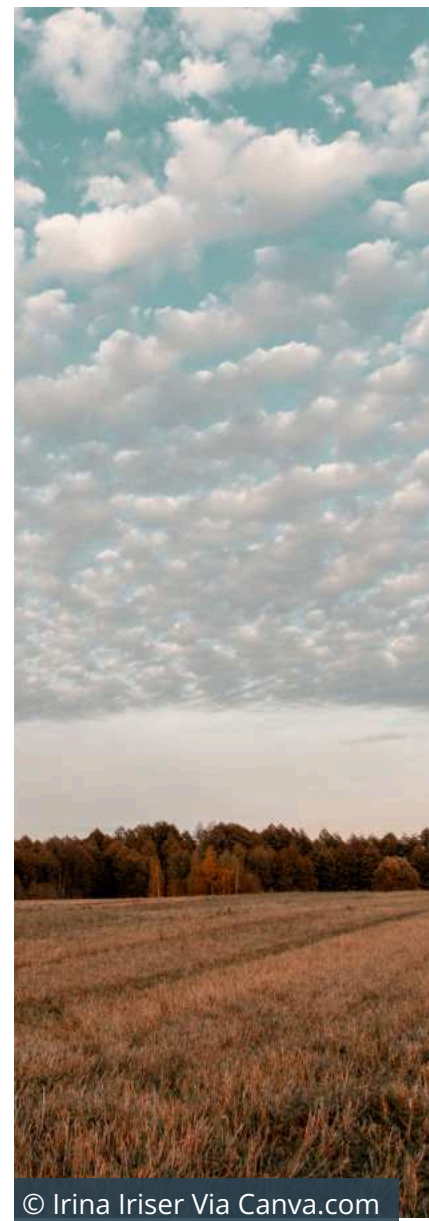
Peserta diskusi kelompok fokus juga merujuk pada putusan Pengadilan Eropa tahun 2023 yang membatalkan akses publik terhadap **daftar penerima manfaat** negara-negara UE di bawah AMLD UE. Memang benar, sejak Juni 2023, Austria, Irlandia, Jerman, Belgia, Yunani, Malta, dan Belanda telah menutup akses publik terhadap daftar penerima manfaat mereka. Belanda mungkin menjadi perhatian khusus dalam konteks ini, karena responden survei menyebut **Pelabuhan Rotterdam** – yang merupakan pusat komoditas pertanian – sebagai pusat transit berisiko tinggi untuk produk-produk yang berasal dari konversi lahan (pada tahun 2023, negara ini merupakan importir terbesar untuk komoditas deforestasi berisiko tinggi dari negara-negara non-UE, termasuk kedelai, minyak sawit, kakao, kayu, dan daging sapi). Kekhawatiran peserta selaras dengan kekhawatiran kelompok antikorupsi seperti Transparency International dan OCCRP, yang secara terbuka menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah mundur dalam pengungkapan korupsi dan predicate crime lainnya serta pencegahan aliran keuangan gelap.

### 6.3.4 Sekat-sekat data

Selama diskusi, peserta diskusi kelompok fokus juga menunjukkan “**sekat-sekat data**” eksternal dan internal, yang ada di antara berbagai entitas penegak hukum, masyarakat sipil, FIU, dan keuangan **di dalam dan di seluruh benua**, serta **antara bagian di dalam perusahaan**. Akses terhadap data merupakan alat yang ampuh dalam memerangi konversi lahan dan hambatan terhadap intelijen terkait dapat benar-benar menghambat upaya bank untuk memantau dan mengatasi eksposurnya, namun dapat dipengaruhi oleh faktor politik atau geopolitik yang kompleks. Misalnya, ketika mantan presiden Brasil Jair Bolsonaro berkuasa pada tahun 2019, pemerintahannya membatasi akses publik terhadap catatan peternakan dan sapi di sebagian besar wilayah Amazon, sehingga merampas sumber data penting yang berkaitan dengan aktivitas konversi lahan dari berbagai pihak – dan tingkat pembukaan lahan meningkat pesat selama masa jabatannya (sebesar 75,5% di Amazon Brasil dibanding dengan dekade sebelumnya).

Tantangan aliran data eksternal bagi perusahaan, yang menghambat akses mereka terhadap data konversi lahan yang kuat dan tepat waktu, akan dipertimbangkan dan dieksplorasi secara lebih terperinci dalam Panduan ini, sebagai permasalahan utama dan penghambat bagi sektor keuangan.

Beralih ke **sekat data internal**, banyak profesional keuangan yang dihubungi mencatat bahwa, selain kekhawatiran seputar data eksternal, terdapat tantangan yang sama terkait pembagian data internal dalam organisasi. Secara khusus, mereka menekankan bahwa perlu adanya peningkatan **jalur umpan balik** antara **ESG lembaga keuangan dan departemen kejahatan keuangan** karena fungsi-fungsi ini sering kali memanfaatkan data yang dapat bermanfaat bagi pihak lain.



© Irina Iriser Via Canva.com

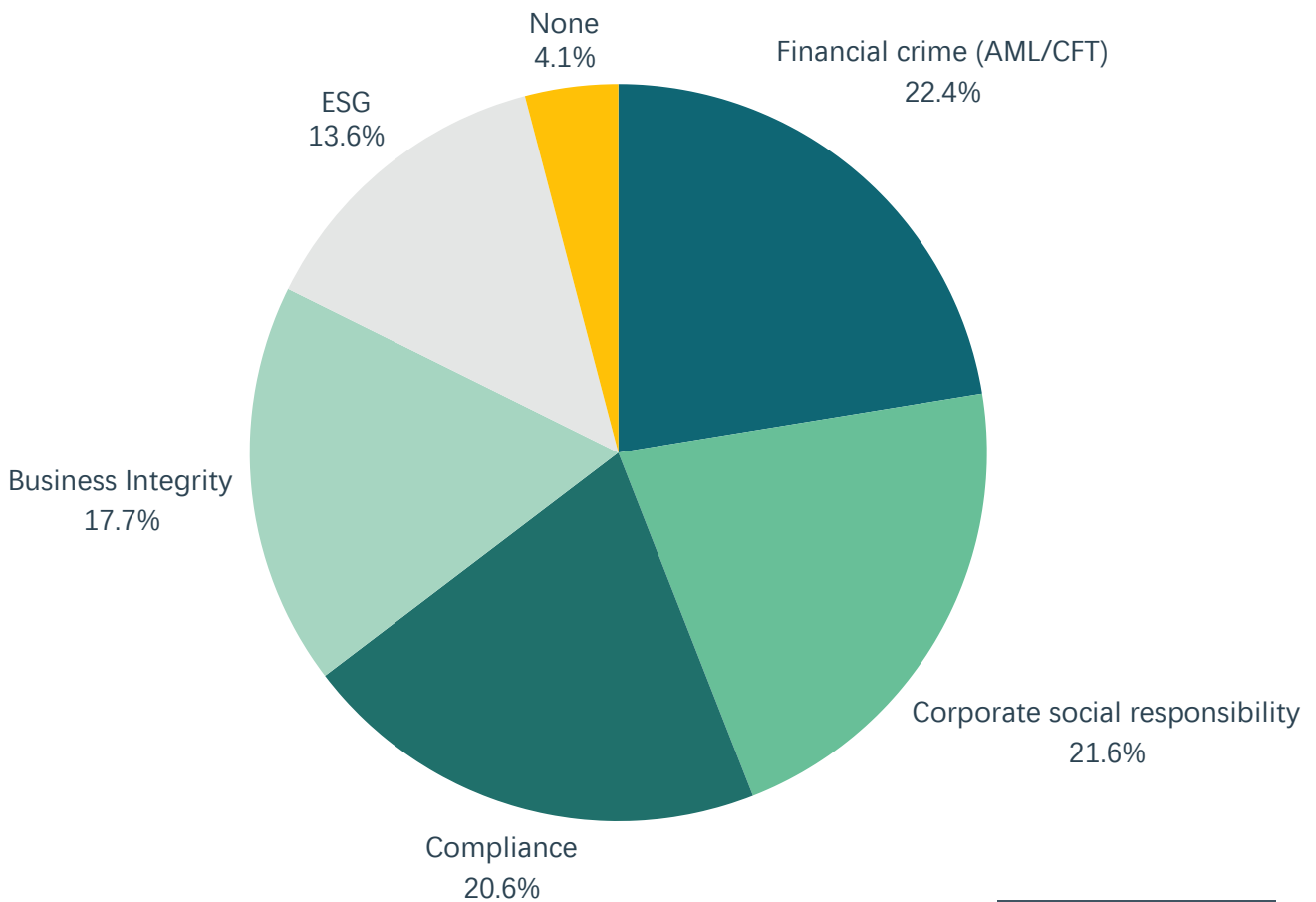


### 6.3.5 Tanggung jawab departemen atas risiko konversi lahan

Selain itu, responden survei menunjukkan distribusi yang relatif merata dalam menanggapi pertanyaan mengenai **tanggung jawab organisasinya terhadap risiko konversi lahan** – yang menunjukkan kurangnya konsensus di seluruh sektor mengenai cara merumuskan dan menangani masalah ini. Hal ini dapat **memperburuk tantangan dalam kolaborasi data** baik secara eksternal (antar perusahaan, misalnya dalam kelompok kerja berbasis peran, jika peran yang bertanggung jawab tidak konsisten di seluruh sektor) dan secara internal antar departemen dan fungsi, yang menghadapi masalah tersebut dari perspektif yang berbeda dan tidak sepakat tentang siapa yang 'memimpin' tanggapan perusahaan terhadap hal tersebut. Meskipun perusahaan menunjukkan bahwa mereka sama-sama khawatir terhadap risiko keuangan, reputasi, hukum, dan peraturan yang ditimbulkan oleh predicate crime terkait konversi lahan, pemerataan keterlibatan antar departemen dalam mengatasi masalah ini juga harus dilengkapi dengan prinsip dan proses berbagi data internal yang kuat agar dapat dimanfaatkan dengan cara yang berarti.



**GAMBAR 18: DEPARTEMEN MANA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS RISIKO DAN MASALAH SEPUTAR KONVERSI LAHAN DALAM ORGANISASI ANDA?**



© Lizzie / Themis

### 6.3.6 Area risiko utama

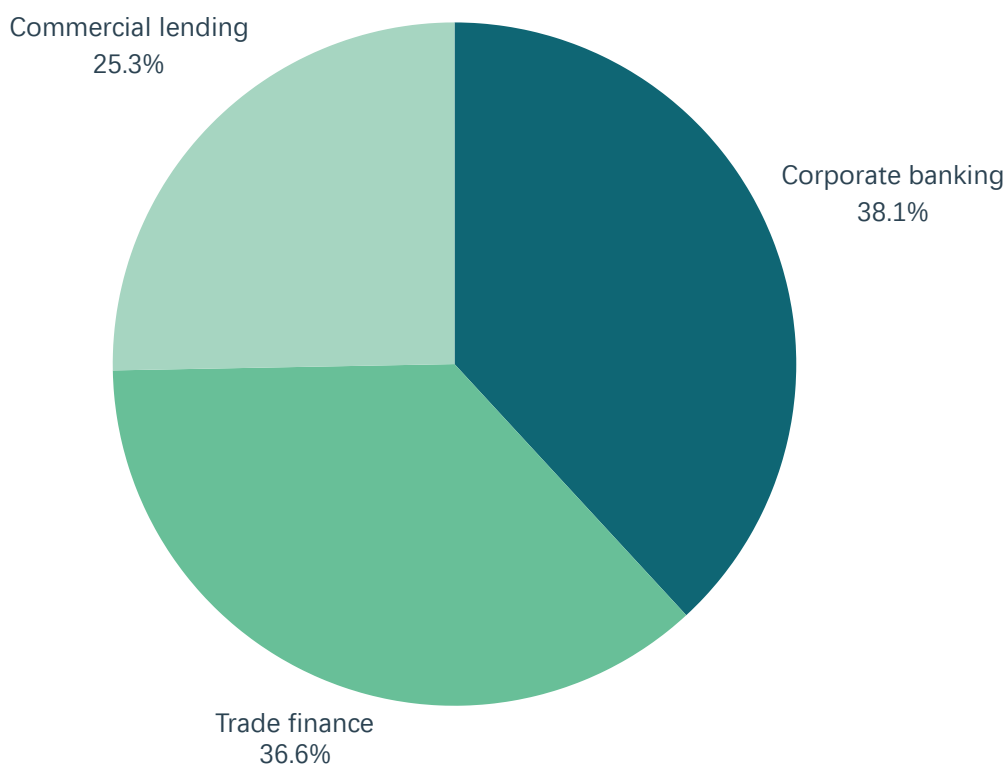
Responden survei merasa bahwa risiko konversi lahan **tidak hanya terbatas pada satu jasa atau produk keuangan saja**, namun perbankan korporasi (29,1%), pembiayaan perdagangan (27,9%), dan pinjaman komersial (19,3%) menjadi perhatian utama.



© kentoh Via Canva.com



FIG 19: KEY AREAS OF VULNERABILITY, AS PERCEIVED BY SURVEY RESPONDENTS



© Aine / Themis

Responden survei menganggap beberapa wilayah memiliki risiko tinggi terhadap konversi lahan. Wilayah tersebut termasuk **negara-negara yang kaya akan hutan hujan di Amerika Selatan dan Tengah, Afrika Sub-Sahara, dan Asia Tenggara.**



**TABEL 3: WILAYAH BERISIKO TINGGI MENURUT RESPONDEN SURVEI: WILAYAH FOKUS TERKAIT KONVERSI LAHAN**



Afrika	Asia	Eropa	Amerika Selatan
<b>Kawasan Kongo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamerun</li> <li>• Republik Afrika Tengah</li> <li>• Republik Demokratik Kongo</li> <li>• Guinea Khatulistiwa</li> <li>• Republik Kongo</li> <li>• Gabon</li> </ul>	Tiongkok	Belgia	Argentina
Kenya	Indonesia	Dataran Tinggi Skotlandia	Bolivia
Nigeria	Malaysia	Rusia (timur-tengah)	Brasil
	Thailand	Belanda	Kolombia
	Vietnam	Ukraina	
		Inggris Raya	



TABEL 4: CONTOH SEKTOR DENGAN RISIKO TERKENA KONVERSI LAHAN LEBIH TINGGI, SESUAI PERSEPSI RESPONDEN SURVEI

Sectors	Relevant Countries/Regions
<p>Minyak dan gas.</p> <p>Kayu yang diekspor dari Black Forest.</p>	<p>Timur Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afghanistan</li> <li>• Irak</li> <li>• Yaman</li> <li>• Iran</li> <li>• UEA</li> </ul>
<p>Perusahaan pabrik kertas (keprihatinan terhadap pembuatan produk dari kayu yang berasal dari kawasan yang banyak mengalami deforestasi di Tenggara dan sepanjang Gulf Coast).</p>	<p>Asia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalimantan</li> <li>• Tiongkok</li> <li>• Indonesia</li> <li>• Myanmar</li> <li>• Singapura</li> <li>• Kamboja</li> <li>• India</li> <li>• Malaysia</li> <li>• Nepal</li> <li>• Vietnam</li> </ul>
<p>Konstruksi sektor swasta (khususnya di Malaysia).</p> <p>Komoditas pertanian (dominan kedelai dan sawit).</p>	<p>Asia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Malaysia</li> <li>• Myanmar</li> <li>• Singapura</li> <li>• Nepal</li> <li>• Vietnam</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri pembuatan furnitur.</li> <li>• Industri pembuatan korek api.</li> <li>• Sektor agrikultur.</li> <li>• Industri kakao.</li> </ul>	<p>Africa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angola</li> <li>• Gabon</li> <li>• Niger</li> <li>• Rwanda</li> <li>• Afrika Selatan</li> <li>• Guinea Khatulistiwa</li> <li>• Kamerun</li> <li>• Ghana</li> <li>• Nigeria</li> <li>• Somalia</li> <li>• Kawasan Kongo</li> </ul>
<p>Industri ekonomi dan komersial milik negara (khususnya yang beroperasi di Brasil).</p> <p>Sektor perminyakan (di Brasil).</p> <p>Komoditas keras dan lunak termasuk kelapa sawit, gula, kedelai, biji-bijian, kayu, dan tembaga (terutama dari Chili, Argentina, dan Brasil).</p>	<p>Amerika Selatan dan Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolivia</li> <li>• Kolombia</li> <li>• Haiti</li> <li>• Paraguay</li> <li>• Chili</li> <li>• Ekuador</li> <li>• Meksiko</li> <li>• Venezuela</li> </ul>

TABEL 5: RUTE PERDAGANGAN BERISIKO TINGGI, SESUAI PERSEPSI RESPONDEN SURVEI

Jalur perdagangan	Penjelasan yang memungkinkan
Dari Amazon ke Tiongkok	Tiongkok adalah <u>importir utama</u> produk sapi dan kedelai dari hutan hujan Amazon.
Hutan hujan Asia Tenggara ke Tiongkok	Tiongkok merupakan tujuan terbesar untuk ekspor <u>pulp kayu terlarut (DWP) Indonesia</u> . Dalam konteks EUDR, Malaysia telah menyatakan tujuan untuk <u>meningkatkan ekspor minyak sawit</u> ke Tiongkok.
Dari Afrika ke Timur Tengah	Perdagangan arang merupakan risiko utama deforestasi di sepanjang jalur ini, terutama di Afrika Timur. Risiko komoditas utama lainnya di sepanjang jalur perdagangan ini <u>termasuk kakao, kopi, minyak sawit, karet, dan teh</u> .
Jalur perdagangan yang melintasi kawasan Asia Pasifik	Geografi Asia-Pasifik mencakup beberapa hutan tropis dan kawasan keanekaragaman hayati paling kritis di dunia. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kawasan ini, ada <u>peningkatan risiko eksploitasi kayu</u> dan hasil hutan lainnya.
Dari <u>Amerika Selatan hingga Amerika Utara</u> , khususnya melalui dan sepanjang pantai Teluk Texas	Amerika Serikat dan Kanada merupakan negara tujuan impor berisiko tinggi yang terkait dengan konversi lahan. Contoh komoditas mencakup <u>daging sapi, minyak sawit, bubur kayu dan tebu</u> dari Brasil; <u>kopi</u> dari <u>Kolombia</u> dan <u>Peru</u> ; kakao dari <u>Ekuador, Kolombia, dan Peru</u> .
Jalur perdagangan yang melintasi kawasan hutan atau taman nasional	Jalur perdagangan yang melewati atau berasal dari dalam atau dekat kawasan hutan dan taman nasional memiliki risiko tinggi bagi pergerakan kayu ilegal atau komoditas lain yang terkait deforestasi. Misalnya saja <u>jejaring pembalakan liar</u> yang berawal dari Taman Nasional Virachey di Kamboja hingga pelabuhan Sihanoukville, tempat kayu tersebut dikirim ke Hong Kong.

© Ghia / Themis



Jalur perdagangan	Penjelasan yang memungkinkan
<p>Jalur perdagangan yang melewati kawasan Kongo-Nil</p>	<p><u>Pasokan kayu sering kali berasal dari dan transit melalui negara-negara di Kawasan Kongo-Nil.</u> Penebangan sering terjadi di hutan-hutan di Kongo bagian timur, dan transit ke Uganda melalui Pos Perbatasan Mpondwe; melewati Kenya melalui jalan darat melalui Pos Perbatasan Busia; menuju pasar internasional melalui Pelabuhan Mombasa, dan ke Tanzania melalui jalan darat melintasi perbatasan di Mutukula.</p>
<p>Jalan raya Trans-Amazon</p>	<p>Membelah dua hutan hujan Amazon, <u>jalan raya sepanjang 2.000 mil</u> ini menyediakan akses mudah ke dan dari sumber daya kayu dan mineral di hutan.</p>
<p>Jalan raya Trans-Sahara</p>	<p>Jalur perdagangan utara-selatan yang penting, memainkan peran krusial dalam pergerakan barang-barang pertanian, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan untuk memindahkan komoditas dari sumber ilegal.</p>
<p>Jalur melalui kawasan pegunungan Changbai (melintasi Tiongkok Timur Laut dan Korea Utara)</p>	<p>Kawasan pegunungan di dataran tinggi Asia <u>diketahui</u> menjadi tempat perlindungan bagi jalur perdagangan ilegal dan penyelundupan.</p>
<p>Jalur di sepanjang dan melintasi perbatasan Yunnan (yang berbatasan dengan Tiongkok, Laos, Myanmar, dan Vietnam).</p>	<p>Ada <u>kekhawatiran yang semakin besar</u> dalam beberapa tahun terakhir mengenai peningkatan jumlah kayu yang masuk ke Tiongkok yang melintasi perbatasan, dengan perkiraan bahwa ratusan juta dolar kayu ilegal diselundupkan dari Myanmar menuju Tiongkok setiap tahunnya. Hal ini diperburuk oleh investasi baru di bidang infrastruktur di Myanmar yang dilakukan oleh perusahaan Tiongkok.</p>
<p>Jalur perdagangan apa pun yang berasal dari Amerika Selatan</p>	<p><u>Amerika Selatan</u>, yang merupakan rumah bagi begitu banyak vegetasi, merupakan salah satu wilayah sumber komoditas konversi lahan dengan risiko tertinggi di dunia.</p>
<p>Jalur perdagangan yang ditujukan ke Belanda</p>	<p>Pada tahun 2023, Belanda merupakan <u>importir terbesar UE</u> untuk produk dengan risiko deforestasi yang tinggi dari negara-negara non-UE, termasuk kedelai, minyak sawit, kakao, kayu, dan daging sapi.</p>
<p><u>Provinsi Hebei</u> di Tiongkok</p>	<p>Suatu wilayah dengan geografi yang bervariasi, meliputi pegunungan, garis pantai, dataran, dan danau serta berbatasan dengan Laut Bohai di sebelah timur, yang dapat memberikan peluang luas untuk mengangkut barang melalui berbagai jalur dan sarana. Provinsi Hebei merupakan <u>pusat utama</u> pengolahan dan pembuatan produk kayu.</p>

TABEL 6: PELABUHAN BERISIKO TINGGI, SESUAI PERSEPSI RESPONDEN SURVEI

Pelabuhan	Komoditas yang umumnya transit melalui pelabuhan
Belanda: <u>Pelabuhan Rotterdam</u>	<u>Pelabuhan Rotterdam</u> merupakan pusat komoditas pertanian, termasuk komoditas yang berisiko tinggi terkait dengan konversi lahan, seperti <u>kedelai</u> dan kelapa sawit.
Terusan Panama	<u>Kayu gelondongan cocobolo</u>
<u>Ekuador</u>	Kayu cendana, panel kayu, <u>serat, bambu, lateks, gom, produk sawit.</u>
<u>Pelabuhan Nigeria</u> : Pulau Tin Can, Lagos, Calabar, Delta, Port Harcourt, Pelabuhan Onne	<u>Sapi (daging dan kulit), kakao, produk kayu, kacang mete, minyak sawit, wijen.</u>
Paraguay (Contoh: Pelabuhan Sungai Paraná)	<u>Kedelai</u>
Republik Demokratik Kongo: Pelabuhan Banana, Pelabuhan Kinkole	<u>Log kayu</u>
Kroasia: Pelabuhan Rijeka	<u>Produk kayu</u>

© Ghia / Themis

## Tumpang tindih antara negara sumber dan negara transit

Penting bagi lembaga keuangan untuk menyadari bahwa sering kali ada tumpang tindih antara negara asal dan negara transit untuk komoditas berisiko tinggi. Uganda, misalnya, bukan hanya negara sumber utama namun juga pasar transit yang penting; sekitar 80% kayu ilegal dari Republik Demokratik Kongo diangkut melalui Uganda ke pasar lain di Afrika Timur, termasuk Sudan Selatan.

Negara tujuan dan pasar utama kemungkinan akan bergeser seiring dengan meningkatnya regulasi dan undang-undang yang terkait dengan konversi lahan yang melarang impor komoditas tersebut ke UE. Selanjutnya, negara asal komoditas tersebut pasti akan mencari pasar baru - misalnya, di Afrika, Asia, dan Australasia.

Area Risiko



### 6.3.7 Kompleksitas rantai pasokan dan jalur perdagangan

Data yang dikumpulkan dari kelompok fokus menyoroti bahwa komoditas yang terkait dengan konversi lahan sering kali melibatkan rantai pasokan yang kompleks, yang menimbulkan tantangan besar dalam melakukan uji tuntas yang efektif karena banyaknya aktor dan pemangku kepentingan yang terlibat. Para peserta mencatat bahwa kompleksitas ini semakin meningkat karena semua negara yang terlibat dalam rantai pasokan (**sumber, transit, dan tujuan**) memerlukan analisis.

Para peserta mengusulkan agar pemetaan komprehensif terhadap seluruh peserta rantai pasokan mungkin diperlukan untuk memahami berbagai isu konversi lahan, beserta risiko yang terkait. Mereka juga menekankan bahwa lembaga keuangan harus didorong untuk berbicara langsung dengan pelanggan dan berbagai pelaku serta pemangku kepentingan di seluruh rantai pasokan untuk lebih memahami konversi lahan dan risiko terkait (misalnya, memulai percakapan dengan klien pabrik kertas untuk lebih memahami bagaimana kayu ilegal masuk ke dalam rantai pasokan). Hal ini memberi peluang untuk meningkatkan kolaborasi antara lembaga keuangan dan para ahli di lapangan, serta dengan badan pemerintah daerah dan nasional – serta dapat membantu mengatasi tantangan aliran data eksternal yang telah disoroti.



# 7

## KESIMPULAN

Mengingat sangat beragamnya ancaman konvergensi dengan predicate crime, lembaga keuangan harus mempertimbangkan konversi lahan sebagai ancaman yang sama seriusnya dengan risiko lain yang mereka saring. Hal ini menjadi lebih penting ketika mempertimbangkan risiko reputasi perusahaan dalam konteks meningkatnya pengawasan dari masyarakat sipil, investor dan masyarakat, serta perhatian terhadap keadilan sosial dan lingkungan. Ketika pemerintah dan regulator semakin berupaya untuk membuat undang-undang dan mengatur mengenai konversi lahan, lembaga keuangan memiliki peran penting dan peluang untuk menggunakan keahlian dan akses unik mereka terhadap data untuk membantu penegakan hukum dan untuk melindungi diri mereka sendiri – dan masyarakat lokal – dari risiko ketika menyangkut predicate crime yang terkait dan terpadu.

Pembatasan pembagian dan akses data disorot sebagai masalah dalam penelitian ini. Namun, hal yang menggembirakan adalah banyak perusahaan yang dihubungi bersedia berbagi pengalaman mereka dan contoh praktik terbaik dalam menghadapi konversi lahan serta memahami lebih banyak tentang permasalahan ini dan tantangan yang terkait dengannya; bagaimana hal ini berdampak pada bisnis mereka dan apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu mengatasi permasalahan global ini.

Panduan klasifikasi ini dirancang untuk mendukung lembaga keuangan, dengan memberi informasi perkembangan tanda bahaya, panduan dan regulasi pelaporan, serta berbagi contoh praktik terbaik dari dedikasi dan kerja keras yang terus dilakukan oleh organisasi dan individu yang menyelidiki dan menantang isu-isu konversi lahan. Sayangnya, para pelaku kriminal terus berinovasi dan mengembangkan tipologi mereka sebagai respons terhadap pengetatan penegakan hukum, sehingga berbagi informasi menjadi semakin penting jika kita ingin bersama-sama melakukan tindakan keras terhadap individu dan perusahaan nakal ini.

WWF dan Themis berharap laporan dan panduan awal ini akan memberi sumber daya yang berguna bagi lembaga keuangan; yang membantu mendorong respons sistem secara keseluruhan untuk mendeteksi dan menghentikan kejahatan terkait konversi lahan.





# A

## LAMPIRAN 1: PANDANGAN DARI REGULATOR

### PERUNDANG-UNDANGAN DAN REGULASI GLOBAL YANG BERDAMPAK PADA LEMBAGA KEUANGAN

Secara tradisional, kejahatan lingkungan hidup diperlakukan sebagai isu konservasi – dan sebagian besar ditangani oleh organisasi non-pemerintah (LSM). Namun, kerangka peraturan dan hukum cenderung mengikuti opini masyarakat sipil, yang semakin peduli terhadap – dan vokal mengenai – iklim, alam, konservasi spesies yang terancam punah, hak asasi manusia, serta keadilan lingkungan dan sosial.

Memang benar, isu seputar konversi lahan, sampai saat ini, dipandang oleh sektor swasta terutama sebagai isu yang berkaitan dengan reputasi, dengan lembaga keuangan dan perusahaan berupaya menghindari pemberitaan yang merugikan, protes, atau boikot yang terkait dengan deforestasi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah semakin berupaya untuk melindungi lembaga keuangan dengan tanggung jawab untuk membenahi praktik bisnis mereka yang mungkin menyuburkan konversi lahan, dengan memberlakukan undang-undang baru seputar kejahatan lingkungan dan tindak pidana asal yang mempertimbangkan peran sektor swasta secara lebih penuh.



## UNI EROPA

### Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR)

EUDR, sebuah keputusan penting yang mulai berlaku pada bulan Juni 2023, mewajibkan uji tuntas dalam dan terhadap rantai pasokan UE untuk memastikan produk yang dijual di UE tidak menyebabkan deforestasi atau degradasi hutan. Meskipun tidak ada negara atau komoditas yang akan dilarang, perusahaan hanya akan diizinkan menjual produknya di UE jika pemasok produk tersebut telah mengeluarkan suatu “pernyataan uji tuntas” yang menegaskan bahwa produk tersebut tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi.

EUDR menetapkan masa transisi selama 18 bulan bagi operator atau pedagang komoditas berisiko tinggi – yang meliputi hewan ternak, kedelai, kayu, kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi, serta komoditas turunannya (seperti kayu bakar, ban, kulit, dan gliserol) – sebelum mereka harus dapat membuktikan bahwa produk tersebut tidak berkontribusi terhadap degradasi hutan atau berasal dari lahan yang mengalami deforestasi. Regulasi ini penting karena menargetkan konversi lahan ilegal dan legal, sehingga perusahaan bertanggung jawab atas praktik terkait yang terjadi di sepanjang rantai pasokan mereka. Denda maksimum untuk ketidakpatuhan harus minimal 4% dari total omset tahunan di UE dari operator atau pedagang yang tidak patuh.

Namun EUDR **tidak** mencakup perlindungan lahan berhutan, padang rumput, dan lahan basah. Hal ini membahayakan hotspot biologis penting di Amerika Selatan yang termasuk dalam kategori ini, seperti Cerrado di Brasil (wilayah sabana) dan Gran Chaco (hutan terbesar kedua di benua ini dan dataran rendah semi-kering yang mencakup wilayah Argentina, Brasil, Bolivia, dan Paraguay). Memang benar, sebagaimana telah disebutkan, sejak kebijakan diterapkan untuk melindungi Amazon, kawasan ini telah diidentifikasi sebagai “garis depan deforestasi baru”, dengan Cerrado mengalami tingkat deforestasi tertinggi pada tahun 2023 sejak tahun 2018 dan Gran Chaco mengalami deforestasi pada tingkat yang setara dengan hilangnya 20% vegetasi asli selama 15 tahun. Selain itu, komoditas utama yang terkait dengan deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti gula dan unggas, tidak termasuk dalam cakupan EUDR.

Saat ini, lembaga keuangan tidak termasuk dalam cakupan EUDR. Namun, sebuah proposal baru – yang diperkirakan akan ditinjau pada tahun 2025 – telah diajukan oleh Parlemen Eropa untuk memasukkan lembaga keuangan yang berkantor pusat atau beroperasi di UE ke dalam regulasi tersebut.

Jika diadopsi, usulan ini akan mengharuskan lembaga-lembaga keuangan – yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan perbankan dan investasi – untuk melakukan dan menunjukkan uji tuntas, penilaian risiko, dan mitigasi yang memadai sebelum menyediakan jasa keuangan kepada nasabah yang kegiatan ekonominya melibatkan perdagangan atau penempatan komoditas dan produk terkait di pasar UE. Mereka harus yakin bahwa hanya ada risiko yang dapat diabaikan bahwa layanan keuangan yang mereka berikan “mendukung secara langsung atau tidak langsung kegiatan yang mengarah pada deforestasi, degradasi hutan, atau konversi hutan.”





## RISIKO EUDR: KESIAPAN

Analisis yang dilakukan oleh [Forest 500](#) menunjukkan bahwa banyak perusahaan komoditas global yang terburu-buru mematuhi EUDR masih belum siap untuk mematuhi, karena persyaratan ketertelusuran dan uji tuntas masih belum lengkap. Lembaga keuangan harus secara aktif melakukan persiapan terlebih dahulu untuk menghindari risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan yang serupa, jika proposal untuk memasukkan lembaga keuangan ke dalam lingkup EUDR diadopsi pada tahun 2025.



## FOKUS:

# PERJANJIAN PERDAGANGAN UE-MERCOSUR (EMTA)



Negara-negara UE dan Mercosur – termasuk Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay – sedang mendekati tahap akhir perjanjian perdagangan bebas yang akan menghilangkan 93% tarif produk Mercosur ke UE dan menawarkan perlakuan istimewa untuk 7% sisanya. Setelah negosiasi bertahun-tahun yang dimulai pada tahun 2000, dan kedua belah pihak tampaknya ingin mencapai kesepakatan pada akhir tahun 2023. Namun, perundingan terhenti dan, pada saat artikel ini ditulis, tidak ada target atau tenggat waktu yang jelas untuk penandatanganan EMTA.

Karena agribisnis di negara-negara Mercosur menjadi pendorong utama deforestasi, para pendukung perjanjian perdagangan ini sangat bergantung pada EUDR untuk memitigasi potensi dampak negatif dari perjanjian perdagangan tersebut – termasuk meningkatnya eksposur perusahaan-perusahaan Eropa terhadap deforestasi dan degradasi lahan melalui rantai komoditas. Namun demikian, sebagaimana telah disebutkan, terdapat keterbatasan dalam ruang lingkup EUDR yang menimbulkan risiko besar dari sudut pandang lingkungan hidup.

EMTA menghadapi sektor keuangan pada risiko yang lebih besar dalam membiayai deforestasi dan konversi hutan, mengingat EMTA memberikan insentif dan memfasilitasi investasi dan perluasan operasional di wilayah berisiko tinggi ini dan bahwa EUDR saat ini tidak mencakup (dan karenanya melindungi) sektor keuangan.



## Petunjuk Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan (CSDDD)

Bertujuan untuk menutup kesenjangan legislatif seputar akuntabilitas bagi perusahaan besar yang beroperasi di UE, CSDDD mewajibkan perusahaan tersebut untuk mengidentifikasi dan mengatasi dampak buruk terhadap hak asasi manusia dan lingkungan dalam rantai nilai mereka, berupaya untuk memitigasi potensi dampak dan mencegah pelanggaran. Hal ini mencakup kekhawatiran terhadap pekerja anak atau budak, eksploitasi pekerja, polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan – yang semuanya umumnya berpadu dengan konversi lahan – dan tidak hanya berlaku pada operasi perusahaan itu sendiri tetapi juga pada tindakan anak perusahaannya atau entitas lain dalam rantai pasokannya. Lembaga keuangan sebelumnya berada di luar jangkauan namun pada tahun 2023 Parlemen Eropa mengadopsi proposal untuk mencakup lembaga-lembaga tersebut, serta menghubungkan “sebagian besar” gaji direktur dengan uji tuntas lingkungan dan sosial perusahaan. CSDDD saat ini diadopsi sebagai teks negosiasi dan kemungkinan akan diadopsi secara resmi pada tahun 2024. Namun, perusahaan disarankan untuk membuat rencana ke depan dan memahami terlebih dahulu bagaimana mereka akan memperoleh data yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan baru dan uji tuntas yang ekstensif.

“

Para pemodal perlu bersiap untuk diikutsertakan dalam EUDR dan CSDDD UE, karena masyarakat sipil semakin menekan mereka. Mereka dapat menghadapi risiko keuangan jika mereka gagal dalam upaya penerapan dan kepatuhan.

CHAIN REACTION RESEARCH, 2023







## STUDI KASUS: BANK YANG DITARGETKAN UNTUK PENCUCIAN HASIL DEFORESTASI ILEGAL

Pada bulan November 2023, LSM internasional Sherpa mengajukan pengaduan ke Kantor Kejaksaan Nasional Prancis bekerja sama dengan Harvest, Center for Climate Crime Analysis, Repórter Brasil, and Transparency International. Pengaduan tersebut menargetkan empat bank besar Prancis dan merupakan pengaduan pidana pertama terhadap bank di negara tersebut berdasarkan penerimaan barang curian dan pencucian keuntungan dari deforestasi ilegal. Kasus ini berkaitan dengan dukungan finansial bank terhadap perusahaan sapi terkemuka di Brasil, khususnya JBS dan Marfrig, yang terlibat dalam praktik deforestasi ilegal di Amazon. Bank-bank tersebut secara kolektif menginvestasikan USD70 juta antara tahun 2013 dan 2021 di perusahaan-perusahaan sapi ini – yang menghasilkan keuntungan sekitar USD11,73 juta – meskipun banyak investigasi pada periode yang sama mengungkap pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia dalam pengadaan sapi. Pengaduan ini menuduhkan bahwa, dengan menahan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang memperoleh keuntungan dari deforestasi ilegal dan kejahatan keuangan dan lingkungan hidup yang terkait, bank-bank ini membantu memasukkan kembali hasil pelanggaran tersebut ke dalam jalur hukum – pencucian uang – karena obligasi dibayar kembali dengan hasil yang berasal dari kegiatan terlarang ini.



## Petunjuk Pelaporan Berkelanjutan Perusahaan (CSRD)

CSRD mulai berlaku pada bulan Januari 2023 sebagai petunjuk baru yang memperkuat aturan seputar informasi sosial dan lingkungan yang wajib dilaporkan oleh perusahaan. Peraturan ini menggantikan Petunjuk Pelaporan Non-Keuangan (NFRD) dengan tujuan menstandarisasi pengungkapan keberlanjutan di UE untuk perusahaan besar. Kebijakan ini berlaku bagi perusahaan di UE yang memiliki lebih dari 250 karyawan dan omset melebihi €40 juta, termasuk semua perusahaan yang berorientasi pasar modal seperti perusahaan asuransi dan bank. Selain itu, perusahaan non-UE dengan omset bersih sebesar €50 juta di UE dan UKM yang terdaftar juga tunduk pada arahan ini. Perusahaan-perusahaan ini harus melaporkan keberlanjutan menggunakan Standar Pelaporan Keberlanjutan Eropa dan menjadikan informasi ini dapat diakses secara elektronik sebagai bagian khusus dalam laporan manajemen mereka.

CSRD mengharuskan perusahaan untuk melakukan pendekatan materialitas ganda. Artinya, perusahaan harus secara bersamaan melaporkan permasalahan keberlanjutan yang penting secara finansial, seperti informasi tentang rantai pasokan serta dampaknya terhadap deforestasi, ekosistem, perubahan iklim, populasi lokal, dan tata kelola. Hal terakhir ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus mendorong perusahaan untuk memitigasi dampak buruk dan mengidentifikasi peluang untuk memberikan dampak positif. Tujuannya adalah agar pelaporan mengenai materialitas finansial dan dampak akan memungkinkan lembaga keuangan untuk memitigasi risiko yang terkait dengan deforestasi dan konversi sebagai hasil dari identifikasi risiko tersebut dalam portofolio mereka.

### Risiko Transisi

Lembaga keuangan yang menunda penanganan dampak langsung dan tidak langsung terhadap konversi lahan dapat menghadapi risiko transisi jika mereka tidak siap menghadapi perubahan regulasi, seperti yang diusulkan dalam EUDR. Perubahan kebijakan yang menyertai transisi menuju perekonomian yang lebih hijau dapat mengakibatkan perubahan nilai aset atau peningkatan biaya operasional dan perusahaan yang tidak siap menghadapi perubahan dapat mengalami kerugian yang signifikan. Beberapa perusahaan saat ini memilih untuk mengurangi investasi pada sektor tertentu untuk membantu mereka mengelola risiko tersebut.



Risk Area

### Regulasi Taksonomi UE

Regulasi Taksonomi UE menetapkan kerangka klasifikasi yang menentukan kapan suatu kegiatan ekonomi dapat dianggap berkelanjutan di UE. Regulasi ini mulai berlaku pada tahun 2020 dan berlaku bagi lembaga keuangan, yang mewajibkan mereka untuk mengungkapkan proporsi aktivitas keuangan mereka yang memenuhi syarat dan selaras dengan taksonomi. Kerangka kerja ini berfungsi sebagai alat transparansi pasar yang penting dan membantu mengarahkan investasi ke kegiatan ekonomi yang paling sejalan dengan tujuan lingkungan dan keberlanjutan.

# GREENWASHING

Area Risiko



Otoritas Bank Eropa (EBA) telah mencatat “peningkatan yang jelas” dalam potensi kasus greenwashing (klaim yang menyesatkan dan berlebihan mengenai keberlanjutan produk atau layanan) di sektor keuangan selama beberapa tahun terakhir, khususnya yang berkaitan dengan jasa perbankan dan investasi. Greenwashing memiliki risiko reputasi, finansial, dan penuntutan yang serius. EBA mencatat adanya masalah khusus pada bank dan investor yang mempromosikan dukungan terhadap inisiatif seperti energi bersih tanpa menyebutkan pembiayaan mereka terhadap proyek-proyek yang terkait dengan deforestasi, bahan bakar fosil, dan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa bank yang berkantor pusat di Uni Eropa juga mendapat kecaman karena berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang diduga terkait dengan deforestasi di Amazon, meskipun mereka mengaku melakukan hal sebaliknya – khususnya melalui pasar obligasi ramah lingkungan (atau Sertifikat Piutang Agribisnis) di Brasil.

Pesatnya pertumbuhan pasar ini – mungkin sebaliknya – menimbulkan risiko konversi lahan bagi lembaga keuangan. Obligasi ini diciptakan untuk mendukung praktik petani skala kecil dan berkelanjutan di negara tersebut, namun dalam praktiknya – pasar telah membengkak sekitar €8 miliar – obligasi ini sering kali membiayai perusahaan-perusahaan besar dan pemasok mereka yang terkait dengan kegiatan deforestasi dan tuduhan kerja paksa. Untuk mengurangi risiko greenwashing, Dewan Eropa mengadopsi regulasi yang menciptakan standar obligasi hijau Eropa pada bulan Oktober 2023, yang menetapkan persyaratan seragam (termasuk persyaratan pengungkapan sukarela) bagi penerbit obligasi tersebut. Regulasi ini akan mulai berlaku pada bulan Oktober 2024 dan mencakup semua entitas yang sudah tercakup dalam Regulasi Taksonomi UE.



## Peraturan Pengungkapan Keuangan Berkelanjutan (SFDR)

SFDR, yang disahkan menjadi undang-undang pada bulan Maret 2021, menetapkan standar pengungkapan minimum yang ketat untuk mencegah greenwashing pada produk investasi yang mengklaim tujuan ESG atau terkait ESG. Berlaku bagi semua lembaga keuangan dan penasihat keuangan UE, SFDR bertujuan untuk meningkatkan transparansi terhadap pengungkapan terkait keberlanjutan di sektor jasa keuangan baik pada tingkat entitas maupun produk keuangan. Pelaporan materialitas ganda dan tingkat ganda ini dimaksudkan untuk diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan investasi mereka.

Meskipun SFDR tidak berfokus pada deforestasi, pengungkapan wajib dan sukarela dalam peraturan ini akan mengekspos lembaga keuangan yang berinvestasi pada perusahaan dengan praktik penggunaan lahan merugikan yang berdampak negatif pada kawasan sensitif keanekaragaman hayati, atau perusahaan yang tidak memiliki kebijakan mengenai deforestasi. Namun, degradasi lahan berada di bawah bendera pengungkapan sukarela dan bukan wajib berdasarkan SFDR.



**INGGRIS RAYA**

## Undang-undang Lingkungan Hidup Inggris Raya tahun 2021 dan Rencana Perbaikan Lingkungan tahun 2023

Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 2021 memperkenalkan ketentuan baru yang melarang perusahaan besar yang beroperasi di Inggris Raya untuk menggunakan komoditas yang memberi risiko pada hutan yang ditanam di lahan yang ditempati atau digunakan secara ilegal. Berdasarkan Undang-undang ini, pemerintah Inggris Raya menerbitkan Rencana Perbaikan Lingkungan 2023 pada bulan Januari, yang menguraikan tindakan spesifik seputar kejahatan lingkungan. Rencana tersebut mencakup tujuan peralihan ke rantai pasokan yang lebih berkelanjutan untuk memerangi deforestasi dan garis besar niat pemerintah untuk mengoperasionalkan ketentuan Undang-undang Lingkungan Hidup tahun 2021 melalui undang-undang sekunder. Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam lingkup ini akan diwajibkan untuk melakukan uji tuntas pada rantai pasokan mereka dan melaporkan secara publik mengenai pelaksanaan ini setiap tahun – jika tidak, mereka akan menghadapi risiko denda dan sanksi perdata lainnya. Pemerintah telah berkomitmen untuk menerapkan peraturan ini sedini mungkin.

Pada bulan Januari 2024, Komite Audit Lingkungan Hidup Parlemen Seluruh Partai di Parlemen Inggris Raya menerbitkan suatu laporan tentang kontribusi Inggris Raya dalam mengatasi deforestasi global, dengan rekomendasi eksplisit bahwa "Pemerintah mengajukan undang-undang untuk memasukkan bisnis di sektor keuangan Inggris ke dalam cakupan tata aturan Lampiran 17" UU Lingkungan Hidup 2021. Hal ini memberi ketentuan bagi pemerintah untuk membentuk sistem uji tuntas untuk komoditas dengan risiko hutan dan menetapkan kerangka peraturan penggunaan komoditas ini dalam kegiatan komersial. Laporan tersebut mencatat bahwa diperlukan legislasi sekunder untuk menentukan ruang lingkup komoditas dan bisnis, persyaratan pelaporan, kerangka penegakan hukum, dan jadwal implementasi – yang mengadvokasi inklusi sektor keuangan.

## UU Jasa Keuangan dan Pasar

Amandemen 91 terhadap klausul 65 RUU Jasa Keuangan dan Pasar disahkan di House of Lords pada tahun 2023 dan, jika disahkan oleh Anggota Parlemen, akan mewajibkan lembaga keuangan untuk menerapkan tata aturan uji tuntas untuk memastikan bahwa aktivitas mereka - baik langsung maupun tidak langsung - tidak mendukung deforestasi atau konversi lahan dan mematuhi undang-undang setempat yang relevan. Hal ini mencakup kegiatan komersial yang berkaitan dengan komoditas yang memberi risiko kepada hutan dan produk turunannya (seperti kertas dan pulp).

## HORIZON SCAN: THE UK GREEN TAXONOMY

The UK Green Taxonomy (Taksonomi Hijau Inggris Raya) telah dikembangkan sejak tahun 2021 dan, jika diterapkan, akan membantu Inggris dalam mengatasi greenwashing, mengurangi emisi karbon, dan mencapai tujuan net zero. The UK's Green Technical Advisory Group (GTAG), sebuah panel ahli yang dibentuk untuk memberikan saran independen kepada pemerintah Inggris Raya mengenai pembentukan taksonomi hijau, menyerukan agar kerangka kerja tersebut segera diterapkan. Tujuan dari Taksonomi Hijau Inggris Raya adalah memberi kerangka umum untuk menentukan kegiatan mana yang dapat didefinisikan sebagai 'berkelanjutan secara lingkungan'. Rekomendasi GTAG mencakup pengembangan definisi dan kriteria yang jelas untuk menentukan kegiatan ekonomi yang memenuhi syarat sebagai ramah lingkungan. Panduan ini menyoroti KPI spesifik dalam pemantauan dan pelaporan aktivitas yang selaras dengan taksonomi, yang disusun untuk mengatasi berbagai aspek lingkungan, seperti emisi karbon, penggunaan air, dan timbulan limbah. Salah satu tujuan utama Taksonomi Hijau Inggris Raya adalah untuk meningkatkan integritas pasar dan memerangi meningkatnya kasus greenwashing yang dilakukan oleh perusahaan dan lembaga keuangan, serta menyediakan sistem yang transparan untuk mengevaluasi kelestarian lingkungan dari berbagai aktivitas. Meskipun kerangka akhirnya belum dipublikasikan, kerangka ini diperkirakan akan selaras dan dibangun berdasarkan kerangka Taksonomi UE yang mulai berlaku pada tahun 2020.

## HORIZON SCAN: SATUAN TUGAS GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

Satuan Tugas GRI, sebuah organisasi independen yang didirikan pemerintah Inggris Raya, telah merekomendasikan bahwa:

- Sebuah "target yang mengikat secara hukum" ditetapkan untuk mengakhiri deforestasi di rantai pasokan komoditas pertanian dan kehutanan Inggris Raya sesegera mungkin dan paling lambat pada tahun 2030, dimulai dengan "komoditas dan produk turunan yang berkontribusi paling signifikan terhadap deforestasi sebelum meluas ke rantai pasokan lainnya."
- Kewajiban uji tuntas wajib diberlakukan pada bisnis dan keuangan yang berhubungan dengan konversi lahan.





## Departemen Keuangan AS

Departemen Keuangan AS telah terlibat aktif dalam memerangi kejahatan lingkungan melalui berbagai inisiatif.

### The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

FinCEN, sebuah lembaga pengatur di Departemen Keuangan AS, telah menyatakan keprihatinannya atas pembiayaan kejahatan lingkungan hidup, dengan menerbitkan pemberitahuan kepada lembaga keuangan yang menyoroti risiko aktivitas keuangan gelap yang terkait dengan pembalakan liar dan perdagangan terkait. Selain itu, pada tahun 2023 Amerika menerbitkan berbagai laporan mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurangi deforestasi internasional.

### Office of Foreign Asset Control (Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri)

Departemen Keuangan AS telah terlibat aktif dalam memerangi kejahatan lingkungan melalui berbagai inisiatif, serta melalui sanksi terhadap individu dan entitas yang terkait dengan ekstraksi sumber daya. Misalnya, pada bulan Mei 2023, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC), Departemen Keuangan AS memberi sanksi kepada empat penyelundup arang yang terlibat dalam ekspor ilegal arang Somalia, yang dinyatakan berperan dalam membiayai kelompok teroris al-Shabaab. serta mendorong deforestasi dan kerusakan lingkungan. Pemerintah juga memberi sanksi kepada warga negara Kamboja, Try Pheap, karena membangun konsorsium pembalakan liar berskala besar yang mengandalkan kolusi dengan pejabat Kamboja, termasuk pejabat militer dan taman nasional, serta pembelian perlindungan dari pemerintah. Pheap memperdagangkan kayunya secara ilegal dan menjualnya kepada pembeli di Vietnam, Tiongkok, Eropa, dan Rusia melalui militer Kamboja.







## STUDI KASUS: THE LACEY ACT

Departemen Kehakiman AS juga telah menuntut entitas yang terkait dengan deforestasi berdasarkan Lacey Act, yang melarang impor tanaman dan produk tanaman yang dipanen secara ilegal ke AS. Dalam satu kasus, perusahaan Global Plywood and Lumber Trading LLC mengaku bersalah karena mengimpor 92% kayunya secara ilegal dari Amazon Peru.



## HORIZON SCAN:

# PERINTAH EKSEKUTIF UNTUK MEMPERKUAT HUTAN, MASYARAKAT, DAN EKONOMI LOKAL NEGARA

Pada bulan Oktober 2022, Departemen Luar Negeri AS menerbitkan permintaan masukan publik mengenai opsi-opsi untuk usulan undang-undang, berdasarkan Perintah Eksekutif tentang Penguatan Hutan, Komunitas, dan Ekonomi Lokal Negara, yang akan mencakup “pendekatan seluruh pemerintah untuk memerangi deforestasi internasional”. Opsi yang diusulkan meliputi:

- membatasi atau menghapus komoditas tertentu yang ditanam di lahan yang mengalami deforestasi baik secara ilegal, maupun secara legal dan ilegal setelah tanggal 31 Desember 2020 dari rantai pasokan pertanian; dan
- kemitraan pemerintah-swasta dengan pembeli utama komoditas pertanian, pedagang, lembaga keuangan, dan aktor lain untuk secara sukarela mengurangi atau menghilangkan pembelian komoditas tersebut dan sebagai gantinya memberi insentif pada pengadaan komoditas pertanian yang diproduksi secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari hal ini, Koalisi Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi Perusahaan (FACT) (sebuah aliansi non-partisan yang terdiri dari lebih dari 100 organisasi tingkat negara bagian, nasional, dan internasional) menyampaikan rekomendasi untuk “secara lebih holistik mengatasi peran keuangan gelap dalam mendukung dan memberi manfaat bagi pembalakan liar dan deforestasi di luar negeri” dengan “memasukkan pemodal AS yang terkait dengan deforestasi ilegal dalam lingkup pihak-pihak yang diatur untuk membatasi atau menghapus komoditas tertentu yang ditanam di lahan yang ditebang secara ilegal dari rantai pasokan pertanian”.



# HORIZON SCAN: FOREST ACT

Proposal legislatif – Undang-Undang Pembinaan Aturan Hukum Luar Negeri dan Perdagangan yang Berwawasan Lingkungan (FOREST) (diperkenalkan kembali untuk ditinjau di Kongres AS pada bulan Desember 2023) – berupaya untuk melarang impor produk-produk yang terkait dengan deforestasi ilegal ke AS. Undang-undang ini akan mengubah Undang-Undang Tarif AS, dengan menambahkan pasal baru yang melarang impor produk-produk yang terbuat dari komoditas yang diproduksi di lahan yang mengalami deforestasi ilegal pada atau setelah tanggal berlakunya Forest Act. Komoditas-komoditas ini pada awalnya mencakup minyak sawit, kedelai, sapi, kakao, karet, dan pulp kayu – namun daftar ini akan diperbarui setiap tahun. Para importir perlu membuktikan bahwa produk mereka bebas deforestasi, melalui transparansi yang lebih besar dan pelaporan yang berkualitas lebih tinggi dalam rantai pasokan mereka.

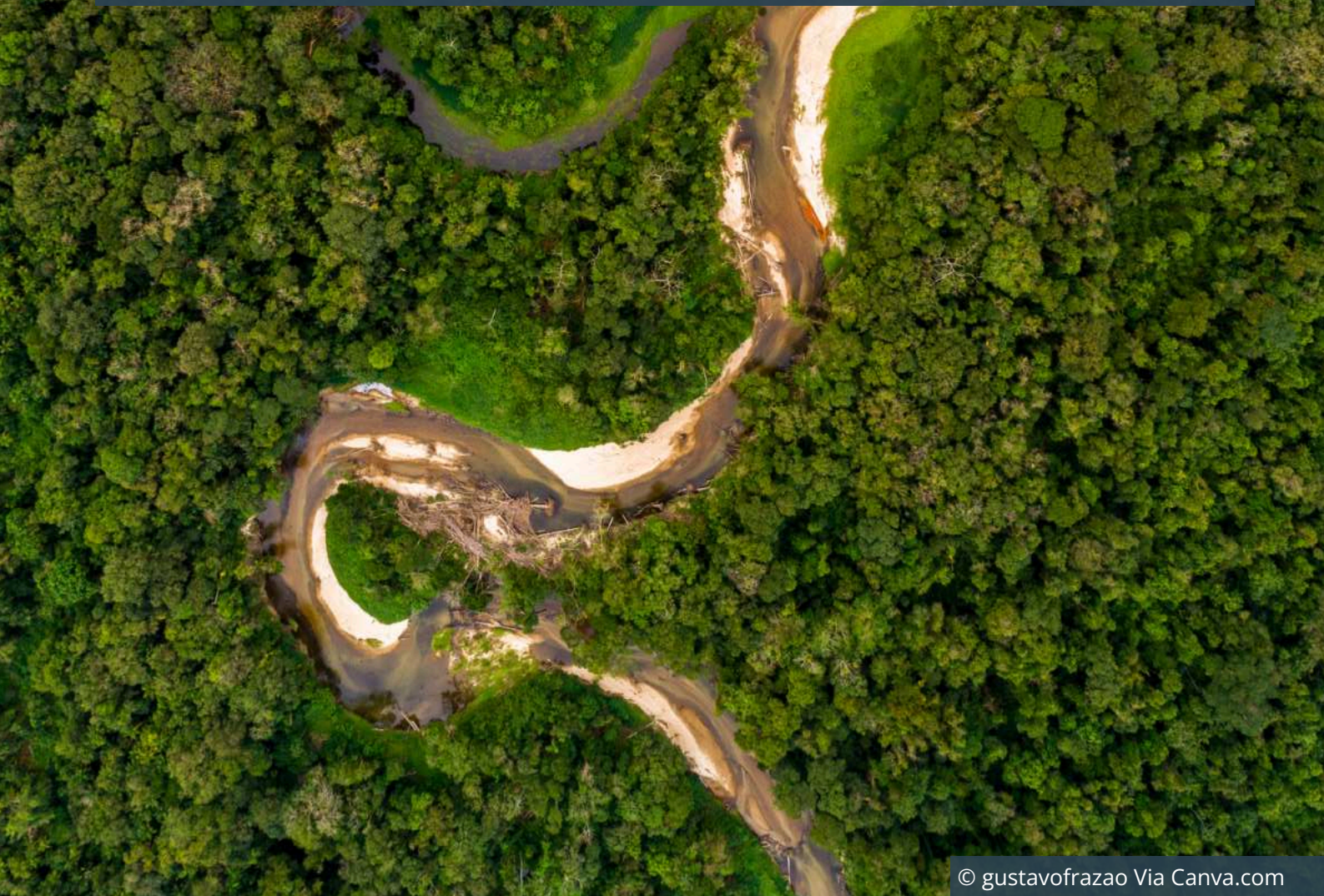
RUU tersebut juga mengusulkan penambahan deforestasi ilegal sebagai kejahatan asal (predicate offence) ke dalam undang-undang pidana pencucian uang AS. Dengan melihat deforestasi ilegal melalui kacamata tindak pidana asal, AS akan dapat mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang menggunakan deforestasi ilegal untuk mendanai terorisme atau organisasi kriminal lainnya.

Pada bulan Desember 2023, Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS memperkenalkan kembali "Undang-undang Mendorong Supremasi Hukum Luar Negeri dan Perdagangan yang Berwawasan Lingkungan tahun 2023" (Forest Act tahun 2023) ke Kongres. RUU ini bertujuan melarang impor yang terkait dengan deforestasi ilegal, yang didefinisikan sebagai "deforestasi yang dilakukan dengan melanggar hukum (atau tindakan apa pun yang memiliki kekuatan dan akibat hukum) di negara tempat deforestasi terjadi, termasuk undang-undang antikorupsi, undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang hak kepemilikan tanah, dan undang-undang yang berkaitan dengan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan dari masyarakat adat dan komunitas lokal." RUU tersebut mengusulkan tindakan yang lebih ketat bagi importir yang berurusan dengan produk-produk yang terkait dengan deforestasi ilegal, yang mencakup minyak sawit, kedelai, kakao, sapi, dan karet. Importir dari produk-produk tersebut (dan turunannya) harus menunjukkan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menilai dan memitigasi risiko bahwa setiap komoditas yang dilindungi yang digunakan untuk memproduksi produk yang dilindungi, diproduksi di lahan yang mengalami deforestasi ilegal pada atau setelah tanggal berlakunya UU tersebut. Pada saat penulisannya, RUU ini belum mengatur detail proses uji tuntas dengan jelas dan menginstruksikan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mengembangkan pedoman tentang apa yang dimaksud dengan "perawatan yang wajar."



Berdasarkan RUU tersebut, importir akan diminta untuk mendapatkan sertifikasi mitigasi terhadap risiko deforestasi dan menghadapi audit oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP). Program pedagang terpercaya akan menawarkan proses yang disederhanakan bagi importir yang memiliki catatan kepatuhan dan “sistem uji tuntas yang transparan dan kredibel”. RUU ini akan memberi bantuan teknis kepada negara-negara yang membantu dalam menghilangkan deforestasi ilegal, yang didanai oleh denda dari importir yang terkena sanksi.

Selain itu, RUU tersebut akan mencantumkan deforestasi ilegal sebagai aktivitas yang melanggar hukum pada pasal 1956(c)(7)(B) dari judul 18, sehingga menjadikannya aktivitas yang melanggar hukum tertentu berdasarkan undang-undang pencucian uang AS. Sesuai dengan ketentuan undang-undang AS ini, individu, dan entitas (termasuk warga negara asing yang terlibat dalam transaksi di AS) dapat didenda dan dipenjara jika secara sengaja melakukan transaksi keuangan yang melibatkan properti yang berasal dari aktivitas melanggar hukum. Ketentuan ini dapat menjadi alat penegakan hukum yang signifikan dalam kampanye melawan deforestasi ilegal, dan lembaga keuangan harus mempertimbangkan ketentuan ini sebagai pertimbangan kepatuhan baru dalam proses mitigasi risiko mereka. Lembaga-lembaga keuangan belum masuk dalam cakupan FOREST Act yang diusulkan pada tahap ini namun ada seruan untuk memasukkan lembaga-lembaga tersebut – dan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencakup sektor keuangan di UE dan Inggris, kemungkinan besar lembaga-lembaga tersebut akan tetap menjadi perhatian.





## Ekstrateritorialitas

Ekstrateritorialitas sebagian besar undang-undang terkait kejahatan keuangan di AS berarti bahwa meskipun lembaga atau aktivitas tidak beroperasi atau berlangsung di wilayah AS, mereka masih dapat menghadapi tuntutan karena cakupan tanggung jawab pidana korporasi yang lebih luas. Perundang-undangan AS, misalnya, dapat berlaku tidak hanya terhadap individu dan entitas AS, namun juga terhadap barang dan aktivitas yang terjadi melalui sistem keuangan di AS. Cakupannya sangat luas, mencakup semua transaksi dengan atau dalam USD yang terjadi secara global, tidak hanya di AS.

Risiko terhadap perusahaan sehubungan dengan tindakan ekstrateritorial Amerika telah berulang kali ditunjukkan; misalnya, melalui sanksi yang dijatuhkan pada perusahaan-perusahaan Eropa karena melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA). Hal ini harus menjadi risiko utama bagi perusahaan yang terkena konversi lahan melalui hubungan dengan pihak ketiga, karena aktivitas ini sering kali disertai dengan kejahatan keuangan seperti korupsi dan pencucian uang. Undang-undang AS yang memiliki relevansi khusus meliputi:



**FCPA** - Ketentuan anti-penyuapan dan akuntansi dalam FCPA dapat diterapkan pada kejahatan kehutanan, dan melalui ketentuan ini Departemen Kehakiman AS dapat mengajukan tuntutan pidana - dan tindakan perdata atau administratif Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Khususnya, jika suatu perusahaan penerbit memiliki laporan dan catatan akuntansi palsu, gagal menerapkan pengendalian internal, atau bertindak mengabaikan persyaratan ini untuk menyembunyikan kejahatan kehutanan, maka penerbit (dan pihak-pihak terkait) dapat dimintai pertanggungjawaban.



**Undang-Undang Anti Pencucian Uang** - Berdasarkan Undang-undang ini, jika suatu transaksi keuangan di AS dengan sengaja melibatkan hasil kejahatan dari "aktivitas tertentu yang melanggar hukum" - bahkan saat tidak ada keterlibatan langsung dalam pelanggaran yang mendasarinya - maka transaksi tersebut termasuk dalam cakupan pencucian uang. Hal ini mencakup keuntungan yang diperoleh perusahaan melalui kontrak atau persetujuan lisensi berdasarkan peraturan yang diperoleh melalui suap (misalnya, perusahaan kayu, kedelai, kakao, dan kelapa sawit membayar pejabat dengan imbalan konsesi atau keringanan dari penegakan peraturan). Misalnya, dalam kasus seorang raja kelapa sawit yang mengembangkan bank tanah melalui cara-cara korup, menanam tanaman pertanian dan kemudian menggunakan sistem keuangan AS untuk menjual perusahaannya, semua pihak dalam akuisisi ini yang mengetahui kejadian tersebut mungkin harus bertanggung jawab.



**Global Magnitsky Act** - Berdasarkan Undang-Undang ini, transaksi keuangan dengan pejabat asing yang tercatat bertanggung jawab atas korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia dilarang, begitu pula transaksi dengan individu dan entitas yang mendukung dan membiayai pejabat asing tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam konteks konversi lahan mengingat seringnya terjadi konvergensi dengan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia - termasuk perampasan lahan, perdagangan manusia, dan kekerasan terhadap masyarakat adat. Misalnya, pada tahun 2018, sanksi berdasarkan Magnitsky Act dikenakan terhadap Dan Gertler dan entitas yang diduga terkait dengannya karena praktik pertambangan yang korup - yang terkait erat dengan pembukaan lahan - di Afrika Barat. AS berencana menerapkan hukuman serupa melalui Undang-Undang tersebut untuk memberikan sanksi kepada penjahat yang terlibat dalam korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia untuk memfasilitasi deforestasi di Amazon.



## STUDI KASUS: DAN GERTLER

Dan Gertler adalah miliarder Israel yang memperoleh keuntungan besar dari perolehan lisensi pertambangan dan minyak dengan harga murah dari pemerintah Republik Demokratik Kongo atau perusahaan multinasional milik negara dan bertindak sebagai perantara penjualan aset pertambangan di negara tersebut, melalui koneksinya dengan mantan Presiden Kongo Joseph Kabila. Dalam hubungan ini, beberapa perusahaan multinasional diharuskan melalui Gertler untuk berbisnis dengan pemerintah. Penambangan mineral di Republik Demokratik Kongo termasuk tembaga, emas, berlian, kobalt, uranium, dan coltan, serta eksplorasi minyak, menyebabkan deforestasi dan konversi lahan dalam skala luas di berbagai ekosistem termasuk lahan gambut, hutan kering, dan sabana.

Gertler dijatuhi sanksi pada tahun 2017 oleh Departemen Keuangan AS karena korupsi, bersama dengan seorang rekannya, Joseph Kabila Kabange, dan 19 perusahaan yang terkait dengannya. Pada tahun 2018, 14 entitas berbeda yang dimiliki atau dikendalikan oleh Gertler dikenakan sanksi dan, pada tahun 2021, begitu pula rekanan lainnya, Alain Mukonda dan entitas yang terkait dengannya, karena memberikan dukungan kepada Gertler selama ia dikenakan sanksi. Departemen Keuangan menetapkan bahwa Republik Demokratik Kongo kehilangan pendapatan sekitar USD1,36 miliar karena harga aset pertambangan yang terlalu rendah yang dijual ke perusahaan luar negeri yang terkait dengan Gertler.



© James Via Canva.com



GAMBAR 20: PETA RISIKO PENELUSURAN THEMIS TENTANG ENTITAS DAN ASOSIASI YANG TERKAIT DENGAN DAN GERTLER

## Dan Gertler

Gender: Male

Date of birth: [Redacted]

Nationality: Israel

Addresses: Business: Tel Aviv, Israel... [More]

Aliases: Daniel Gertler (Name Spelling Variation)... [More]

Adverse Media

Adverse media has been reported against Dan Gertler

**Bribing Another Person**

Event: Pre-Trial: Preliminary Investigation

Date: 2022-10-05

Development in the British investigation against Dan Gertler on corruption in the Congo: you will receive information from Switzerland

On 5 October 2022, the Federal Court in Geneva ordered the transfer to the Office for Fraud Investig... [More]



# A

## LAMPIRAN 2: SARAN DAN BIMBINGAN DARI BADAN INTERNASIONAL

### The Basel Institute on Governance

The Basel Institute on Governance telah menerbitkan sebuah alat edukasi yang menyelidiki kejahatan kehutanan dan perdagangan kayu ilegal, dengan memberikan penekanan khusus pada kejahatan keuangan dan kelemahan rantai pasokan yang meningkatkan risiko hukum, keuangan, dan reputasi perusahaan. Sumber daya ini menawarkan studi kasus dan tipologi perdagangan kayu ilegal di seluruh rantai pasokan, dari negara sumber, transit, dan tujuan.

### CITES

CITES adalah perjanjian internasional antar pemerintah, yang melibatkan 184 negara penandatanganan di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi spesies yang terancam punah dari dampak negatif perdagangan internasional. Hal ini memainkan peran penting dalam regulasi kayu; mengawasi perdagangan internasional hampir 800 spesies pohon, mengatur perdagangan produk hutan kayu dan non-kayu tertentu untuk memastikan legalitas, keberlanjutan, dan ketertelusuran. Berdasarkan CITES, UE berkewajiban melindungi sekitar 30.000 spesies tanaman yang terdaftar dari eksploitasi berlebihan melalui perdagangan internasional dengan menegakkan izin penggunaan spesies yang dilindungi, dan semua perdagangan yang melanggar CITES adalah ilegal.

### The Financial Action Task Force (FATF)

FATF merekomendasikan bahwa kejahatan lingkungan – yang mencakup kejahatan pembalakan liar dan kehutanan – dianggap sebagai tindak pidana asal pencucian uang dalam peraturan nasional di semua negara.

Beberapa dari 40 Rekomendasi FATF memiliki relevansi khusus terhadap deforestasi, termasuk:

**Rekomendasi 4** - Pihak yang berwenang harus membekukan atau menyita dan menahan aset yang dicuci atau hasil kejahatan asal.

**Rekomendasi 10** - Lembaga keuangan wajib melakukan Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence - CDD) saat menjalin hubungan bisnis dan saat melakukan transaksi yang bersifat mencurigakan.

**Rekomendasi 20 dan 23** – Jika lembaga keuangan memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa dana tersebut mungkin merupakan hasil kegiatan kriminal, lembaga tersebut harus segera melaporkan kecurigaan tersebut kepada FIU.

## Global Witness

Global Witness adalah sebuah LSM internasional yang bekerja untuk “memutus hubungan antara eksploitasi sumber daya alam, konflik, kemiskinan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia”, melalui penelitian investigatif, publikasi laporan dan ringkasan kebijakan, serta kampanye advokasi. Organisasi ini bertujuan meminta pertanggungjawaban perusahaan dan pemerintah atas pendanaan konversi lahan dan merupakan pendukung utama uji tuntas terhadap risiko yang terkait konversi lahan. Global Witness menerbitkan banyak artikel dan laporan mengenai studi kasus dan topik utama terkait dengan paparan konversi lahan lembaga keuangan. Lebih jauh, Global Witness melaporkan berita dan penelitian terkini terkait isu ini dan menyerukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap para penyandang dana di dunia atas peran mereka dalam isu ini.

## Nature Crime Alliance (NCA)

Diluncurkan pada bulan Agustus 2023 oleh pemerintah Norwegia, Amerika Serikat, dan Gabon, NCA adalah jaringan multi-sektor global yang memfasilitasi kerja sama antara pemerintah dan lembaga penegak hukum, perusahaan dan lembaga keuangan, masyarakat sipil, dan donor. Aliansi ini bertujuan mengintegrasikan dan memajukan aliran informasi, teknologi, dan pendanaan yang lebih besar untuk memperkuat upaya global dalam memerangi kejahatan alam seperti pembalakan liar, konversi lahan, penangkapan ikan ilegal, pertambangan, dan perdagangan ilegal satwa liar. Aliansi ini penting karena menyatukan kemauan politik, komitmen finansial, dan kapasitas operasional yang lebih kuat untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan aktivitas kriminal yang terkait dengannya. Salah satu tujuan NCA adalah memulai proyek untuk “mengidentifikasi dan mengganggu aliran keuangan yang terkait dengan kejahatan alam.” FACT Coalition menjadi anggota NCA pada bulan September 2023.

## The UN Office of Drugs and Crime (UNODC)

UNODC telah mendorong penerapan investigasi keuangan terhadap kejahatan asal yang terkait dengan konversi lahan, serta pelatihan dan pendampingan kepada otoritas terkait di sektor keuangan untuk membantu mengidentifikasi jenis kejahatan ini. UNODC bekerja membantu negara-negara anggota dalam mencegah pencucian uang, melakukan investigasi keuangan paralel, serta melacak, menyita, dan menahan hasil kejahatan di sektor kehutanan. Selain itu, UNODC telah menerbitkan serangkaian informasi edukasi tentang berbagai kejahatan keuangan beserta panduan FATF yang sesuai.

## Pengaturan mandiri industri

### The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)

GFANZ adalah koalisi global yang terdiri lebih dari 500 lembaga keuangan, yang dipimpin bersama oleh Utusan Khusus PBB untuk Aksi Perubahan Iklim dan Keuangan, Mark Carney. Para anggota – dengan basis aset gabungan senilai sekitar USD130 triliun – telah berkomitmen untuk melakukan upaya berkelanjutan untuk mencapai target emisi global net-zero pada tahun 2050. GFANZ merekomendasikan agar lembaga keuangan “berusaha menghilangkan deforestasi yang disebabkan oleh komoditas dari portofolio investasi dan pinjaman mereka.”



## Accountability Framework initiative

Pada tahun 2023, Accountability Framework initiative (AFi) – sebuah koalisi yang bertujuan memberi landasan dan dukungan bersama bagi perusahaan yang berupaya meningkatkan etika rantai pasokan – memperkenalkan panduan baru yang secara khusus dirancang untuk lembaga keuangan, dengan memberikan penekanan kuat pada uji tuntas terkait deforestasi, konversi lahan, dan hak asasi manusia. Laporan ini merekomendasikan agar perusahaan:



Menetapkan kebijakan peminjaman dan investasi yang bertanggung jawab, menilai risiko, melibatkan klien, dan mengungkapkan kemajuan.



Menilai risiko dan kinerja lingkungan dan sosial dalam portofolio mereka menggunakan standar dan platform pelaporan seperti penilaian Forest 500 dan panduan Engage the Chain dari Ceres.

Hal ini juga membantu membangun konsensus seputar definisi tunggal tentang hutan; Saat ini, terdapat lebih dari 800 definisi “hutan” yang digunakan di seluruh dunia, sehingga memberikan banyak ruang bagi para pelaku untuk menghindari peraturan seputar konversi lahan.

## Finance Sector Deforestation Action

The Finance Sector Deforestation Action (FSDA) diluncurkan pada COP26 sebagai inisiatif antara 37 lembaga keuangan dengan aset yang dikelola lebih dari USD 8,5 triliun dan telah berkomitmen untuk berupaya menghilangkan risiko deforestasi yang disebabkan oleh komoditas pertanian (dari sapi, kedelai, dan kedelai), kelapa sawit, pulp, dan kertas) dalam portofolio investasi dan pinjaman mereka pada tahun 2025.





## STUDI KASUS: BRASIL

Berdasarkan Ketentuan Penyesuaian Perilaku tahun 2009, yang ditandatangani secara sukarela oleh beberapa rumah potong hewan di Brasil, Federasi Bank Brasil setuju pada tahun 2023 untuk mewajibkan pengepakan daging dan rumah potong hewan yang mencari pembiayaan untuk menerapkan pemantauan lingkungan terhadap pemasok yang memelihara hewan ternak di Amazon. Pada bulan Desember 2025, perusahaan daging yang membeli sapi dari pemasok Amazon di Brasil diharapkan menerapkan “sistem penelusuran dan pemantauan” yang harus mengungkapkan informasi tentang segala jenis embargo akibat deforestasi ilegal, tumpang tindih kepemilikan lahan di kawasan lindung, serta seperti pendaftaran peternak sapi dan pencatatan informasi perolehan hewan.



## Hubungi Kami

Jika Anda ingin berbicara dengan kami mengenai tema atau pembaruan apa pun yang tercakup dalam laporan ini, silakan beri tahu kami.



**Nadia O'Shaughnessy**  
Head of Insight, Themis  
nos@wearethemis.com



**Jean-Luc Bourrin**  
Business Advocacy –  
Transition Finance Specialist,  
WWF-UK  
jbourrin@wwf.org.uk



**Olivia Dakeyne**  
Associate Director of Insight, Themis  
od@wearethemis.com



**John Dodsworth**  
Drivers Initiative, WWF-UK  
jdodsworth@wwf.org.uk



**Aine McParland**  
Financial Crime Researcher, Themis  
am@wearethemis.com

## Tentang Themis



Themis membantu klien mengidentifikasi dan mengelola risiko kejahatan keuangan spesifik, melalui kombinasi inovasi, wawasan, dan kecerdasan.

Platform mutakhir kami membantu organisasi memahami ancaman strategis ini melalui lensa ESG dan sosio-ekonomi serta melindungi pelanggan, staf, pemasok, dan pemegang saham mereka dari serangan atau asosiasi kriminal. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.wearethemis.com](http://www.wearethemis.com)

## About WWF



WWF (Worldwide Fund for Nature) is one of the world's largest independent conservation organisations, active in nearly 100 countries.

Our supporters – more than five million of them – are helping us to restore nature and to tackle the main causes of nature's decline, particularly the food system and climate change. We're working to ensure a world with thriving habitats and species, and to change hearts and minds so it becomes unacceptable to overuse our planet's resources.



Terhubung  
dengan kami



UK: +44 (0) 20 8064 1724  
MENA: +971 (0) 58 526 8765  
[info@wearethemis.com](mailto:info@wearethemis.com)

[www.wearethemis.com](http://www.wearethemis.com)



This report is licensed under a CC-BY 4.0 license. © WWF-UK 2024



For a future where people and nature thrive | [wwf.org.uk](http://wwf.org.uk)

© 1986 panda symbol and ® "WWF" Registered Trademark of WWF. WWF-UK registered charity (1081247) and in Scotland (SC039593). A company limited by guarantee (4016725)